



INDEKS KERAWANAN PEMILU 2024

PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK

INDEKS KERAWANAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

Penerbit



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Diterbitkan Oleh



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350

@Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (Copy) Isi Buku ini,
Diperkenankan dengan menyebutkan sumbernya

Cetakan Pertama Januari 2023

ISBN 978-623-6188-09-5 (PDF)

A standard linear barcode representing the ISBN number 9786236188095.

TIM PENYUSUN

Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

PENGARAH

Rahmat Bagja
Lolly Suhenti
Puadi
Totok Hariyono
Herwyn J.H. Malonda

PEMBINA

La Bayoni

PENANGGUNG JAWAB

Ibrahim Malik Tanjung

KETUA TIM

Bre Ikradjendra

TIM PENELITI

Aditya Perdana
Masykuruddin Hafidz
Yohan Wahyu
Afrimadona
Erik Kurniawan

TIM AHLI

Aditya Perdana
Masykuruddin Hafidz
Yohan Wahyu
Afrimadona
Erik Kurniawan
Mada Sukmajati
Ahsanul Minan
Daniel Zuchron
Wahidah Suaib
Nia Sjarifuddin
Mimah Susanti
Aji Pengestu
Rafif Pamemenang Imawan
Dian Permata
Sri Budi Eka Wardani

TIM ASISTEN PENELITI

Eko Agus Wibisono
Hanif Vidi Yuwono
Ike Meisye Laksmi
Rosalina Sihombing
Muhammad Habibi
Allya Hanifa
Yessi Oktavia
Tiara Nur Anisa
Nurcahyaningrum Oktaviyanti
Muhammad Subhan Nurul Umam
Juan Firman Ramadhani

TIM ADMINISTRASI

Nyayu Deviana Nur A
Marissa Laila Ramadhani
Anwar Fauzi

EDITOR

Tim Editor Bawaslu RI

DESAIN TATA LETAK

Insan Azzamit

Sambutan

Rahmat Bagja

Ketua Bawaslu



Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya sehingga Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini dapat diselesaikan. IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 adalah salah satu produk hasil penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan secara serentak tahun 2024. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis.

Bawaslu menyusun IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut,

yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan pemilu, (iii) kontestasi, dan (iv) partisipasi. IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 akan menggunakan 3 kategori yaitu, rendah, sedang dan tinggi. Melalui kategori-kategori tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Secara berkelanjutan Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sejak Pemilu Legislatif tahun 2014. Pada proses penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu menyempurnakan produk IKP agar lebih terukur dan semakin fungsional dengan tetap mengutamakan kejelasan dan konsistensi metodologi dan analisisnya. Data, pengalaman penyelenggaraan pilkada sebelumnya, serta pengetahuan tim ahli dalam mengidentifikasi dan memproyeksi potensi terjadinya kerawanan pilkada dijadikan sebagai basis utama menyusun IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dirilis pada saat ditetapkannya partai politik peserta Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak tahapan yang diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu. Melalui serangkaian tahapan, Bawaslu melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, praktisi, dan pegiat Pemilu dalam proses penyempurnaan IKP tersebut. Sementara dalam tahapan pengumpulan data, Bawaslu RI melibatkan seluruh Bawaslu di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk lingkup internal Bawaslu, hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 bermanfaat untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Indeks ini akan memudahkan Bawaslu menyusun strategi pencegahan dan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan. Bagi para pemangku kepentingan, keberadaan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, yang semakin baik. Hal ini tentu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokrasi.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah berperan aktif melakukan penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Besar harapan kami agar produk ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara.

**“Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”**

Kata Pengantar

Lolly Suhenty

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan Pemilu, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan. Pendekatan pencegahan dalam pengawasan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, memerlukan pemetaan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penguatan dan peningkatan kapasitas riset terus dilakukan oleh Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan kajian kePemiluan sesuai perubahan lingkungan sosial politik kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan di bidang kePemiluan. Melalui pendekatan pencegahan, (i) Melakukan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. (ii) Menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilu. (iii) Menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI. Sasaran informasi IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 adalah Penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); pemerintah pusat maupun daerah; lembaga negara nonstruktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil.

Dalam penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Bawaslu menyempurnakan kembali instrumen IKP tahun sebelumnya. Hal ini mengingat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 memiliki mekanisme yang berbeda dengan pemilu maupun pemilihan sebelumnya yang dilaksanakan secara serentak.

Penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 sendiri mendasarkan pada empat dimensi penting dalam Pemilu yang demokratis, yaitu (i) Konteks sosial-politik, (ii) Penyelenggaraan Pemilu, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. Metode analisis dalam IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah data driven, yaitu bahwa hasil indeks sangat ditentukan oleh data kejadian yang ada di lapangan dan dialami oleh provinsi dan kabupaten/kota.

Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, diharapkan dapat memberikan alat deteksi dini (early warning system) bagi seluruh perangkat Bawaslu, dari Kabupaten/Kota hingga Provnsi agar dapat memetakan dan mengantisipasi potensi pelanggaran Pemilu, khususnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024, sehingga dengan demikian diharapkan akan menghasilkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Daftar Isi

**SAMBUTAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Signifikansi	3
C. Definisi dan Operasionalisasi Konsep.....	4
D. Metode	14
D.1 Pengumpulan Data	14
D.2 Analisa Data	18
E. Tahapab Pelaksanaan	23
F. Sistematika Laporan.....	24

BAB 2 SEJARAH PERJALANAN INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)

28

A. Titik Awal	29
B. Perubahan dalam Instrumen dan Konstruksi IKP.....	31

BAB 3
**DATA DAN TEMUAN TINGKAT PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA**

42

A. Temuan Tingkat Provinsi	43
B. Temuan Tingkat Kabupaten/Kota	45
C. Temuan dalam Dimensi	68
C.1 Dimensi Konteks Sosial dan Politik.....	69
C.2 Dimensi Penyelenggaraan Pemilu.....	71
C.3 Dimensi Kontestasi.....	72
C.4 Dimensi Partisipasi.....	73

BAB 4
ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI

78

A. Analisa Umum	78
B. Analisa Provinsi	80
C. Analisa Kabupaten/Kota	85
D. Langkah Antisipasi	88

BAB 5
PENUTUP

92

A. Kesimpulan	98
B. Rekomendasi.....	99

**DAFTAR PUTAKA
LAMPIRAN**

Dewan Kehormatan



BAWASLU
BALAIKESINGAN BANTUL YOGYAKARTA



POLIS

Ulwab

Hati - Hati
Separator

Kecuali Bus
Transjakarta





BAB

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali merupakan sebuah amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 22E yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Atas dasar hal itulah, Pemilu Serentak 2024 kembali diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak politik dari warga negara di sebuah pemerintahan demokratis. Setiap lima tahun sekali, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik tanpa adanya satu tindakan yang mencederai pelaksanaan hak warga negara tersebut.

Salah satu hal yang menjadi catatan dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia belakangan ini adalah mewujudkan pemilu yang berintegritas berdasarkan asas pemilu yang disebutkan di atas telah menjadi referensi konstitusional di Indonesia. Berdasarkan pandangan imuan pemilu yang terkenal yaitu Norris, The New Research Agenda Studying Electoral Integrity (2013), pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berlangsung telah mengikuti standar atau norma-norma internasional dalam konteks *free and fair election* (pemilu yang bebas dan adil).

Hal yang tidak berbeda juga dikatakan oleh mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan dalam Foundation (2012) yang menyatakan bahwa pemilu yang berintegritas ditunjukkan dari bagaimana pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis tentang hak pilih

universal, kesetaraan, professional, imparsial, dan transparan pada seluruh siklus pemilu. Dalam konteks pemilu berintegritas yang dimaksud adalah mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah diselenggarakan di Indonesia. Ada banyak tantangan dan hambatan yang tidak mudah diatasi untuk mewujudkan norma dan standar internasional dalam pemilu. Bahkan dalam penilaian Electoral Integrity Project yang diadakan oleh Pippa Norris dalam publikasinya bersama Max Groemping pada tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan skor sebesar 54 dimana angka tersebut menunjukkan moderat.¹ Artinya, penilaian ini menjadi relevan untuk terus mendorong pemilu-pemilu di Indonesia terus dapat berintegritas di waktu yang akan datang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat yang dinyatakan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang terkait dengan pengawasan dan pencegahan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan (pilkada) di tahun 2024 mendatang. Dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan yang berlangsung, Bawaslu, di setiap tingkatan pusat, provinsi dan kab/kota, bertugas melakukan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan berlangsung sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, mengawasi terkait dengan netralitas ASN dan anggota TNI/Polri, serta mengawasi segala putusan KPU, DKPP, pengadilan ataupun pejabat lainnya yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Di samping itu, Bawaslu juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu serta berbagai sengketa dalam proses pemilu. Fungsi dari Bawaslu juga terkait dengan tugas tersebut, maka Badan ini melakukan hal-hal untuk memeriksa, mengkaji dan memutus berbagai pelanggaran administrasi pemilu dan politik uang. Pada saat yang bersamaan, Bawaslu juga dapat melakukan pemeriksaan, pengkajian, mediasi, ajudikasi dan pemutusan terhadap perselisihan sengketa pemilu. Serta merekomendasikan kepada instansi yang terkait untuk memutuskan hal yang terkait dengan netralitas ASN, TNI dan Polri. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki peran yang krusial dalam memastikan standard, norma dan aturan yang terkait pemilu dijalankan dengan baik oleh semua pihak.

1 Norris & Groemping, *Electoral Integrity Worldwide* (2019) melakukan penilaian persepsi terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas sepanjang tahun 2012-2018 terhadap 337 pemilu di 166 negara. Penilaian skor moderat berkisar di angka 50-59. Sementara penilaian angka paling tinggi berada di angka 100.

Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 huruf (a) dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dikatakan bahwa salah satu tugas Bawaslu dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, maka Bawaslu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu. Atas dasar itu, Bawaslu menjalankan satu usaha dalam pemetaan potensi kerawanan pemilu dan pilkada dalam bentuk kegiatan bernama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sebenarnya sudah dijalankan sejak tahun 2014 lalu. Posisi IKP adalah strategis untuk mendukung tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan antisipasi dari segala potensi yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu secara demokratis. Bagi Bawaslu, IKP merupakan instrumen penting dalam memetakan secara tepat tentang kondisi dan situasi yang dihadapi oleh setiap jajaran Bawaslu di daerah dalam mengawasi setiap tahapan kepemiluan yang sedang dan akan berjalan. Menuju Pemilu 2024, peran IKP menjadi lebih strategis untuk menjadikan setiap temuan yang penting dalam dimensi dari instrumen IKP sebagai bagian dari perencanaan, implementasi serta evaluasi setiap tahapan pengawasan kepemiluan yang ada.

B. Tujuan dan Signifikansi

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
- b. Menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilu
- c. Menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI.

Sebagai instrumen penting bagi Bawaslu RI, IKP 2024 ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan signifikansinya dalam dua hal yaitu: secara internal dan eksternal. Secara internal, IKP 2024 ini dapat berperan sebagai instrumen untuk membantu Bawaslu RI dalam melakukan desain perencanaan program dan antisipasi yang kompleks dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan kerawanan Pemilu di setiap daerah. Secara eksternal, IKP 2024 menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh para stakeholders kepemiluan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan media dan masyarakat sipil dalam membantu serta mendorong penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara kondusif dan baik.

C. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

Sebagai sebuah kerangka teori dan konseptual, IKP 2024 melihat ada tiga isu utama dalam literatur demokrasi dan pemilu terkini, yaitu pemilu yang demokratis, penyelenggaraan pemilu, malpraktek dan manipulasi pemilu. Tiga hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam instrumen dan indikator yang menjadi penilaian dalam IKP ini.

Dalam berbagai literatur demokrasi dan pemilu di dunia, salah satu referensi yang sering dirujuk adalah pandangan Robert Dahl terkait dengan bagaimana menghadirkan pemilu yang demokratis di sebuah negara. Demokrasi memang sederhananya, menurut Dahl, Democracy and Its Critics (1989), menyangkut pemerintahan oleh rakyat, dimana proses pembuatan kebijakan di dalam pemerintahan membutuhkan suara rakyat. Proses demokrasi di sebuah negara membutuhkan adanya partisipasi yang efektif dengan memperhatikan suara rakyat yang dikategorikan orang dewasa untuk memutuskan sebuah kebijakan secara kolektif. Tidak hanya, itu, Dahl juga mengingatkan bahwa sebuah negara demokrasi juga membutuhkan adanya ruang kontrol yang dilakukan oleh warga negara terhadap putusan dan kebijakan yang dihasilkan dari pertimbangan suara rakyat tersebut.

Secara prosedur, ada tujuh kriteria yang penting diperhatikan di sebuah negara demokrasi menurut Dahl (1982) seperti yang dikutip dalam Schmitter & Karl (1991), yakni: (a) kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan secara konstitusional dimiliki oleh pejabat terpilih; (b) pejabat yang terpilih dalam sebuah pemilihan yang sering dan dilakukan secara adil di mana pemaksaan dan kekerasan tidak biasa dilakukan; (c) praktis semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat; (d) praktis semua orang dewasa memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan di pemerintahan; (e) warga negara memiliki hak untuk berekspresi tanpa bahaya hukuman berat atas masalah politik yang didefinisikan secara luas; (f) warga negara berhak untuk mencari sumber informasi alternatif. Selain itu, sumber informasi alternatif ada dan dilindungi oleh hukum; (g) warga negara juga memiliki hak untuk membentuk asosiasi atau organisasi yang relatif independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang independen. Selain ketujuh kriteria tersebut, Terry dan Schmitter juga menambahkan dua kriteria yang penting yaitu: (h) pejabat yang dipilih secara populer harus dapat menjalankan kekuasaan konstitusionalnya tanpa menjadi sasaran penentangan (walaupun informal) dari pejabat yang tidak dipilih; (i) Pemerintah harus mengatur diri

sendiri; ia harus mampu bertindak secara independen dari batasan-batasan yang dipaksakan oleh beberapa sistem politik menyeluruh lainnya. Secara khusus, Dahl memang memberikan perhatian khusus dalam kriteria tersebut dalam pelaksanaan pemilu yang menyangkut hak pilih dan dipilih warga negara dan proses pemilihan pejabat melakukan mekanisme pelibatan warga negara.

Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, Pasal 25 Kovenan Internasional PBB untuk Hak Sipil dan Hak Politik pada tahun 1966, ada delapan prinsip utama penyelenggaraan pemilu yaitu 1) pemilihan umum dilakukan secara berkala; 2) pengakuan terhadap hak pilih universal 3) hak pilih yang sama bagi setiap orang, satu orang satu suara; 4) hak untuk dipilih 5) hak bagi semua pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih; 6) penggunaan surat suara dengan rahasia; 7) pemilihan yang murni; 8) dan pemilihan harus mencerminkan ekspresi bebas dari kehendak rakyat. Standar ini kemudian dikembangkan beberapa lembaga internasional seperti Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), The African Union (AU), The European Union (EU), The Organization of American States (OAS), dan The Carter Center (Norris, 2013). Inilah yang menjadi rujukan internasional dalam menghadirkan pemilu yang demokratis di sebuah negara.

Dalam referensi yang lain, Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (1971) menyatakan bahwa sebuah negara yang demokratis tentu membutuhkan dua aspek krusial yaitu hak berpartisipasi dari warga negara untuk mengikuti pemilu dan adanya ruang kontestasi publik yang dijamin oleh negara. Dua aspek yang dimaksud ini tentunya dapat diperlihatkan dalam bentuk bagaimana negara dapat menjamin adanya kesempatan yang sama bagi semua pihak dalam partisipasi pemilu, adanya perlakuan yang sama dan sehat dalam berkompetisi memperebutkan jabatan publik, serta tidak adanya ketakutan dan tidak adanya tekanan dari pihak manapun kepada setiap individu dalam mengekspresikan pandangan dan opininya di ranah publik. Sehingga, pandangan Dahl ini sebenarnya memperkuat bahwa pemilu sebagai salah satu instrumen penting dalam demokrasi dengan menekankan perlunya kompetisi dan partisipasi yang harus dijaga dengan baik, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, dalam penjelasan mengenai pemilu yang demokratis memerlukan adanya kompetisi dan partisipasi, maka hal ini menjadi dua dimensi dari IKP 2024 yaitu kontestasi dalam pemilu dan partisipasi.

Hal yang berikutnya menjadi penting diperhatikan dalam kerangka IKP 2024 ini adalah menyangkut penyelenggaraan pemilu yang dilihat dari tiga aspek yaitu tata Kelola kepemiluan (electoral governance) dan manajemen kepemiluan (electoral management) yang menjalankan aktivitas dan siklus dari seluruh tahapan kepemiluan (electoral cycles). Tata Kelola Kepemiluan dan Manajemen Kepemiluan menjadi instrumen pelaksana dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi.

Mozaffar & Schedler (2002) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai "sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan" yang tentu berkait dengan pemilu. Sedangkan Sukmajati, Mada; Perdana, Aditya (2019) lebih menekankan tata kelola pemilu adalah

"Sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan"

Sedangkan definisi dari manajemen kepemiluan menurut James, Garnett, Loeber, & van Ham (2019) adalah mengaplikasikan dan mengimplementasikan dari aturan/regulasi kepemiluan. Aturan tentang bagaimana pemilu dijalankan setelah dirancang serta dibentuk oleh para pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintahan. Namun demikian, proses menjalankan kepemiluan ini bukanlah semata-mata dilihat dari aspek teknis dan manajemen saja, ada juga hal yang tidak bisa dihindari aspek politik yang memerlukan negosiasi dari proses implementasi tahapan yang berjalan dengan konsekuensi hukum yang juga patut dipertimbangkan oleh para aktor yang terlibat.

Sementara itu, tahapan kepemiluan yang menjadi referensi internasional menurut Internasional IDEA Catt, Ellis, Maley, Wall, & Wolf, (2014) sebagai berikut:

- 1) penetapan kerangka legal. Dalam tahapan ini revisi sistem pemilu dan batasan-batasan kepemiluan bentuk dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, ataupun aturan perilaku dalam pelaksanaan pemilu dapat diajukan sebagai bahan legislasi kepemiluan;
- 2) perencanaan dan implementasi: tahapan ini menyangkut penganggaran, pendanaan dan pembiayaan, kalender kepemiluan, rekrutmen penyelenggara dan pelelangan/tender serta logistik dan keamanan;
- 3) training dan pendidikan: tahapan ini menyangkut bagaimana pendidikan kewarganegaraan dan informasi kepemiluan disampaikan kepada para pemilih;
- 4) pendaftaran pemilih: tahapan ini menyangkut soal pendaftaran pemilih, akreditasi para pemantau, pendaftaran peserta pemilu, dan akses kepada media;
- 5) kampanye pemilu: tahapan ini mengkoordinasikan kampanye dan pembiayaan kampanye dari partai politik;
- 6) pemungutan suara: tahapan ini menyangkut pemungutan suara, pemungutan suara spesial dan eksternal, penghitungan suara, dan tabulasi hasil suara;
- 7) verifikasi hasil: tahapan ini menyangkut penetapan hasil resmi, perselisihan hasil pemilu, dan audit serta evaluasi; dan
- 8) pasca pemilu: tahapan ini terkait dengan update data pemilih, reformasi regulasi, pengelolaan data dan riset.

Namun dalam konteks implementasi dari UU No.7/2017 tentang Pemilu dan UU No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati sebagai dasar pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang, tahapan pemilu dan pemilihan yang dimaksud sebagai berikut²:

- 1) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- 2) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- 3) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- 4) penetapan Peserta Pemilu;

2 Hal ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024

- 5) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- 6) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- 7) masa Kampanye Pemilu;
- 8) Masa Tenang;
- 9) pemungutan dan penghitungan suara;
- 10) penetapan hasil Pemilu; dan
- 11) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Sehingga apabila dibandingkan tahapan yang dibentuk oleh KPU dengan standar internasional yang berlaku, hal ini dapat dikatakan hampir sebagian besar sudah memenuhi apa yang sudah diterapkan di kalangan internasional. Beberapa aktivitas yang dapat berlangsung terus menerus seperti pelatihan dan sosialisasi pendidikan pemilih dimasukkan dalam kegiatan yang terus berkelanjutan meski tahapan lain juga berlangsung. Artinya kegiatan pendidikan pemilih tidak terukur waktu tertentu seperti layaknya tahapan lain yang memang harus dituntaskan dengan durasi waktu yang ada. Dalam kerangka yang tadi sudah dikatakan bahwa tata kelola, manajemen dan tahapan yang melengkapi penyelenggaraan pemilu adalah satu dimensi berikutnya dalam IKP 2024 ini.

Sementara itu, untuk menjelaskan aspek potensi kerawanan yang terjadi dalam setiap pemilu, IKP 2024 merujuk pada berbagai pandangan mengenai malpraktek dan manipulasi yang terjadi di banyak tempat, termasuk Indonesia. Menurut Sarah Birch (2011), malpraktek pemilu merupakan "manipulasi yang terjadi dalam proses penyelenggaran pemilu untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan meninggalkan kepentingan umum." Adapun bentuk malpraktek pemilu antara lain adalah manipulasi regulasi pemilu, praktik jual beli suara, bias partisan oleh komisi pemilihan umum, boikot oleh oposisi, dan kekerasan politik, mengajukan protes yang menimbulkan kekerasan yang dapat menimbulkan korban, terutama pada negara dengan pemilu yang ketat persaingannya dan rawan konflik (Norris, Do perceptions of electoral malpractice undermine democratic satisfaction? The US in comparative perspective, 2019).

Dalam buku yang sama (Birch, 2011) melakukan klasifikasi malpraktek pemilu menjadi tiga jenis, yakni: manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu (*manipulation of election legal framework*), manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih

dengan cara-cara yang manipulatif (*manipulation of vote choices*), terakhir manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir (*manipulation of electoral administration*). Sehingga Birch meyakini bahwa malpraktek pemilu yang terjadi di sebuah negara merupakan ancaman terhadap kualitas pemilu yang berdampak terhadap situasi dan kondisi sosial politik ataupun ekonomi di sebuah negara yang juga akan menurun. Dalam konteks tertentu, ini tentu dapat menjadi sebuah kondisi yang tidak menguntungkan bagi legitimasi pemerintahan demokrasi. Biasanya, malpraktek pemilu masif dilakukan di negara-negara otoriter. Pada negara otoriter, malpraktek biasa dilakukan oleh elit pemerintah yang berkuasa. Sementara itu, di negara-negara demokratis praktek ini tetap ada tetapi berbeda skala dan tidak dilakukan secara terbuka seperti di negara-negara non demokratis (Simpser, 2013)

Oleh karenanya, IKP 2024 memandang bahwa kejadian ataupun situasi yang mendorong adanya malpraktek dan manipulasi terhadap proses kepemiluan akan menjadi potensi kerawanan yang dapat mengancam penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia. Dalam kerangka itu, aspek sosial dan politik yang terjadi di sebuah daerah yang menunjukkan adanya potensi malpraktek ataupun manipulasi adalah sebuah dimensi yang patut diukur dalam IKP ini.

Dari penjelasan di atas, maka ada empat dimensi utama dalam pelaksanaan IKP 2024 yaitu

1 DIMENSI
KONTEKS SOSIAL POLITIK

2 DIMENSI
 PENYELENGGARAAN PEMILU

3 DIMENSI KONTESTASI

4 DIMENSI PARTISIPASI

Dari setiap dimensi ada sub dimensi dan indikator yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut yaitu:

Tabel 1 : Dimensi, Sub Dimensi dan Indikator IKP 2024

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator
1	Konteks Sosial dan Politik	Keamanan: fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan kekerasan, kerusuhan, intimidasi ataupun kerusakan yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu di satu daerah.	Adanya kekerasan/kerusuhan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepemiluan Adanya kekerasan/kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada Adanya bencana non alam (pandemi covid 19) yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada Adanya Intimidasi Terhadap Peserta Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada Adanya Intimidasi Terhadap Pemilih dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada Adanya perusakan fasilitas penyelenggaran Pemilu
		Otoritas Penyelenggara Pemilu: fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara pemilu merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.	Adanya putusan DKPP yang ditujukan kepada Jajaran KPU dan/atau Bawaslu Adanya Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara
		Otoritas Penyelenggara Negara: fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara negara di daerah (kepala daerah dan pimpinan daerah lainnya) merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI Adanya penyalahgunaan anggaran Pemilu/Pilkada Adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Kepala Daerah Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari pemerintah lokal atau tokoh masyarakat

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator
2	Penyelenggaraan Pemilu	Hak Memilih: fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran atau malpraktek atau manipulasi yang terkait dengan penggunaan hak memilih warga negara	Adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap Adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap Adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik) Adanya penggelembungan jumlah data pemilih Adanya Pemilih Pindah Memilih (DPTB) yang Tidak Dapat Memberikan Hak Suaranya
		Pelaksanaan Kampanye: fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa pelaksanaan kampanye yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan adanya gangguan terhadap proses kampanye	Adanya ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon Adanya kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai dengan ketentuan Adanya penyelenggara Pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan dalam tahapan kampanye Adanya penyelenggara Pemilu yang melakukan pengabaian terhadap protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye
		Pelaksanaan Pemungutan Suara: fenomena atau peristiwa atau kejadian dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan gangguan terhadap proses pemungutan suara yang berlangsung.	Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Ada keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar Adanya informasi tidak terdapat TPS untuk menfasilitasi pemungutan suara bagi pemilih di LAPAS/RS/SEKOLAH DINAS/ Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada Adanya Pemungutan suara susulan di Pemilu/Pilkada Adanya saran perbaikan (catatan khusus) dari pengawas saat pemungutan suara Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator
3	Penyelenggaraan Pemilu	Ajudikasi dan keberatan: fenomena atau kejadian atau peristiwa yang terkait dengan adanya gugatan dan keberatan serta sengketa atas hasil pemilu	Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada
		Pengawasan Pemilu: menunjukkan ada atau tidak adanya pengawas pemilu di tingkat TPS dan tingkat kelurahan.	Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada
		Hak Dipilih: fenomena atau peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya penolakan terhadap kandidat/peserta pemilu atas dasar gender, etnis, suku, agama atau ras yang mengakibatkan potensi kerawanan sosial di masyarakat.	Adanya TPS yang tidak dihadiri oleh Pengawas TPS pada Pemilu/Pilkada
			Adanya Informasi ketiadaan Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa
3	Kontestasi	Kampanye Calon: fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa kampanye yang menunjukkan adanya informasi ataupun materi kampanye yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat serta juga dapat berpotensi melanggar aturan berkampanye yang sudah ditetapkan.	Adanya Penolakan terhadap calon perempuan di Pemilu/Pilkada
			Adanya Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, Suku, dan Agama tertentu di Pemilu/Pilkada
			Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan di Pemilu dan Pilkada
			Adanya informasi kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu
			Adanya iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu
			Adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum
			Adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di sosial media akun lokal (Grup WA / Facebook)
			Adanya materi kampanye Hoax di tempat umum
			Adanya materi kampanye Hoax di sosial media (Grup WA / Facebook)
			Adanya materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum
			Adanya materi kampanye ujaran kebencian di sosial media (Grup WA / Facebook)

			<p>Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada</p> <p>Adanya konflik antar pendukung peserta pemilu/pasangan calon</p> <p>Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu</p> <p>Adanya peserta pemilu/calon yang tidak melaporkan dana kampanye</p>
4	Partisipasi	Partisipasi Pemilih: fenomena, kejadian ataupun peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang menghalangi atau menghambat pemilih dalam memberikan suara di TPS. Mobilisasi yang ditunjukkan tentu berdampak terhadap kepentingan peserta pemilu dan menciptakan ketidakadilan dalam pemungutan suara.	<p>Adanya upaya untuk menghalangi Pemilih memberikan suara di TPS</p> <p>Adanya mobilisasi tambahan secara mendadak</p> <p>Adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2%</p>
		Partisipasi Kelompok Masyarakat: fenomena atau peristiwa yang menunjukkan adanya pemantau yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain	<p>Adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu</p> <p>Adanya Informasi tentang ketidaaan pemantau Pemilu</p> <p>Adanya mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan pemilu/pilkada dari kelompok masyarakat</p>

D. Metode

Bagian ini akan menjelaskan metode dan konstruksi IKP. Secara umum metode konstruksi indeks ini meliputi pengembangan kerangka teoretik dengan melibatkan sejumlah ahli yang outputnya adalah perumusan dimensi, sub-dimensi dan indikator; pengumpulan data yang menjelaskan jenis data, sumber data dan prosedur pengumpulan data; dan Analisa data yang menjelaskan prosedur statistik yang dilakukan setelah data didapatkan hingga menghasilkan IKP akhir. Karena penjelasan teoretik telah dijelaskan di bagian kerangka teori, maka bagian ini hanya akan fokus pada proses pengumpulan dan analisa data.

D.1 Pengumpulan Data

Secara umum, data yang akan dikumpulkan dalam IKP 2024 ini terdiri dari dua kategori besar yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Kedua jenis data tersebut nanti akan dilakukan analisa secara terpisah untuk melihat temuan penting dan tren berdasarkan kategori tersebut. Setiap pengumpulan data (enumerator) perlu mengisi, menyatakan serta dapat membuktikan bahwa data dan informasi yang diisikan tersebut adalah tepat dan valid untuk dapat dibuktikan keakuratannya. Adapun enumerator yang bertanggung jawab dalam pengisian instrumen data yang harus diisikan ini adalah para komisioner di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya tugas pengumpulan data di daerah masing-masing merupakan sepenuhnya tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian secara hirarki kelembagaan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Bawaslu Provinsi bertugas untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengisian instrumen pengumpulan data di setiap kabupaten/kota yang di bawahnya. Sementara, Bawaslu Kabupaten/Kota harus melaporkan hasil pengisian dan pengumpulan data yang sudah dilakukan kepada Bawaslu Provinsi. Sehingga Bawaslu RI secara keseluruhan bertanggung jawab dalam mengumpulkan data dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota secara terpisah.

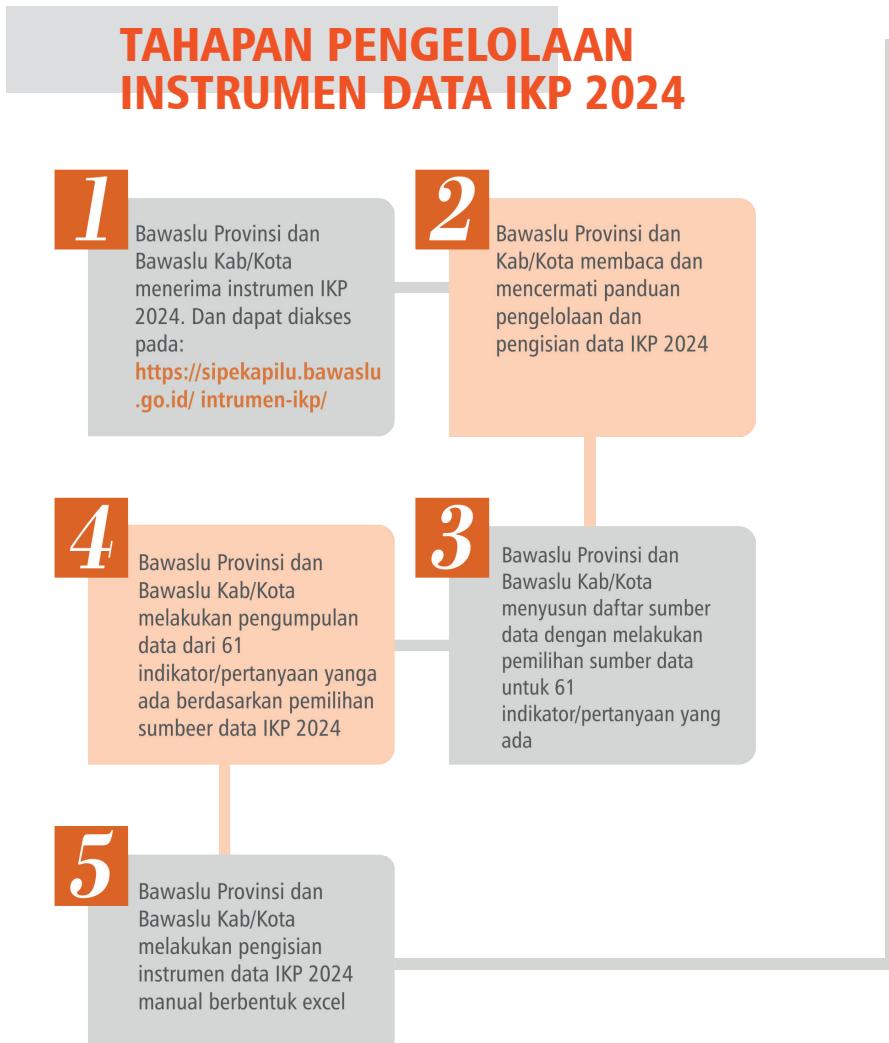
Di samping itu, data yang harus dikumpulkan oleh setiap enumerator merupakan data yang tersedia dan berasal dari pengalaman pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Sehingga peristiwa, kejadian ataupun bukti putusan dari pelaksanaan pemilu dan pilkada sepanjang tahun tersebut adalah rujukan utama dalam memproyeksikan potensi kerawanan

yang akan terjadi dalam Pemilu 2024 mendatang di daerah tersebut. Data yang dikumpulkan tersebut harus mampu menjawab beberapa kebutuhan dasar yaitu tingkat keseriusan/penting kejadian, frekuensi kejadian, serta pembuktian berdasarkan penjelasan deskriptif dan bukti yang dapat dilampirkan.

*Secara teknis,
Bawaslu RI telah menyiapkan
dua skema
dalam pengumpulan data
yaitu secara manual
dengan menggunakan
form excel
yang harus diisi dan
secara online berbasiskan
google form yang dapat
disertakan bukti kejadian
yang relevan dalam lampiran
di instrumen tersebut.*

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1: Tahapan Pengelolaan Instrumen Data IKP 2024



6

- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota melaporkan instrumen data IKP 2024 manual berbentuk excel kepada Bawaslu Provinsi
- Bawaslu Provinsi melakukan pengecekan terhadap instrumen data IKP 2024 manual berbentuk excel yang diisi oleh Bawaslu Kab/Kota.

7

Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota memastikan kembali instrumen data IKP manual berbentuk excel telah terisi semua dengan baik dan benar sesuai panduan

9

Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota melakukan pengisian instrumen IKP 2024 online berbentuk google form berdasarkan instrumen manual berbentuk excel

8

Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota melakukan pengisian instrumen IKP 2024 online berbentuk google form berdasarkan instrumen manual berbentuk excel

10

Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota menyimpan instrumen data IKP 2024 manual berbentuk excel dan bukti-bukti pendukungnya

Sumber: Buku Panduan Pengelolaan dan Pengisian Instrumen IKP 2024,
Bawaslu RI 2022

D.2 Analisa data

Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengecekan data. Pengecek data ini diperlukan untuk melihat apakah ada kesalahan dalam input data yang bisa merusak Analisa data nantinya. Setelah data dibersihkan, maka data mulai dianalisa dan indeks mulai disusun dari data. Proses penyusunan indeks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, untuk setiap indikator, kami membobot jumlah/frekwensi kejadian dengan tingkat keseriusan kejadian tersebut. Sebagaimana disinggung di atas, IKP kali ini menggunakan skema coding yang berbeda dari IKP-IKP sebelumnya. Jika IKP sebelumnya hanya menggunakan tingkat pengukuran nominal-biner (ya/tidak) untuk setiap indikator, maka IKP kali ini menggunakan dua jenis tingkat pengukuran (levels of measurement), yakni kategorikal (nominal/ordinal) dan numerical. Level kategorikal nominal digunakan untuk menjawab pertanyaan, "Apakah kejadian berikut teramat oleh anda selama periode pemilu/pilkada terakhir:[KEJADIAN]?" opsi jawaban yang disediakan bagi enumerator adalah "Ya/Tidak". Jika enumerator menjawab "Ya", maka masuk ke tahap berikutnya yakni menentukan apakah kejadian yang diamati memiliki tingkat keseriusan ringan, sedang atau berat/tinggi. Dalam hal ini kasus dibagi ke dalam kategori ordinal. Terakhir, para enumerator diminta untuk mengidentifikasi jumlah kasus untuk masing-masing kategori tersebut. Tingkat pengukuran yang dilakukan adalah numerik diskrit.

Dalam melakukan pembobotan ini, kami memberikan bobot (nilai penimbang) 1 untuk kasus berkategori ringan, bobot 1.5 untuk kasus berkategori sedang, dan bobot 2 untuk kasus berkategori berat. Kami tidak menggunakan bobot 0.25, 0.35, dan 0.40 untuk mencegah agar jumlah tertimbang tidak terlalu kecil (mendekati nol). Ini dikarenakan banyak frekwensi kejadian yang jumlahnya sangat kecil. Setelah masing-masing kategori dibobot, maka bobot dikalikan dengan frekwensi/jumlah kejadian untuk mendapatkan total frekwensi/kejadian:

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^n w_k \times f_k, \text{ di mana } k = \{\text{rendah}, \text{sedang}, \text{berat}\}$$

Di mana X_{ij} mengacu pada skor untuk indikator ke- i dan daerah ke- j . W mengacu pada bobot/penimbang. f mengacu pada frekwensi. Dan indeks k mengacu pada tingkat keseriusan masalah.

Kedua, setiap indikator dinormalisasi agar memiliki kisaran sebaran yang sama sehingga dapat diagregasi. Namun, sebelum menormalisasi data, kami memeriksa sebaran data secara umum untuk melihat apakah ada outliers pada data. Secara data/skor indikator tidak tersebar secara normal dan memiliki kemiringan ke kanan (*right skewed*). Karena itu, kami men-transformasi data terlebih dahulu menjadi skala logarithmic, baru kemudian menormalisasi data dengan formula minimax berikut: Proses normalisasi data dilakukan dengan metode min-max, yang dihitung dengan formula berikut:

$$\Phi_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_j(x_i)}{\max_j(x_i) - \min_j(x_i)}$$

Di mana Φ_{ij} mengacu pada nilai skor untuk indikator ke-*i* pada daerah ke-*j* yang telah dinormalisasi. x_{ij} mengacu pada skor mentah untuk indikator *i* pada daerah *j*. $\min_j(x_i)$ mengacu pada nilai minimum untuk indikator *i* untuk semua observasi daerah. Sementara, $\max_j(x_i)$ mengacu pada nilai maximum untuk indikator *i* untuk semua observasi daerah. Skor untuk masing-masing indikator yang telah dinormalisasi ini akan berkisar antara 0 dan 1. Jika dikalikan dengan 100, maka skor akan berkisar antara 0-100.

Setelah skor untuk setiap indikator disamakan dengan normalisasi, tahap selanjutnya (tahap ke-3) adalah memberikan bobot untuk masing-masing indikator. Pembobotan ini dilakukan dengan menggunakan pendapat ahli. Para ahli diminta untuk mengevaluasi seberapa penting atau tidak penting suatu indikator bagi indeks secara keseluruhan. Penilaian para ahli ini dipilih karena para ahli memiliki pemahaman yang detil dan mendalam terhadap persoalan kepemiluan. Di samping itu, para ahli yang diminta adalah mereka yang memiliki pengalaman pada IKP-IKP sebelumnya sehingga bisa memberikan evaluasi dan penilaian terhadap IKP sebelumnya sebagai masukan pada IKP kali ini. Dalam proses pembobotan ini, para ahli diminta untuk memberikan skor 1-4 terhadap setiap indikator di mana nilai 1 berarti sangat tidak penting dan 4 sangat penting. Skor yang diberikan para ahli kemudian dijumlahkan untuk masing-masing indikator:

$$skor_i = \sum_{l=1}^n v_l$$

di mana $skor_i$ adalah skor total dari semua ahli untuk indikator ke- i , v_l adalah skor yang diberikan oleh ahli ke- l .

Selanjutnya total skor yang diberikan seluruh ahli untuk masing-masing indikator akan dipropsorsikan dengan skor total untuk keseluruhan indeks dengan formula berikut:

$$\psi_i = \frac{skor_i}{\sum_{i=1}^n skor_i}$$

Di mana $skor_i$ adalah skor total (nilai absolut) untuk indikator ke- i , dan ψ_i adalah bobot atau penimbang untuk indikator ke- i . Detil hasil pembobotan masing-masing indikator bisa dilihat pada table 1 di atas.

Terakhir, bobot untuk setiap indikator ini dijumlahkan untuk mendapatkan bobot total per dimensi:

$$\omega_p = \sum_{i=1}^p \psi_i$$

Di mana ω_p adalah bobot untuk dimensi ke- p .

Setelah pembobotan untuk masing-masing indikator didapatkan, tahap selanjutnya adalah menghitung skor indikator dan menjumlahkannya untuk mendapatkan skor dimensi.

$$D_p = \sum_{i=1}^n \Phi(x_{ij})$$

Di mana $\Phi(x_{ij})$ mengacu pada nilai indikator ke- i untuk daerah ke- j yang sudah dinormalisasi. Untuk mengurangi outliers, kami melakukan winsorisasi, yakni men-transformasi nilai-nilai indikator yang kurang dari nilai persentil ke-10 menjadi sama dengan nilai pada persentil ke-10. Setelah winsorisasi dilakukan, sebaran data Kembali diperiksa dan karena sebaran masih tidak normal (*right-skewed*), maka transformasi logarithmic kembali dilakukan. Terakhir, karena transformasi logarithmic menghasilkan kisaran nilai yang tidak sama antar dimensi, maka normalisasi pada dimensi Kembali dilakukan. Dengan demikian, kisaran nilai dari ke-empat dimensi menjadi sama.

Tahap terakhir dari proses penyusunan indeks ini adalah membobot dimensi dan menjumlahkannya untuk mendapatkan indeks kerawanan masing-masing daerah.

$$IKP_j = \sum_{p=1}^n \omega_p \times D_p$$

Di mana ω_p adalah bobot untuk dimensi ke- p dan D_p adalah skor IKP dimensi ke- p .

Pembobotan dilakukan pada level dimensi, bukan indikator, agar nilai indikator tidak terlalu kecil.

Setelah skor IKP untuk seluruh wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) didapatkan, maka skor ini dikategorisasi untuk menentukan mana wilayah yang tergolong rawan rendah, rawan sedang dan rawan tinggi. Untuk membuat kategorisasi ini, kami menghitung rerata dan simpangan baku dari skor IKP ini dan membuat keputusan kategorisasi sebagai berikut:

Kategori rendah adalah wilayah dengan skor IKP di bawah satu simpangan baku dari rerata nasional IKP.

Kategori sedang adalah wilayah dengan skor IKP yang berada antara satu simpangan baku di bawah rerata nasional dan satu simpangan baku di atas rerata nasional.

Kategori tinggi adalah wilayah dengan skor IKP di atas satu simpangan baku dari rerata IKP nasional

Keputusan menggunakan nilai satu simpangan baku dikarenakan nilai simpangan baku IKP relative sangat besar sehingga jika menggunakan cut-off 2 kali simpangan baku (atau tepatnya 1.96 menurut asumsi sebaran normal) akan membuat kita overestimate kategori sedang dan underestimate kategori rendah dan tinggi.

E. Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan IKP 2024 sebagai berikut:

Tabel 2: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan IKP 2024

No	Nama Kegiatan/Tahapan	Waktu
1	Diskusi Kelompok Terpumpun: Review dan Evaluasi Potret isu-isu strategis IKP dalam rangka pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024	25-26 Februari 2022
2	Diskusi Kelompok Terpumpun: Desain Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai Mitigasi Risiko Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024	14-16 Agustus 2022
3	Diskusi Kelompok Terpumpun: Redesain Konstruksi IKP: Penentuan Dimensi Temporal, Unit Analisa dan Tingkat Pengukuran	4-6 September 2022
4	Diskusi Kelompok Terpumpun: Penyusunan variabel-variabel dalam konstruksi indeks kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan serentak 2024	17-19 September 2022
5	Diskusi Kelompok Terpumpun: Pembobotan variabel-variabel dalam konstruksi IKP Pemilu dan Pemilihan serentak 2024: penentuan bobot dimensi, subdimensi dan indikator	28-30 September 2022
6	Konsinyering Penyusunan instrumen pengumpulan data IKP 2024: penentuan coding scheme	6-8 Oktober 2022
7	Kick off pengumpulan data IKP dalam rangka pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024	18-20 Oktober 2022
8	Pengumpulan Data	19 Oktober – 26 November 2022
9	Analisa Data dan Pembuatan Laporan	26 November – 14 Desember 2022
10	Launching IKP 2024	15. Desember 2022

F. Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab 1 PENDAHULUAN

yang mendeskripsikan tentang latar belakang kegiatan, tujuan dan signifikansi kegiatan, definisi dan operasionalisasi konsep yang menjadi kerangka dari IKP. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan terkait metode yang dipilih dan tahapan pelaksanaan dari IKP serta ditutup dengan sistematika laporan.

Bab 2 SEJARAH PERJALANAN INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)

akan menceritakan terkait dengan bagaimana pembentukan IKP sebagai instrumen penting bagi Bawaslu RI dalam melakukan tugas pengawasan dan pencegahan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Di dalam bab ini akan dimulai dari cerita awal di tahun 2015 dan berlanjut terkait perubahan-perubahan apa saja yang pernah terjadi dalam IKP.

Bab 3 DATA DAN TEMUAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

akan memfokuskan bagaimana hasil dan temuan yang dapat dipotret dalam pelaksanaan IKP 2024 ini. Adapun fokus pembicaraan adalah menyangkut temuan penting di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. Selain itu arah diskusi dalam IKP 2024 juga akan dilihat per dimensi yaitu konteks sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.

Bab 4 ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI

akan membicarakan terkait dengan analisa data dan temuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman pemilu 2017 hingga tahun 2020 yang lalu. Analisa dibedakan berdasarkan level provinsi dan kabupaten kota. Bab ini akan ditutup dengan langkah antisipasi dan kebijakan yang akan diambil oleh Bawaslu RI menyikapi temuan IKP tersebut.

Bab 5 PENUTUP

akan menceritakan beberapa kesimpulan utama dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu RI.





Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu

AYO AWASI & LAPORKAN
PILANGARAN PEMILU
MELALUI

1. Pengawas Pemilu terdekat
2. WhatsApp 08114141414
3. Aplikasi GOWASLU

BERIKUT DAFTAR PENYELIDIK DAN PENGETAHUAN



BAWASLU





BAB

SEJARAH PERJALANAN INDEKS KERAWANAN PEMILU



BAB 2

SEJARAH PERJALANAN INDEKS KERAWANAN PEMILU

Dalam menjalankan salah satu peran dan fungsi sebagai pusat pengkajian dan analisis kepemiluan di Indonesia, sejak Pemilu Legislatif tahun 2014, Bawaslu RI secara berkelanjutan mengerjakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sebagai sebuah instrumen penting dalam memberikan bahan analisa untuk memetakan potensi gangguan penyelenggaraan pemilu, IKP bertujuan menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan. Di samping itu, IKP juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemetaan kerawanan pemilu. Terakhir, IKP menjadi rujukan dalam pembentukan program dan strategi pengawasan Pemilu.

Bawaslu RI dalam menyusun IKP ini juga membutuhkan tim ahli di bidang kepemiluan untuk memperjelas dan menjaga substansi dan metode penelitian sehingga produk IKP menjadi fungsional dan dapat diakses publik serta para pemangku kepentingan lainnya. Sehingga kepercayaan publik terhadap potret yang berasal dari IKP merupakan cerminan dari bagaimana Bawaslu RI memiliki komitmen juga dalam menjaga pelaksanaan pemilu Indonesia yang demokratis.

Bawaslu RI menyadari bahwa proses pembuatan dan penyusunan IKP ini tidaklah berdiri sendiri. Bawaslu RI membutuhkan bantuan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyempurnakan IKP sebagai bagian yang terpisahkan dalam mendorong Pemilu yang demokratis. Dalam kondisi yang lain, IKP juga memberikan manfaat yang besar bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong para stakeholder di daerah untuk membangun komitmen menjaga pemilu yang demokratis.

A. Titik Awal

Pada awalnya, IKP disusun menjelang Pemilu 2014. Pada saat pertama kali dicanangkan, nama IKP belum terwujud. Kala itu, penyusunannya dalam format pemetaan kerawanan, belum berbentuk indeks sistematis. Pemetaan kerawanan bertujuan untuk menjadi panduan dan informasi dalam menentukan strategi serta mekanisme pengawasan di wilayahnya sesuai dengan status kerawanan suatu daerah. Tujuan lainnya adalah adanya informasi mengenai potensi terjadinya pelanggaran yang ada di wilayahnya masing-masing. Sehingga, laporan pemetaan kerawanan yang dimaksud sebagai bentuk strategi dalam melakukan pengawasan di wilayah.

Di awal IKP ini, definisi kerawanan dinyatakan sebagai skala kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu pada sebuah daerah tertentu. Dimensi yang ditentukan adalah (1) dampak elektoral *popular vote* dengan bobot 60 persen. Dimensi ini merupakan hasil uji mutu terhadap DPT Pilpres. Disebut dengan istilah *popular vote* karena Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menggunakan model satu orang satu suara (*popular vote*). Dengan demikian bobot 1 (satu) suara di daerah satu dengan daerah lain adalah sama. (2) akses pengawasan dengan bobot 20 persen. Akses pengawasan merupakan indikator yang menilai tingkat kesulitan akses dilakukannya pengawasan terhadap sebuah daerah. Akses pengawasan ini dinilai dari kondisi geografis, sarana dan prasarana transportasi, serta akses sinyal telpon selular. Dan (3) potensi politik uang dengan bobot 20 persen. Hal ini menilai tingkat kemungkinan terjadinya politik uang (*money politics*) di sebuah daerah dengan mengukur prosentase kemiskinan di desil 3 penduduk sesuai dengan konsep TPN2K.

Tidak ada subdimensi atau variabel dalam IKP ini. Indikator yang diambil adalah (1) mutu data pemilih, (2) kondisi geografis, (3) Akses Telekomunikasi, (4) Sarana dan Prasarana, dan (5) Prosentase Kemiskinan. Dalam pengumpulan data, Bawaslu melakukan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber resmi misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dimensi potensi politik uang dari kondisi kemiskinan. Untuk menentukan indeks kerawanan, IKP 2014 membagikan pengukuran dengan Sangat Aman (0-1), Aman (1-2), Cukup Rawan (2,1-3), Rawan (3,1-4) dan Sangat Rawan (4,1-5).

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap semua daerah, 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi adalah Jawa Barat (3,8), Jawa Tengah (3,7), DKI Jakarta (3,6), Papua (3,3), Jawa Timur (3,2), Banten (3,2), Lampung (3,0), Nusa Tenggara Barat (3,0), Sumatera Barat (2,9) dan Yogyakarta (2,9).

Tujuan pemetaan kerawanan sebagai indeks muncul pada tahun 2015. Bawaslu menetapkan tujuan pemetaan kerawanan ini untuk (1) Adanya Indeks Kerawanan Pilkada di masing-masing daerah, (2) Memudahkan pembacaan potensi pelanggaran dalam Pilkada, dan (3) Adanya potret potensi pelanggaran dalam Pilkada serta rekomendasi strategis pengawasan dalam Pilkada berdasarkan indeks. Definisi indeks di tahun 2015 ini tidak berbeda dengan definisi pemetaan kerawanan di 2014 yaitu "skala kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu pada sebuah daerah tertentu".

Dalam penyusunan IKP 2015, yang disusun menjelang Pilkada serentak 2015, Bawaslu memfokuskan penilaian pada lima dimensi atau saat itu disebut dengan aspek, yaitu: (i) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu dengan bobot 30 persen, (ii) Politik Uang dengan bobot 20 persen, (iii) Akses Pengawasan dengan bobot 15 persen, (iv) Partisipasi Masyarakat dengan bobot 20 persen, dan (v) Keamanan Daerah dengan bobot 15 persen. Aspek-aspek tersebut diterjemahkan dalam 16 variabel dan 30 indikator.

Variabel dalam IKP 2015 adalah ketersediaan anggaran, netralitas penyelenggara, daftar pemilih tetap, kemudahan akses informasi, angka kemiskinan, APBD Bansos/Iklan Pencitraan, laporan politik uang, kondisi geografis, fasilitas listrik, fasilitas alat komunikasi, akses transportasi, *voters turnout*, relawan terdaftar, pemantau terdaftar, laporan masyarakat ke Bawaslu, intimidasi ke penyelenggara dan kejadian kekerasan pada 2014.

Metode pengambilan data di IKP 2015 diperluas yaitu kualitatif-kuantitatif dengan melaksanakan FGD dengan para pakar, wawancara mendalam, pengambilan data pengawasan dan data penunjang lainnya.

Dalam pengukuran, IKP 2015 tidak berbeda dengan pemetaan kerawanan di 2014. Dengan pengukuran kategori 0 – 1 (sangat aman), 1 – 2 (aman), 1 – 3 (cukup rawan), 1 – 4 (rawan), 1 – 5 (sangat rawan); maka hasil IKP 2015 menunjukkan 6 provinsi memiliki IKP tertinggi yaitu: Nusa Tenggara Timur (2,59), Kalimantan Utara (2,74), Maluku (2,74), Papua (2,68), Sumatera Utara (2,66), dan Sulawesi Selatan (2,54).

Tampak dari penilaian kelima aspeknya, IKP 2015 lebih memfokuskan penilaian ke masalah profesionalitas penyelenggara Pemilu. Hal ini menyebabkan beberapa praktik dalam proses kontestasi (persaingan) antar peserta Pemilu menjadi kurang terdedahkan dengan baik. Padahal dalam konteks ini banyak muncul kerawanan, seperti pada ranah pencalonan, mobilisasi birokrasi, kampanye hitam, dan lain sebagainya.

B. Perubahan dalam Instrumen dan Konstruksi IKP

Belajar dari pengalaman tersebut, Bawaslu melakukan sejumlah perbaikan untuk IKP tahun 2017 yang meliputi: (1) merumuskan tujuan dan kegunaan Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada); (2) membuat definisi konseptual dari Kerawanan Pemilu; (3) mengoperasionalisasi konsep yang meliputi penentuan dimensi, variabel, indikator, dan item indikator berupa pertanyaan; (4) melakukan pembobotan ulang setiap variabel dan indikator dilakukan berdasar *expert judgment* para pakar dan tim peneliti dengan menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam menganalisis; serta (5) melakukan perubahan mekanisme pengukuran dan analisis instrumen IKP.

Tujuan dari IKP 2017 juga diperluas menjadi: (1) melakukan pemetaan dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu yang demokratis, (2) mengidentifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu dan (3) sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi, pencegahan dan meminimalisasi kerawanan pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan dari tujuan tersebut, IKP mengalami perubahan definisi menjadi

“segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis”.

Untuk penyempurnaan instrumen IKP 2017, Bawaslu menumpukan perhatian hanya pada tiga dimensi penilaian saja yaitu: (i) Kontestasi, (ii) Partisipasi, dan (iii) Penyelenggaraan. Ketiga dimensi ini diterjemahkan menjadi 10 variabel dan 31 indikator dengan bobot faktor masing-masing dimensi adalah kontestasi 35%, partisipasi 35%, dan penyelenggaraan 30%. Adapun kategori skor IKP 2017 adalah 0 – 1,99 (Kerawanan Rendah); 2,00 – 2,99 (Kerawanan Sedang); 3,00 – 5,00 (Kerawanan Tinggi).

10 variabel dalam IKP 2017 adalah integritas penyelenggara, profesionalitas penyelenggara, kekerasan terhadap penyelenggara, pencalonan, kampanye, kontestan, kekerabatan, hak pilih, karakteristik lokal dan pengawasan/kontrol masyarakat.

Terdapat tujuh provinsi yang melaksanakan Pilkada di tahun 2017 (Aceh, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat) dan secara keseluruhan tingkat kerawanan tingkat Provinsi terbagi dua yaitu Kerawanan Tinggi dan Kerawanan Sedang. Dari hasil skor akhir yang merangkum nilai dari keseluruhan dimensi, terdapat tiga daerah berada di kategori Kerawanan Tinggi adalah: Papua Barat (3,38), Aceh (3,32) dan Banten (3,13). Daerah dengan kategori Kerawanan Sedang secara berurutan adalah: Sulawesi Barat (2,36), Jakarta (2,29), Bangka Belitung (2,29), dan Gorontalo (2,01).

Untuk hasil IKP 2017 tingkat kabupaten/kota menunjukkan ada 4 daerah dengan tingkat Kerawanan Tinggi, yang semua berasal dari Provinsi Papua, secara berurutan daerah tersebut adalah: Tolikara (3.50), Intan Jaya (3.30), Nduga (3.24), dan Lanny Jaya (3.03). Empat puluh kabupaten/ kota berada di kategori Kerawanan Sedang yang dari sebaran wilayahnya didominasi kabupaten/kota di Papua, Aceh, dan Papua Barat. Tetapi, ada juga kabupaten/ kota lain, seperti Takalar (2.88) yang berada di peringkat 7; Kepulauan Mentawai (2.68) di peringkat 8; dan Buton (2.65) di peringkat 9.

Sementara itu, dalam penyusunan IKP 2018 sebagai kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Bawaslu tetap menggunakan tiga dimensi, yakni: (i) Kontestasi, (ii) Partisipasi, dan (iii) Penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu juga mempertahankan variabel dan indikator, komposisi pembobotan, serta penggunaan metode AHP dalam menentukan bobot dimensi.

Tujuan IKP 2018 dilakukan penyempurnaan yaitu (1) Alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan proses pemilu demokratis, (2) Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu dan (3) Sumber data rujukan, informasi dan pengetahuan serta rekomendasi untuk mengambil keputusan. Hal ini terutama untuk langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

IKP 2018 mempertahankan dan menghilangkan beberapa metode dari IKP 2017. Sebagai misal, mempertahankan jumlah variabel, mengurangi indikator (dari 31 indikator menjadi 30 indikator), menghapus indikator yang dinilai kurang relevan (seperti angka kemiskinan dan kondisi budaya patriarki), mengelompokkan ulang beberapa indikator, serta perubahan pertanyaan penelitian untuk mempermudah proses penggalian data dengan berorientasi pada penyajian data sekunder.

Dari 17 provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, terdapat tiga provinsi yang masuk kategori nilai Kerawanan Tinggi, yaitu: Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Empat belas provinsi lain mengindikasikan kategori Kerawanan Sedang, adalah: Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa

Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15). Sebagai catatan, IKP 2018 menemukan bahwa tidak ada satu pun provinsi masuk kategori Kerawanan Rendah dan indeks provinsi di Kerawanan Sedang berada di angka 2,5, bahkan ada tiga provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur) yang berpotensi naik ke kategori Kerawanan Tinggi karena memiliki skor di atas 2,75.

Pemilu tahun 2019 memiliki mekanisme yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, salah satunya adalah keserentakan pelaksanaan pemilihan Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota) dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Sebagai respons, Bawaslu kemudian menyempurnakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019). Melalui sejumlah diskusi panjang dan *Focus Group Discussion* (FGD), maka diperoleh instrumen baru dengan dimensi yang relatif berbeda dengan dimensi-dimensi IKP sebelumnya.

Tujuan IKP 2019 adalah (1) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan, (2) Dasar dalam merumuskan kebijakan, program dan strategi pengawasan Pemilu dan (3) Instrumen deteksi dini (*early warning instrument*) dan pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu.

“Kerawanan” dalam IKP 2019 tetap menggunakan rujukan kata “rawan,” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI daring) berarti, “mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya; gawat.” Secara konseptual IKP 2019 didefinisikan sebagai: “Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.”

Dari definisi tersebut dikembangkan indikator dari 4 dimensi, yaitu: (i) Konteks Sosial-Politik, (ii) Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. IKP 2019 tetap akan menggunakan 3 kategori kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah.

Melalui kategori-kategori tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Intervensi itu mencakup pada titik lemah *election-cycles* di setiap tahap Pemilu sehingga pada akhirnya dapat terpetakan perbaikan dengan cara saksama, teratur, dan solutif. Dengan demikian, kerawanan yang tinggi dan

yang menengah dapat dieleminir, serta kerawanan yang rendah bisa direplikasi melalui indikator yang telah diukur. Jika hal ini berlaku, maka pelaksanaan Pemilu yang bebas, adil, inklusif, dan demokratis dapat terselenggara sesuai harapan dan amanat konstitusi negara Republik Indonesia.

Sasaran informasi IKP 2019 adalah Penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); Pemerintah Pusat maupun Daerah; Lembaga Negara Non-Struktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil.

Dengan menggunakan 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi, IKP 2019 secara khusus dimaksudkan untuk memberi informasi terkait tingkat kerawanan Pemilu yang berguna bagi lembaga Bawaslu sebagai input untuk melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses sesuai dengan ketentuan undang-undang.

IKP 2019 memiliki empat relevansi yang berdimensi strategis. Pertama, relevansi IKP 2019 dalam proses demokrasi adalah pengarusutamaan kerangka kebijakan fungsi dan strategi pengawasan dengan Bawaslu sebagai lembaga inisiator untuk meningkatkan kualitas kerja sama dan koordinasi antara para pemangku kepentingan Pemilu, lembaga pemerintah, dan badan negara independen. Kedua, relevansi IKP 2019 sebagai basis empiris untuk organisasi masyarakat sipil, antara lain perguruan tinggi; lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat sipil; organisasi kepemudaan; organisasi keagamaan; lembaga nirlaba dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam memantapkan keterlibatan pencegahan dan pengurangan tingkat kerawanan Pemilu. Indeks ini diharapkan memberi input kondisi terkini kerawanan Pemilu.

Ketiga, relevansi IKP 2019 terhadap orientasi kebijakan lembaga internasional. Kerangka konseptual IKP 2019 dan analisis terhadap hasil indeks mengacu juga pada konsep keadilan pemilu. Keempat, relevansi strategis terkini dari IKP 2019 adalah momentum menjelang Pemilu 2019 yang mengusung agenda pemetaan potensi kerawanan Pemilu untuk merumuskan strategi pencegahan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.

Dalam IKP 2019, terdapat 15 Provinsi dengan kerawanan diatas rata-rata nasional yaitu Papua Barat (52,83), Papua (49,86), Maluku Utara (49,89), Aceh (50,59), Sulawesi Tenggara (50,86), Sulawesi Selatan (50,26), Maluku (51,02), Lampung (49,56), Sumatera Barat (51,21), Jambi (49,30), Yogyakarta (52,14), Nusa Tenggara Barat (49,59), Nusa Tenggara Timur (50,52), Sulawesi Utara (50,20) dan Sulawesi Tengah (50,50).

Sementara untuk 10 Kabupaten/Kota dengan kerawanan tertinggi dalam IKP 2019 yaitu Lombok Timur (70,02), Teluk Bintuni (66,47), Buton Utara (64,53), Sarolangun (63,71), Mamberamo Raya (63,61), Flores Timur (63,34), Poso (62,15), Dogiyai (61,88), Tana Toraja (61,61) dan Nias Utara (61,39).

Sementara IKP 2020 disusun dalam beberapa tahapan. Tahapan IKP 2020 meliputi: (1) Tahapan Konstruksi, bertujuan untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pilkada Serentak tahun 2020; (2) Tahapan Instrumentasi, bertujuan untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (*try-out research instrument*), serta menentukan bobot faktor; (3) Tahapan Lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020, dan (4) Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan.

Dalam penyusunan IKP 2020 terbagi dalam 4 dimensi, 15 sub dimensi, 51 sub-sub dimensi dan 162 indikator. IKP Pilkada 2020 menyasar kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menghelat Pilkada Serentak yaitu berjumlah 261 kabupaten/kota dan 9 provinsi di Indonesia. Analisis IKP 2020 dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasar data yang diperoleh di lapangan.

Konsep yang digunakan adalah *data driven*, yaitu hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada di lapangan bukan berdasar persepsi enumerator atau pun narasumber. Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hierarki dengan kerangka CFA (*Confirmatory Factor Analysis*), yang biasa digunakan untuk menganalisis variabel undimensional dari suatu variabel konstruk pada analisis SEM (*Structural Equation Modeling*).

Tujuan akhir perhitungan IKP 2020 adalah mendapatkan gambaran profil kerawanan Pemilu masing-masing kabupaten/kota dan provinsi pada Pilkada Serentak tahun 2020. Nilai Indeks yang didapatkan ditransformasi

menjadi kategori level tingkatan kerawanan berdasarkan akumulasi skor dimensi, meliputi: Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, dan Level 6. Proses penentuan kategori dilakukan dengan melihat distribusi atau sebaran indeks. Jika sebaran indeks mengikuti distribusi normal, maka akan diambil ukuran berikut sebagai *threshold* indeks.

IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 mencapai skor 51,65. Nilai skor dimensi-dimensi IKP Pilkada 2020 secara berurutan dari yang tertinggi yaitu partisipasi politik dengan skor 64,09, konteks sosial politik (KSP) dengan skor 51,67, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil (PPBA) mencapai 51,00 dan kontestasi sebesar 44,96. Ini artinya, dimensi partisipasi politik memiliki tingkat kerawanan tertinggi karena hampir seluruh indikator kerawannya berpotensi terjadi.

Jumlah Kabupaten/Kota berdasarkan level IKP Pilkada Serentak 2020 meliputi: (1) Level 2 terdiri dari 8 kabupaten kota (3,1%); (2) Level 3 terdiri dari 117 kabupaten/kota (44,8%); (3) Level 4 terdiri dari 88 kabupaten/kota (33,7%); (4) Level 5 terdiri dari 33 kabupaten/kota (12,6%); (5) Level 6 terdiri dari 15 kabupaten kota (5,8%).

Kabupaten/kota dengan skor dan level kerawanan tertinggi secara nasional meliputi: (1) Kabupaten Manokwari dengan skor 80,89/Level 6, (2) Kabupaten Mamuju dengan skor 78,01/Level 6, (3) Kota Makassar dengan skor 74,94/Level 6, (4) Kabupaten Lombok Tengah dengan skor 73,25/Level 6, (5) Kabupaten Kotawaringin Timur dengan skor 72,48/Level 6, (6) Kabupaten Kepulauan Sula dengan skor 71,45/Level 6, (7) Kabupaten Mamuju Tengah dengan skor 71,02/Level 6, (8) Kota Sungai Penuh dengan skor 70,63/Level 6, (9) Kabupaten Minahasa Utara dengan skor 70,62/Level 6, (10) Kabupaten Pasangkayu dengan skor 70,20/Level 6, (11) Kota Tomohon dengan skor 66,89/Level 6, (12) Kota Ternate dengan skor 66,25/Level 6, (13) Kabupaten Serang dengan skor 66,04/Level 6, (14) Kabupaten Kendal dengan skor 65,33/Level 6, (15) Kabupaten Sambas dengan skor 64,53/Level 6.

Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Provinsi 2020 yaitu sembilan (9) provinsi di Indonesia. IKP Pilkada Provinsi 2020 yaitu 73,80. Jauh lebih tinggi dari IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu 51,65. Nilai skor dimensi-dimensi IKP Pilkada Provinsi 2020 secara berurutan dari yang tertinggi yaitu partisipasi politik dengan skor 92,01, konteks sosial politik (KSP) dengan skor 77,72, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil (PPBA) mencapai 70,58

dan kontestasi sebesar 62,01. Ini artinya, dimensi partisipasi politik, konteks sosial politik, dan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil memiliki tingkat kerawanan tinggi karena hampir seluruh indikator kerawannya berpotensi terjadi. Sedangkan dimensi kontestasi sebagian besar indikator kerawannya berpotensi terjadi.

Provinsi dengan skor dan level kerawanan tertinggi secara berurutan meliputi: (1) Sulawesi Utara dengan skor 86,42/Level 6; (2) Sulawesi Tengah dengan skor 81,05/Level 6; (3) Sumatera Barat dengan skor 80,86/Level 6; (4) Jambi dengan skor 73,69/Level 6; (5) Bengkulu dengan skor 72,08/Level 6; (6) Kalimantan Tengah dengan skor 70,08/Level 6; (7) Kalimantan Selatan dengan skor 69,70/Level 6; (8) Kepulauan Riau dengan skor 67,43/Level 6; (9) Kalimantan Utara dengan skor 62,87/Level 5.

Gambar 3: Geneologi Indeks Kerawanan Pemilu



ANWASLU DESA

BAB

DATA DAN TEMUAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA



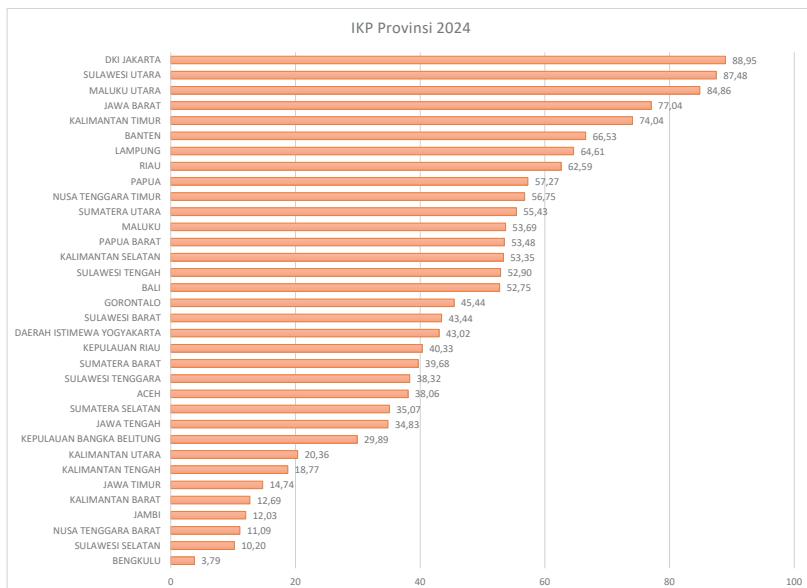
BAB 3

DATA DAN TEMUAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bab ini akan mengelaborasi data dan temuan yang sudah dikumpulkan dan dianalisa. Data ini terdiri dari dua kategori utama yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Ada sebanyak 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang telah berhasil dikumpulkan oleh Bawaslu RI atas bantuan dan kerja keras dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dari data provinsi akan bisa dilihat secara terpisah yaitu data yang berasal dari temuan yang terinput oleh Bawaslu Provinsi itu sendiri, namun ada data agregat yang merupakan kumpulan dari kabupaten/kota yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan. Selain itu, data dan temuan yang ada juga akan dipilah berdasarkan empat dimensi utama dalam IKP yaitu dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Bab ini akan terdiri dari tiga sub bagian yaitu temuan tingkat provinsi, temuan tingkat kabupaten/kota dan temuan berdasarkan dimensi.

A. Temuan Tingkat Provinsi

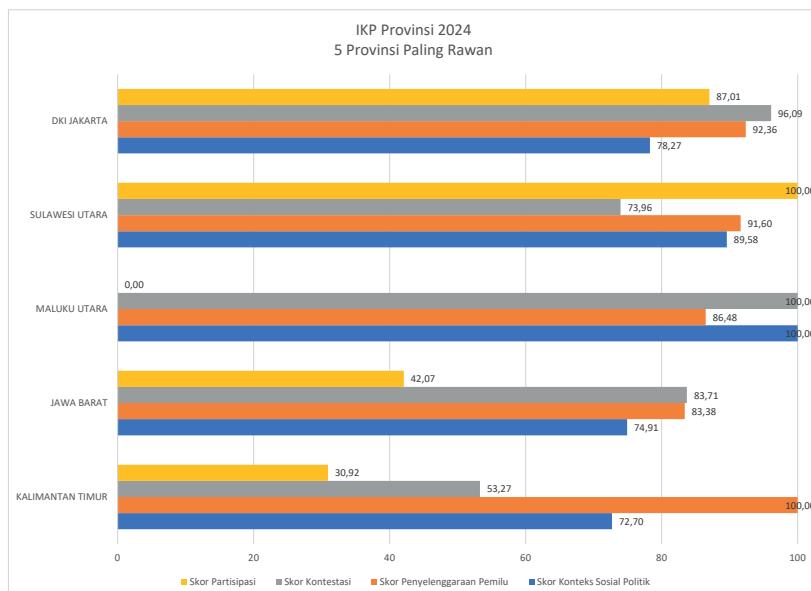
Pada bagian berikut akan dijelaskan beberapa temuan menarik mengenai tingkat kerawanan pada level provinsi. Bagian ini akan mengulas sebaran skor IKP pada setiap provinsi, sebaran skor dimensi dan subdimensi pada setiap provinsi dan analisis mendalam pada lima provinsi paling rawan. Seperti terlihat pada Gambar 4 di bawah ini, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IKP tertinggi, dengan skor total 88.95. Disusul berturut-turut oleh Sulawesi Utara (87.48), Maluku Utara (84.86), Jawa Barat (77.04), dan Kalimantan Timur (74.04). Sementara lima provinsi dengan IKP terendah berturut-turut dari yang paling rendah adalah Bengkulu (3.79), Sulawesi Selatan (10.20), Nusa Tenggara Barat (11.09), Jambi (12.03) dan Kalimantan Barat (12.69). Skor lengkap IKP level provinsi ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Rerata IKP Tingkat Provinsi

Jika kita amati lebih dalam lima (5) provinsi paling rawan, Gambar 5 memperlihatkan bahwa Maluku Utara merupakan provinsi dengan variasi dimensi yang paling tinggi. Maluku Utara mencapai skor maksimal untuk dua dimensi, yakni dimensi sosial politik (100) dan kontestasi (100). Indikator penyumbang utama tingkat kerawanan sosial politik di Maluku Utara adalah adanya kerusuhan berbasis SARA, terganggunya tahapan pemilu karena pandemik, intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, pengrusakan fasilitas penyelenggaraan dan persoalan serius dengan netralitas ASN dan TNI/POLRI. Sementara, untuk dimensi kontestasi, pelanggaran masa kampanye, materi ujaran kebencian dalam kampanye nyata dan dunia maya, konflik antar pendukung dan politik uang merupakan kasus-kasus dengan tingkat keseriusan yang tinggi.

Maluku Utara juga memiliki skor yang relatif tinggi untuk dimensi penyelenggaraan pemilu (86.48), namun memiliki skor 0 untuk dimensi partisipasi. Untuk dimensi penyelenggaraan pemilu, data Bawaslu mencatat banyaknya kasus kehilangan hak pilih dan ketidaklayakan pemilih dalam DPT, ribuan kasus ketidaksesuaian alat kelengkapan pemungutan suara dengan ketentuan, adanya laporan pelanggaran saat pemungutan suara, adanya pemungutan dan penghitungan suara ulang, adanya catatan khusus pengawas, adanya gugatan hasil dan sengketa proses pemilu. Sebaliknya, data Bawaslu tidak menemukan adanya kasus kerawanan partisipasi di level provinsi. Dengan demikian, Maluku Utara merupakan provinsi paling rawan untuk kategori sosial politik dan kontestasi, namun paling aman untuk kategori dinamika partisipasi. Meskipun terdapat beberapa kasus kerusuhan, intimidasi dan gangguan terhadap proses penyelenggaraan pemilu serta kontestasi yang tidak sehat, Bawaslu tidak menemukan adanya penggalangan massa untuk menggagalkan maupun mendeligitimasi proses pemilu.



Gambar 5. Provinsi Rawan Tinggi Berdasarkan Dimensi Kerawanan

Sulawesi Utara juga merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan maksimum untuk salah satu dimensinya, yakni partisipasi. Meskipun kalau kita perhatikan lebih lanjut persoalan pada dimensi ini tidaklah serius—karena hanya berupa satu insiden kecil mobilisasi massa untuk menolak pelaksanaan pemilu dan laporan masyarakat yang tidak ditindaklajuti oleh Bawaslu, namun dibandingkan dengan provinsi lainnya, skor agregat kejadian-kejadian ini relative lebih tinggi. Karena itu, untuk dimensi ini, Sulawesi Utara mendapatkan skor maksimum. Sulawesi Utara juga memiliki persoalan dengan proses penyelenggaraan pemilu. Data memperlihatkan bahwa terdapat sejumlah kasus di mana pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan sejumlah kasus di mana mereka yang tidak layak masuk dalam daftar pemilih tetap. Di samping itu, terdapat beberapa kasus keberpihakan penyelenggara, persoalan dengan logistik pemilu dan sejumlah kasus pelanggaran saat pemungutan suara yang berstatus kasus berat sehingga mengakibatkan sejumlah pemungutan suara ulang. Persoalan-persoalan inilah yang membuat tingkat kerawanan dimensi penyelenggaraan pemilu di provinsi ini tergolong serius.

Meskipun DKI Jakarta tidak memiliki satupun dimensi dengan skor maksimum (100), provinsi ini menjadi provinsi paling rawan karena rerata terbobot dari keempat skor dimensinya paling tinggi. Persoalan pada dimensi kontestasi merupakan penyumbang terbesar bagi tingkat kerawanan pada provinsi DKI Jakarta. Persoalan kampanye dan politik uang mewarnai persoalan kontestasi dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sebagaimana jamak diketahui, beberapa kasus materi kampanye bermuatan SARA, hoax dan kebencian kerap mewarnai kampanye media sosial pada masa-masa pemilu dan pemilihan gubernur. Bawaslu mengkategorikan beberapa kasus ini sebagai kasus dengan tingkat keseriusan tinggi. Di samping itu, terdapat sejumlah kasus *money politics* yang juga terpantau selama periode pemilu/pilgub di DKI Jakarta.

Di samping itu, proses penyelenggaraan pemilu di DKI Jakarta juga diwarnai dengan sejumlah kasus dengan tingkat keseriusan sedang dan tinggi. Kasus-kasus ini terutama muncul di subdimensi pelaksanaan pemungutan suara (adanya komplain saksi, pemungutan dan penghitungan suara ulang, gugatan hasil dan sebagainya). Terakhir, DKI Jakarta juga mengalami persoalan dengan kerawanan partisipasi. Paling tidak terdapat sepuluh insiden/kasus mobilisasi pemilih tambahan dengan tingkat keseriusan rendah yang terpantau oleh Bawaslu. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Sulawesi Utara skor dimensi partisipasi DKI Jakarta lebih rendah. Ini dikarenakan di Sulawesi Utara terdapat kasus mobilisasi massa untuk menolak hasil pemilu sementara di DKI Jakarta ini tidak terjadi.

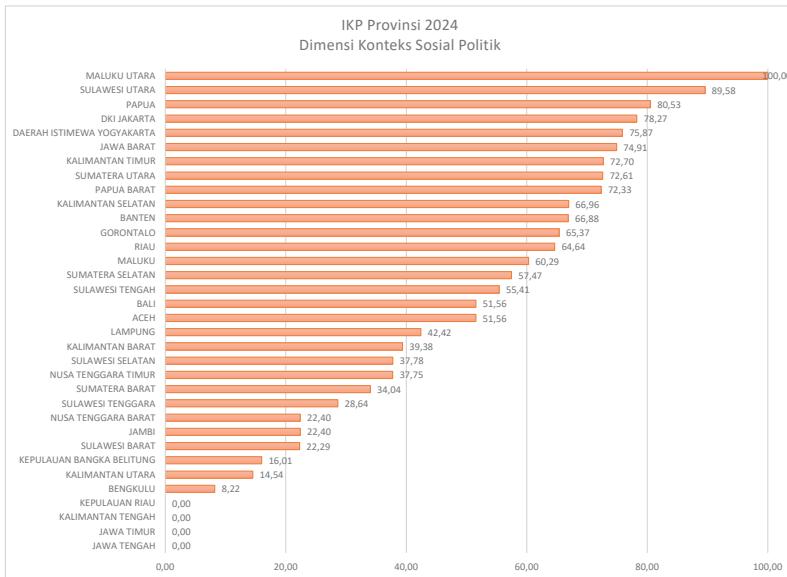
Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat kerawanan dimensi penyelenggaraan pemilu paling tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Provinsi ini mencatatkan ribuan kasus perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan dengan tingkat keseriusan kasus sedang dan tinggi. Di samping itu, terdapat 51 kasus serius terkait dengan keterlambatan logistic pemilu, dan puluhan kasus lainnya yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu, pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, pemungutan suara susulan dan ratusan catatan khusus dari pengawas.

Terakhir, Jawa Barat juga masuk dalam lima provinsi paling rawan dikarenakan dua dimensi, yakni penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Pada dimensi penyelenggaraan pemilu, beberapa kasus yang berhubungan dengan kehilangan hak pilih, pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, logistik pemilu (perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan, perlengkapan/logistik yang terlambat dan tertukar), komplain dalam pemungutan

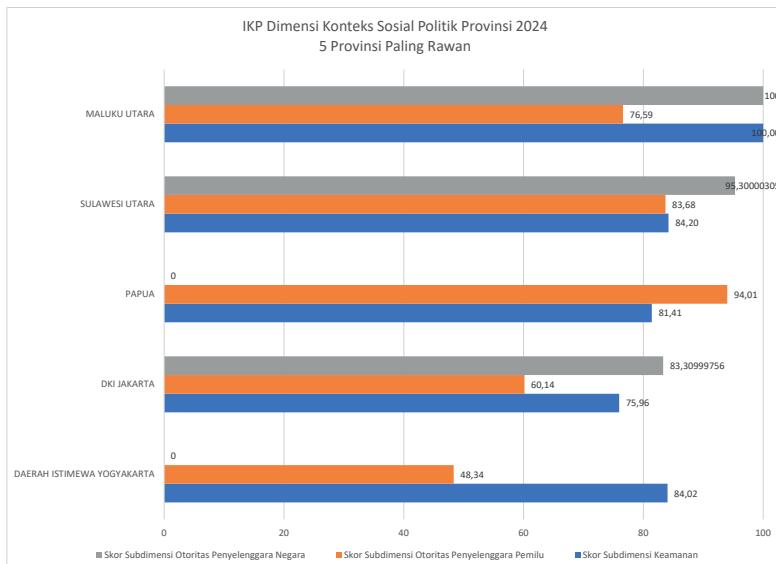
dan penghitungan dan gugatan hasil masih menjadi catatan buruk yang membuat skor dimensi ini cukup tinggi. Sementara itu, kerawanan pada dimensi kontestasi di provinsi ini disumbang terutama sekali oleh adanya Sembilan kasus politik uang dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Di samping itu, juga terdapat sejumlah kasus terkait pelanggaran kampanye seperti kampanye di luar jadwal, kampanye bermuatan sara dan kampanye hoax di media sosial.

Secara lebih detail, Gambar 6 menyajikan skor dimensi sosial politik untuk semua provinsi di Indonesia. Seperti terlihat dalam Gambar 6 berikut, Maluku Utara merupakan provinsi dengan skor dimensi sosial politik paling tinggi. Ini berarti dalam dimensi ini, provinsi Maluku Utara merupakan provinsi paling rawan. Secara berturut-turut lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam dimensi sosial politik adalah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sementara lima provinsi dengan skor dimensi sosial politik terendah secara berturut-turut dari bawah adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kep. Riau dan Bengkulu.

D.I. Yogyakarta masuk dalam lima provinsi dengan IKP dimensi sosial politik tertinggi dikarenakan ada persoalan dengan kondisi keamanan masa pemilu. Data Bawaslu memperlihatkan bahwa adanya beberapa insiden kekerasan berbasis SARA, kekerasan yang melibatkan tokoh publik, adanya intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, dan adanya pengrusakan fasilitas pemilu. Sementara, Papua masuk dalam daerah rawan dikarenakan persoalan terkait otoritas penyelenggara pemilu. Data memperlihatkan adanya beberapa kasus putusan DKPP kepada jajaran KPU/dan atau Bawaslu dan rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi. Di samping itu, pemilu/pemilihan kepala daerah pada level provinsi di Papua ini juga diwarnai dengan adanya kerusuhan yang melibatkan tokoh public/politik/aparat keamanan.

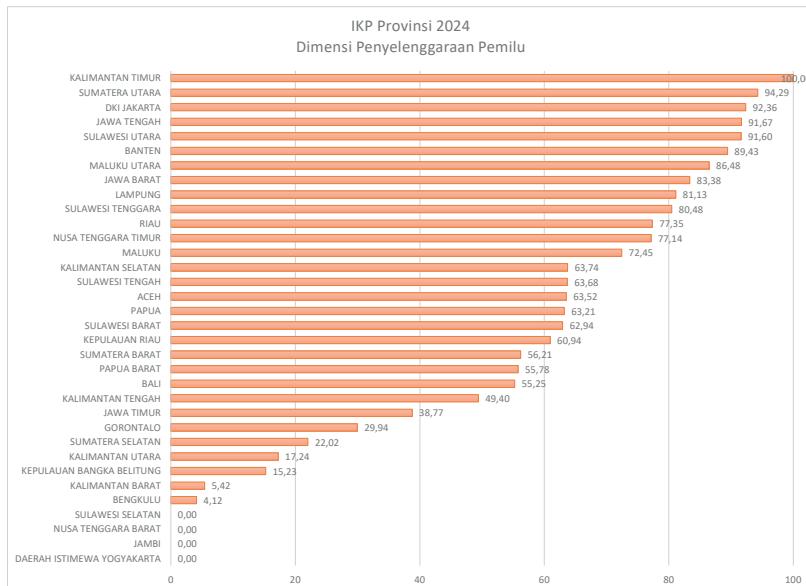


Gambar 6. IKP Provinsi berdasarkan Dimensi Sosial-Politik



Gambar 7. 5 Provinsi Kerawanan Tinggi Dimensi Sosial Politik

Selanjutnya pada dimensi penyelenggaraan pemilu, lima provinsi dengan skor tertinggi berturut-turut adalah Kalimantan Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Sebaliknya lima provinsi dengan skor dimensi terendah secara berturut-turut dari bawah adalah D.I. Yogyakarta, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Bengkulu.

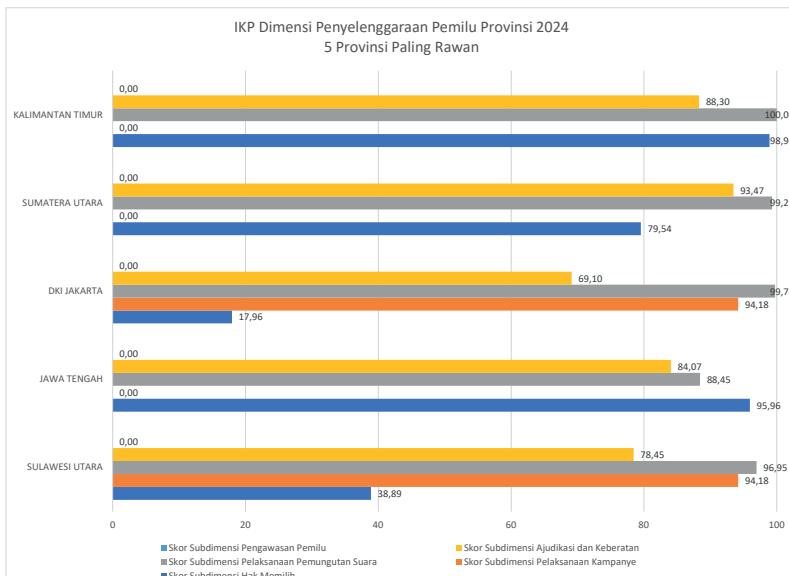


Gambar 8. IPK Provinsi Berdasarkan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu

Sumatera Utara masuk ke dalam lima provinsi paling rawan dalam dimensi penyelenggaraan pemilu dikarenakan provinsi ini untuk dua subdimensi, yakni subdimensi pemungutan dan penghitungan suara dan subdimensi adjudikasi dan keberatan (Gambar 9). Data Bawaslu memperlihatkan bahwa pada pemilihan pada level provinsi ini ditemukan ratusan kasus dengan tingkat keseriusan tinggi terkait dengan tidak sesuaiannya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai, ratusan kasus serius terkait dengan logistik yang terlambat, puluhan kasus serius terkait dengan logistik yang tertukar, puluhan kasus serius terkait pemungutan suara ulang, ratusan kasus serius terkait penghitungan suara ulang, ratusan kasus serius terkait pemungutan suara susulan, dan sejumlah kasus serius terkait dengan catatan khusus pengawas

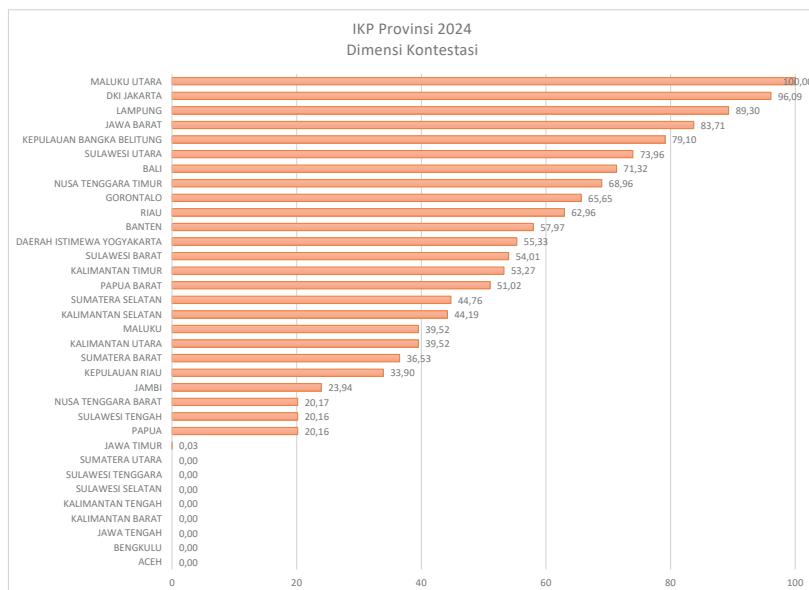
saat pemungutan. Sementara, untuk subdimensi adjudikasi dan keberatan, data Bawaslu memperlihatkan bahwa di Provinsi ini terdapat puluhan kasus berstatus sedang terkait dengan keberatan dan sengketa proses pemilu/pilkada.

Jawa Tengah juga masuk dalam lima provinsi paling rawan dimensi ini juga karena dua subdimensi yang sama dengan Sumatera Utara, yakni subdimensi pemungutan dan penghitungan suara dan subdimensi adjudikasi dan keberatan. Pada subdimensi pemungutan suara, data Bawaslu memperlihatkan adanya puluhan kasus serius terkait dengan pelanggaran pemungutan suara. Sementara, pada subdimensi adjudikasi dan keberatan, data Bawaslu menemukan adanya sepuluh kasus berstatus sedang terkait dengan gugatan hasil pemilu/pilkada.



Gambar 9. 5 Provinsi Paling Rawan dalam Dimensi Penyelenggaraan Pemilu

Gambar 10 memperlihatkan bahwa Maluku Utara, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, dan Kep. Bangka-Belitung. Sementara, Aceh, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara adalah provinsi-provinsi dengan skor IKP dimensi penyelenggaraan pemilu 0. Artinya, pada delapan provinsi ini tidak ditemukan kasus pelanggaran terkait dimensi kontestasi ini.

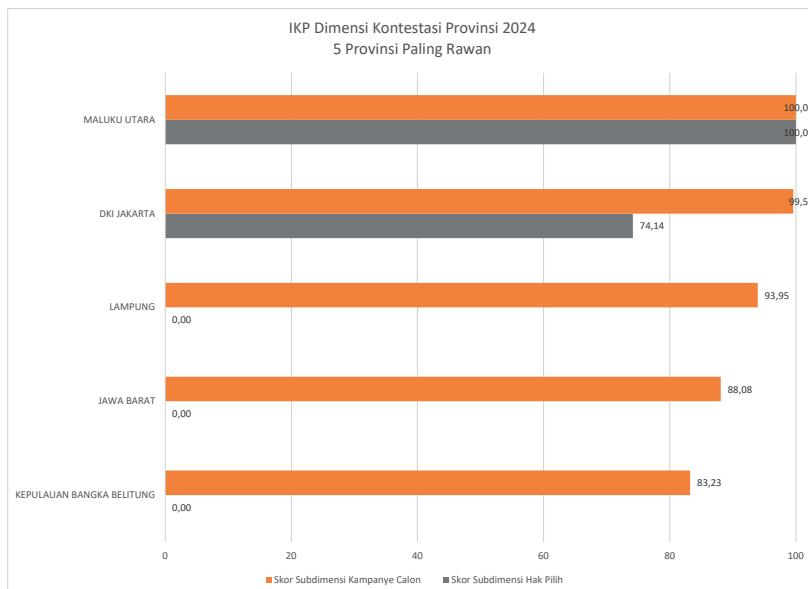


Gambar 10. IKP Provinsi Berdasarkan Dimensi Kontestasi

Gambar 11 mencoba mengelaborasi lebih jauh komponen-komponen penting penyumbang tingginya skor dimensi kontestasi ini. Lampung, Bangka Belitung dan Jawa Barat masuk dalam lima provinsi dengan IKP tertinggi untuk dimensi kontestasi ini dikarenakan beberapa pelanggaran terkait kampanye calon. Seperti terlihat pada Gambar 11 di bawah ini, ketiga provinsi ini bahkan tidak memiliki persoalan sama sekali dengan subdimensi hak dipilih. Lampung memiliki skor subdimensi kampanye calon yang relative tinggi (93,95). Data Bawaslu menunjukkan bahwa terdapat delapan kasus serius pelanggaran jadwal kampanye, ribuan kasus serius kampanye hoax di tempat umum, puluhan ribu kasus serius pelanggaran tempat kampanye, dan sepuluh kasus *money politics*.

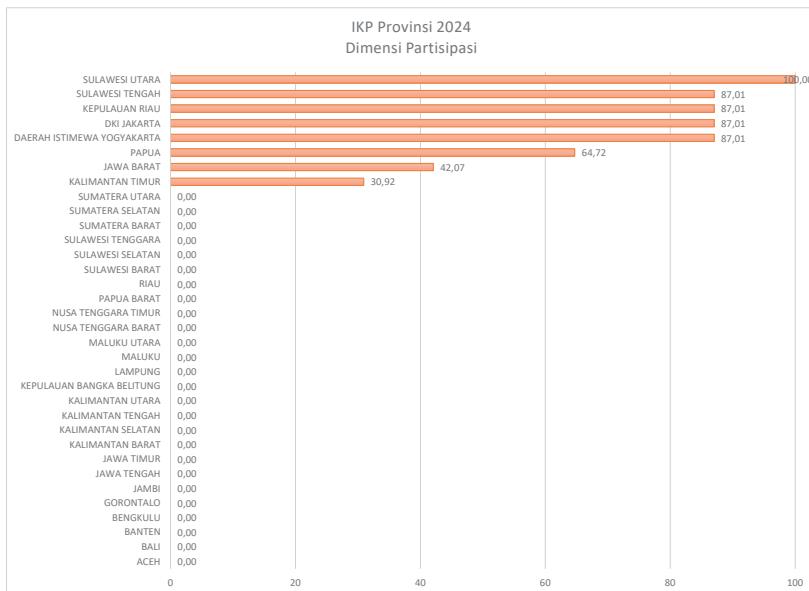
Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki skor kerawanan subdimensi kampanye calon yang relative tinggi dikarenakan adanya sejumlah kasus pelanggaran kasus jadwal kampanye, adanya kampanye hoax di media sosial, ujaran kebencian di tempat umum dan di media sosial, dan pelanggaran politik uang. Namun, semua kasus ini berskala relative rendah. Terakhir, Jawa Barat juga memiliki skor kerawanan subdimensi kampanye calon yang tinggi karena

adanya beberapa kasus pelanggaran jadwal dan lokasi kampanye, kampanye bermuatan hoax dan ujaran kebencian baik di tempat umum maupun di media sosial dan Sembilan kasus serius politik uang.



Gambar 11. 5 Provinsi Paling Rawan Dimensi Kontestasi

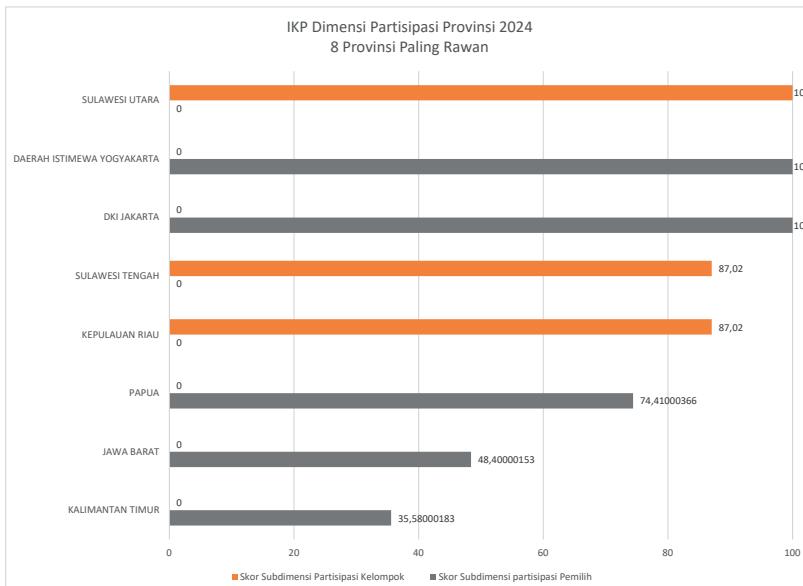
Gambar 12 menyajikan skor kerawanan provinsi untuk dimensi partisipasi. Sebagian besar provinsi memiliki skor 0 untuk dimensi ini. Ini berarti secara umum tidak ada persoalan serius dengan partisipasi baik itu partisipasi pemilih maupun partisipasi kelompok. Secara umum, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan skor kerawanan partisipasi tertinggi di Indonesia. Dilanjutkan dengan empat provinsi yang memiliki skor yang sama, yakni Sulawesi Tengah, Kep. Riau, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Selanjutnya Papua, Jawa Barat dan Kalimantan Timur juga memiliki skor kerawanan yang yang tidak 0. Ini berarti di tiga provinsi terakhir ini sedikit-banyaknya, partisipasi masih menjadi masalah yang harus diselesaikan.



Gambar 12. IKP Provinsi Berdasarkan Dimensi Partisipasi

Gambar 13 menyajikan pola yang menarik untuk diamati. Provinsi-provinsi yang rawan di satu subdimensi partisipasi tidak memiliki masalah sama sekali dengan subdimensi lainnya. Lima provinsi memiliki memiliki persoalan kerawanan pada subdimensi partisipasi kelompok, yakni DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Papua, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Untuk DKI Jakarta, data Bawaslu mencatat sepuluh kasus berstatus rendah terkait dengan mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak. Sementara di Yogyakarta ditemukan sekitar 12 kasus berstatus serius terkait dengan adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2%. Di Papua, hanya ditemukan dua kasus (masing-masing ringan dan tinggi) terkait dengan mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak. Di Jawa Barat, ditemukan satu kasus serius terkait dengan adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2%. Dan di Kalimantan Timur juga ditemukan adanya satu kasus ringan terkait dengan pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2%.

Pada kerawanan subdimensi partisipasi kelompok, Sulawesi Utara tercatat sebagai daerah paling rawan. Di daerah ini, ditemukan adanya satu kasus ringan terkait laporan masyarakat yang tidak ditanggapi oleh pengawas dan satu kasus ringan terkait mobilisasi penolakan pelaksanaan pemilu. Sementara pada Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara, hanya ditemukan satu kasus serius laporan masyarakat terkait ketidadaan pemantau pemilu.

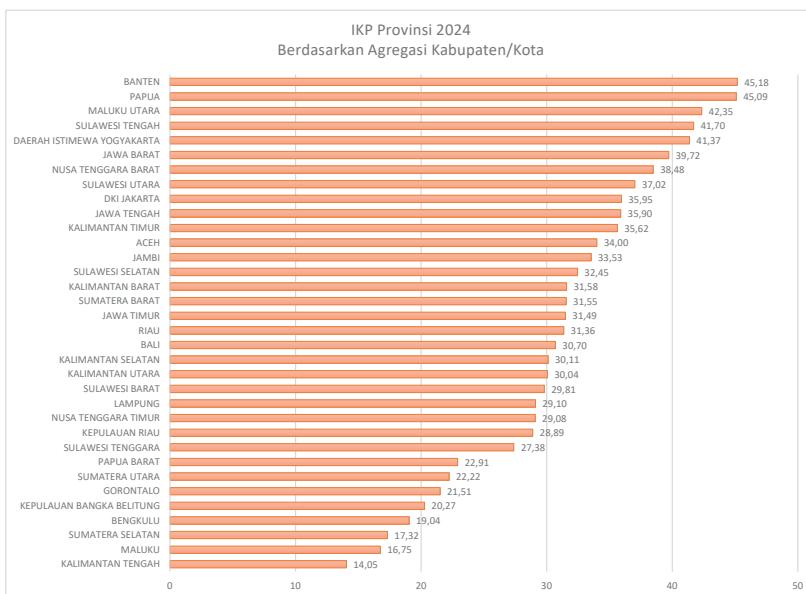


Gambar 13. 8 Provinsi Paling Rawan Dimensi Partisipasi

B. Temuan Tingkat Kabupaten/Kota

Pada bagian ini, kami akan memaparkan temuan-temuan penting IKP pada level kabupaten/kota. Kami akan menjelaskan sebaran skor IKP provinsi berdasarkan agregasi kabupaten/kota, skor IKP 15 kabupaten/kota dengan skor tertinggi, sebaran IKP berdasarkan dimensi dan subdimensi dan analysis 15 kabupaten/kota berdasarkan subdimensi.

Seperti terlihat pada Gambar 14 berikut, berdasarkan agregasi kabupaten/kota, Banten merupakan provinsi dengan rerata skor IKP kabupaten/kota tertinggi di Indonesia. Pada provinsi ini, rerata skor IKP kabupaten/kota adalah 45.18. Selanjutnya berturut-turut Papua (45.06), Maluku Utara (42.35), Sulawesi Tengah (41.70) dan D.I. Yogyakarta (41.37). Sebaliknya provinsi-provinsi dengan IKP agregat kabupaten/kota terendah adalah Kalimantan Tengah, Maluku, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung.

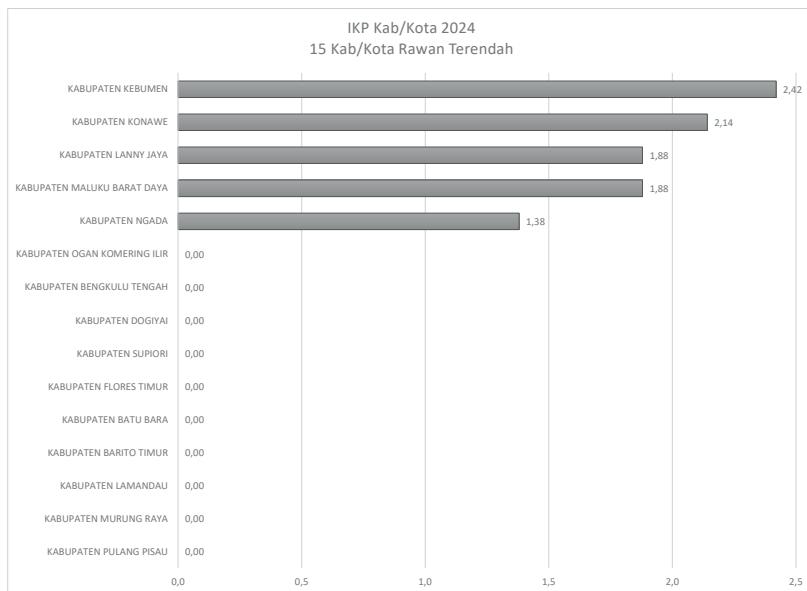


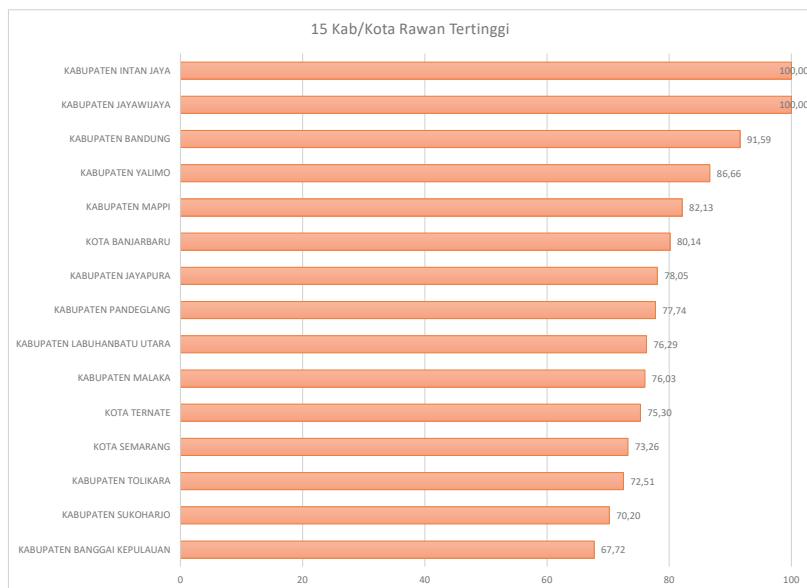
Gambar 14. Rerata IKP Provinsi Berdasarkan Agregasi Kabupaten/Kota

Gambar 15 menyajikan 15 kabupaten/kota paling rawan dan paling aman berdasarkan skor IKP kabupaten/kota. Seperti terlihat pada panel bagian

kanan (Gambar 15), enam dari lima belas kabupaten/kota paling rawan terletak di Papua, yakni Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mappi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Tolikara. Masuk di antara lima belas kabupaten/kota paling rawan ini adalah Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Kabupaten Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Pandeglang (Banten), Kabupaten Labuhanbaru Utara (Sumatera Utara), Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kota Ternate (Maluku Utara), Kota Semarang dan Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah).

Sementara, ada sepuluh kabupaten/kota yang memiliki skor IKP kabupaten/kota nol. Artinya, di wilayah ini tidak ditemukan satu pun kasus pelanggaran yang berpotensi menyumbang kerawanan. Kesepuluh wilayah ini adalah Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Lamandau Kabupaten, Kab. Murung Raya, dan Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), Kabupaten Batu Bara (Sumatera Utara), Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Supiori (Papua), Kabupaten Flores Timur (Nusa Tenggara Timur), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan).





Gambar 15. 15 Daerah Paling Rawan (Rawan Tertinggi)

Gambar 16 berikut mencoba mengelaborasi lebih jauh dimensi-dimensi kerawanan yang berkontribusi bagi tingginya tingkat kerawanan secara umum di sepuluh kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Intan Jaya merupakan dua kabupaten dengan skor maksimum untuk keseluruhan dimensi kerawanan. Pada dimensi sosial-politik, Kabupaten Jayawijaya dan Intan Jaya mencatatkan sejumlah kasus dengan tingkat keseriusan sedang dan tinggi mulai dari kekerasan/kerusuhan berbau SARA, kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan, intimidasi terhadap peserta dan penyelenggara, pengrusakan fasilitas pemilu, rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, dan keberpihakan penyelenggara negara dalam bentuk intimidasi maupun himbauan untuk tidak memilih calon tertentu. Untuk Kab. Intan Jaya, juga terdapat rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara dalam proses pemungutan.

Pada dimensi penyelenggaraan pemungutan suara, di kedua kabupaten terdapat sejumlah kasus serius terkait dengan kehilangan hak pilih, penggelembungan suara, keterlambatan logistik, pelanggaran saat pemungutan suara, pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, pemungutan suara

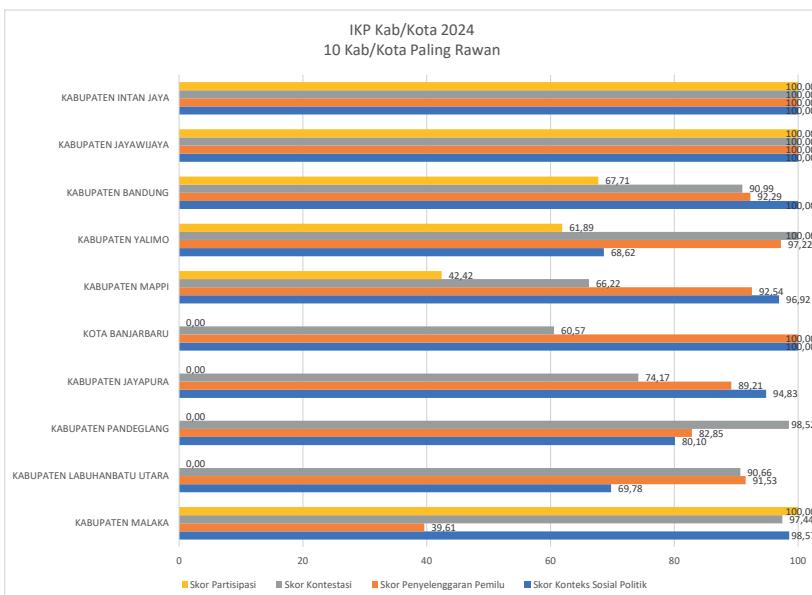
susulan, catatan khusus pengawas saat pemungutan, complain dari saksi saat pemungutan/penghitungan, gugatan terhadap hasil pemilu dan sengketa proses pemilu.

Pada dimensi kontestasi, Kabupaten Intan Jaya juga mencatatkan sejumlah insiden ringan, sedang dan serius terkait penolakan terhadap calon berdasarkan SARA, materi kampanye bermuatan SARA, hoax dan ujaran kebencian terutama di media sosial, konflik antar pendukung, politik uang dan dana kampanye yang tidak jelas. Sementara, di Kab. Jayawijaya, terdapat sejumlah kasus terkait dengan pelanggaran jadwal dan lokasi kampanye, kampanye bermuatan hoax dan ujaran kebencian terutama di media sosial, konflik antar pendukung dan politik uang.

Terakhir, pada dimensi partisipasi kedua kabupaten mencatatkan sejumlah kasus ringan, sedang dan berat terkait dengan upaya menghalangi pemilih untuk memilih di TPS. Di Kab. Jayawijaya juga terdapat sejumlah insiden mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak dan melebihi surat suara cadangan 2%. Di Kab. Intan Jaya, juga ditemukan insiden penolakan pelaksanaan pemilu dari kelompok masyarakat.

Kabupaten Bandung juga tercatat sebagai di antara kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan sangat tinggi, terutama disumbang oleh kerawanan dimensi sosial politik. Untuk dimensi ini, Kabupaten Bandung mendapatkan skor kerawanan yang setara dengan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Jayawijaya, yakni mendapat skor kerawanan tertinggi (100). Di samping itu, Kabupaten Bandung juga mendapatkan skor kerawanan yang sangat tinggi untuk dimensi penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Terakhir, meskipun tidak setinggi tiga dimensi sebelumnya, Kabupaten Bandung juga memiliki tingkat kerawanan yang jauh di atas rata-rata nasional untuk dimensi partisipasi.

Kabupaten Malaka yang terletak di Nusa Tenggara Timur juga masuk dalam 10 kabupaten/kota paling rawan di Indonesia. Seperti terlihat pada Gambar 16, penyumbang utama kerawanan pada kabupaten ini adalah dimensi partisipasi. Untuk dimensi ini, Kabupaten Malaka mendapatkan skor maksimum (100). Kabupaten Malaka juga memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi untuk dua dimensi lainnya, yakni dimensi sosial-politik dan dimensi kontestasi. Namun demikian, Kabupaten Malaka memiliki tingkat kerawanan yang tidak begitu tinggi (di bawah rata-rata nasional) untuk dimensi penyelenggara pemilu.



Gambar 16. 10 Kab/Kota Paling Rawan Dimensi Sosial Politik

Selanjutnya, Kabupaten Mappi yang terletak di Papua (saat ini di Papua Selatan) juga masuk dalam daftar kabupaten/kota dengan skor kerawanan sangat tinggi. Penyumbang utama tingkat kerawanan di wilayah ini adalah dimensi sosial-politik dan dimensi penyelenggaraan pemilu yang keduanya memiliki skor sangat tinggi (di atas 90). Di samping itu, Kabupaten Mappi juga memiliki skor yang jauh di atas rata-rata nasional untuk dimensi kontestasi dan partisipasi.

Kabupaten Jayapura juga masuk dalam 10 daerah paling rawan terutama dikarenakan tingkat kerawanan yang relative sangat tinggi untuk dimensi sosial-politik dan penyelenggaraan pemilu. Kabupaten Jayawijaya juga memiliki tingkat kerawanan tinggi untuk dimensi kontestasi. Namun, untuk dimensi partisipasi wilayah ini tidak memiliki catatan kerawanan sama sekali.

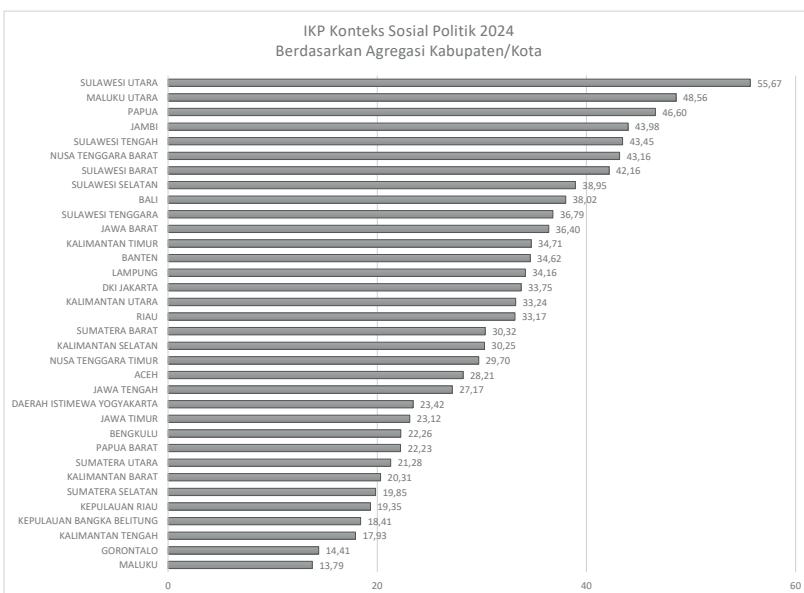
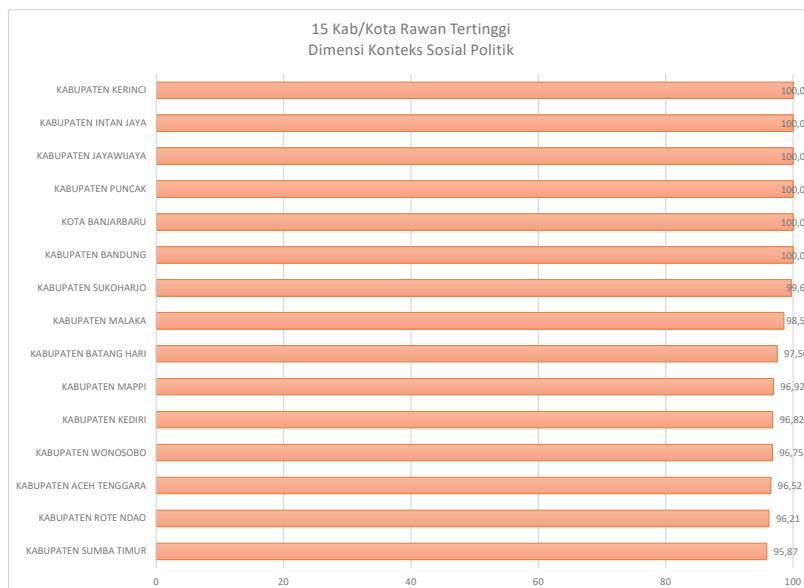
Pandeglang merupakan satu dari tiga kabupaten/kota di Banten yang masuk dalam kategori wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi (dua lagi adalah Kota Serang dan Kabupaten Lebak). Seperti terlihat dalam Gambar 16, dimensi kontestasi menjadi penyumbang terbesar tingkat kerawanan di wilayah ini. Skor kerawanan dimensi kontestasi di Kabupaten Pandeglang adalah 98,52, hampir

mencapai skor maksimum. Skor ini jauh sekali di atas rata-rata nasional yang hanya 26.22. Kab. Pandeglang juga memiliki persoalan serius dengan dimensi penyelenggaraan pemilu dan kondisi sosial politik, yang skor keduanya jauh di atas rata-rata skor nasional kedua dimensi ini. Namun, Pandeglang relative tidak ada persoalan dengan dimensi partisipasi.

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan satu dari dua kabupaten/kota di Sumatera Utara yang masuk dalam tingkat kerawanan tinggi (satu lagi adalah Kabupaten Nias Selatan). Dua dimensi penyumbang tingkat kerawanan di wilayah ini adalah dimensi penyelenggaraan pemilu dan dimensi kontestasi, yang kedua memiliki skor di atas 90 dan tergolong sangat tinggi. Sementara, untuk dimensi sosial politik, Kab. Labuhanbatu Utara juga tergolong tinggi meskipun tidak ekstrim. Terakhir, sama dengan Kab. Jayapura dan Kab. Pandeglang, wilayah ini juga tidak memiliki persoalan dengan dimensi partisipasi.

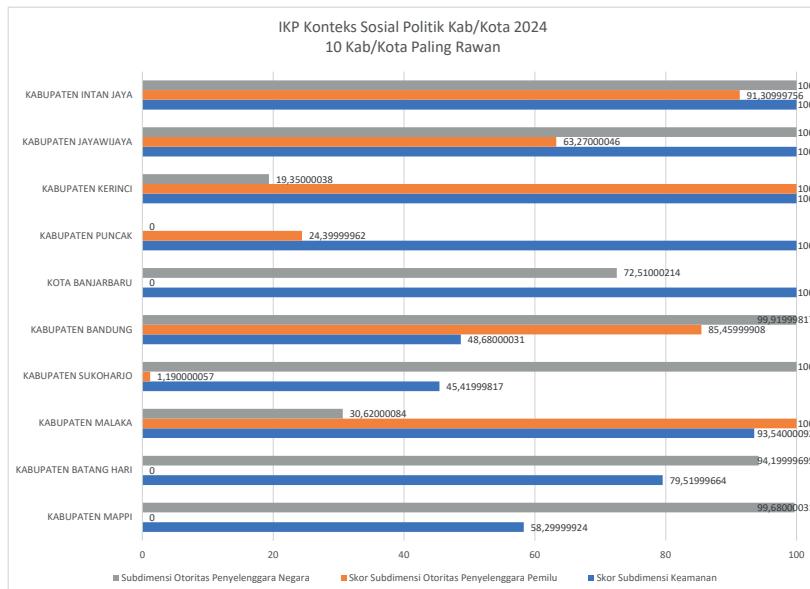
Kabupaten Yalimo di Papua (sekarang di Papua Pegunungan) merupakan daerah keempat paling rawan berdasarkan IKP 2024 ini. Penyumbang terbesar tingkat kerawanan pada daerah ini adalah dimensi kontestasi. Seperti terlihat pada gambar 16, skor kerawanan dimensi kontestasi ini mencapai nilai maksimum untuk Kab. Yalimo, setara dengan Kab. Jayawijaya dan Kab. Intan Jaya. Selanjutnya, tingginya kerawanan di wilayah ini juga disumbang oleh kerawanan dimensi penyelenggaraan pemilu yang juga hampir mencapai nilai maksimum (97.22). Meskipun lebih rendah dari dua dimensi sebelumnya, Kab. Yalimo juga mencatatkan skor kerawanan yang relative tinggi untuk dimensi sosial-politik dan dimensi partisipasi. Untuk kedua dimensi ini (sosial-politik dan partisipasi), Kab. Yalimo juga memiliki skor kerawanan yang jauh melebihi rata-rata nasional untuk dimensi-dimensi tersebut.

Gambar 17 berikut menyajikan sebaran provinsi dan kabupaten/kota dengan skor kerawanan dimensi sosial politik paling tinggi. Seperti terlihat pada panel kiri, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Jambi, dan Sulawesi Tengah merupakan lima provinsi yang paling rawan untuk dimensi sosial politik berdasarkan agregasi skor kabupaten/kota. Skor IKP agregat sosial politik di provinsi-provinsi ini jauh di atas rata-rata nasional, yakni 31.13. Pada panel bagian kanan Fig. 14, terdapat 15 kabupaten/kota yang memiliki skor dimensi sosial politik paling tinggi, yakni Kab. Banjarbaru, Kab. Puncak, Kab. Kerinci, Kab. Jayawijaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Bandung, Kab. Sukoharjo, Kab. Malaka, Kab. Batanghari, Kab. Mappi, Kab. Kediri, Kab. Wonosobo, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Sumba Timur.



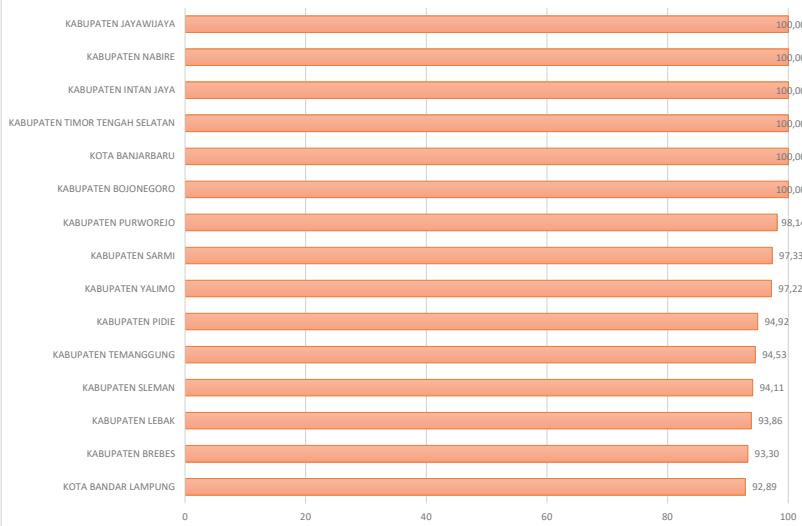
Gambar 17. IKP Sosial Politik Kabupaten/Kota

Gambar 18 mencoba untuk mengelaborasi lebih jauh sepuluh kabupaten/kota paling rawan untuk dimensi sosial politik ini. Untuk subdimensi keamanan, ada lima wilayah dengan tingkat kerawanan maksimum (100), yakni Kota Banjarbaru, Kab. Puncak, Kab. Kerinci, Kab. Jayawijaya, dan Kab. Intan Jaya. Dua kabupaten terakhir ini telah dijelaskan sebelumnya karena ini merupakan dua kabupaten dengan skor IKP tertinggi di Indonesia. Kota Banjarbaru masuk dalam wilayah dengan skor kerawanan maksimum subdimensi keamanan karena di wilayah ini terdapat ratusan kasus bencana alam serius yang menganggu tahapan pemilu/pilkada. Di samping itu, terdapat sejumlah kasus serius terkait intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. Kab. Puncak juga mendapatkan skor maksimum kerawanan subdimensi keamanan karena adanya puluhan kasus serius terkait dengan kekerasan/kerusuhan yang berbasis SARA dan melibatkan tokoh public/politik/aparat keamanan. Lebih jauh, juga terdapat sejumlah kasus serius terkait intimidasi baik terhadap penyelenggara maupun pemilih. Terakhir, Kab. Kerinci (Prov. Jambi) juga mendapat skor maksimum untuk kerawanan subdimensi keamanan karena adanya puluhan kasus dengan tingkat keseriusan sedang terkait dengan kekerasan/kerusuhan yang melibatkan tokoh public dan puluhan kasus serius terkait bencana non-alam (pandemic) yang menganggu tahapan dan puluhan kasus serius terkait intimidasi terhadap peserta pemilu.

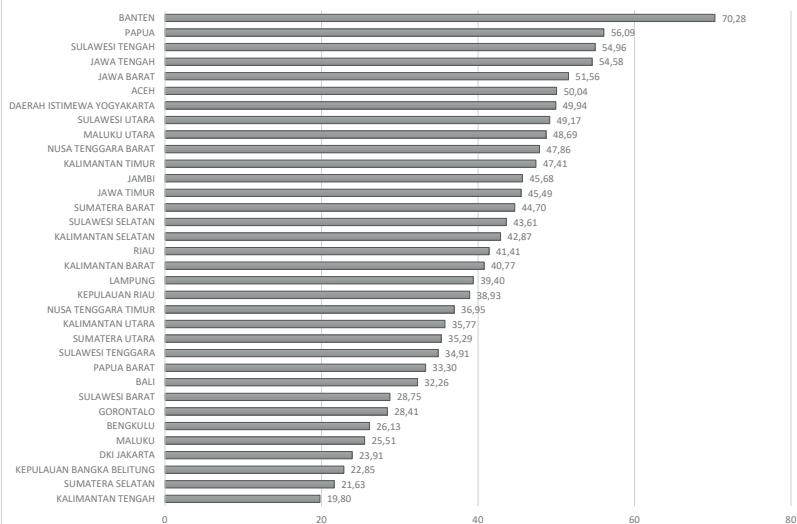


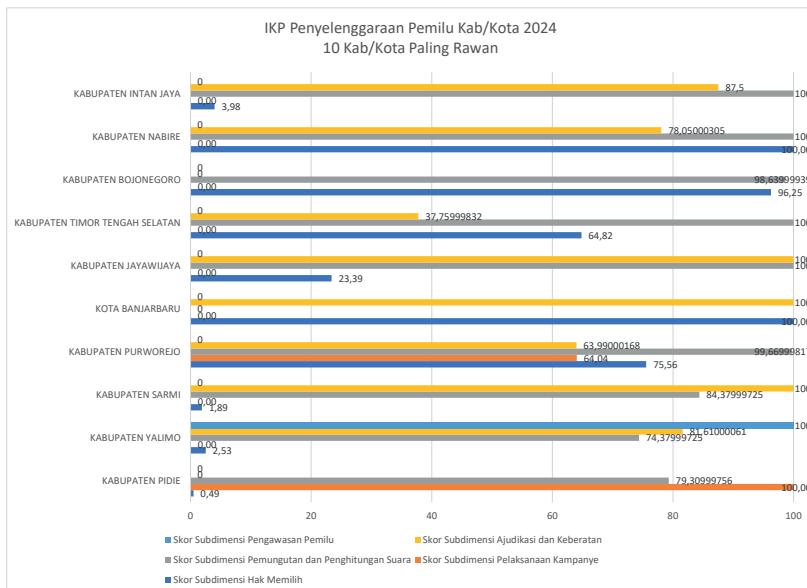
Gambar 18. 10 Kabupaten/Kota Paling Rawan Dimensi Sosial Politik

**15 Kab/Kota Rawan Tertinggi
Dimensi Penyelenggaran Pemilu**

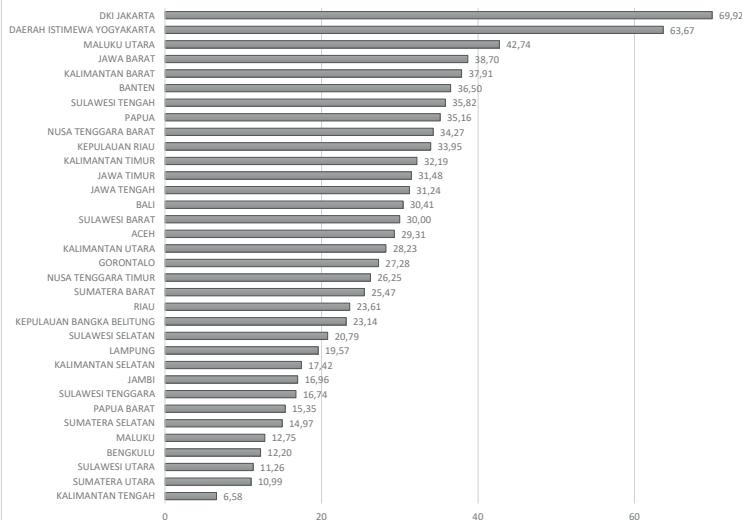


**IKP Penyelenggaraan Pemilu 2024
Berdasarkan Agregasi Kabupaten/Kota**

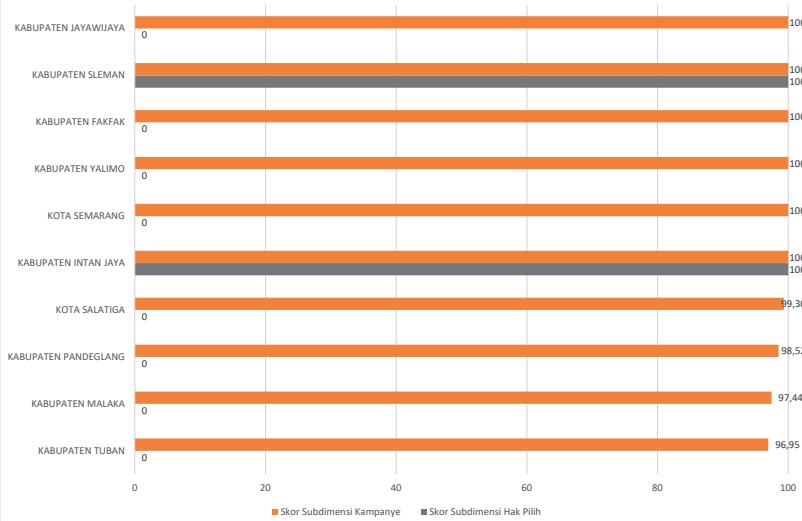


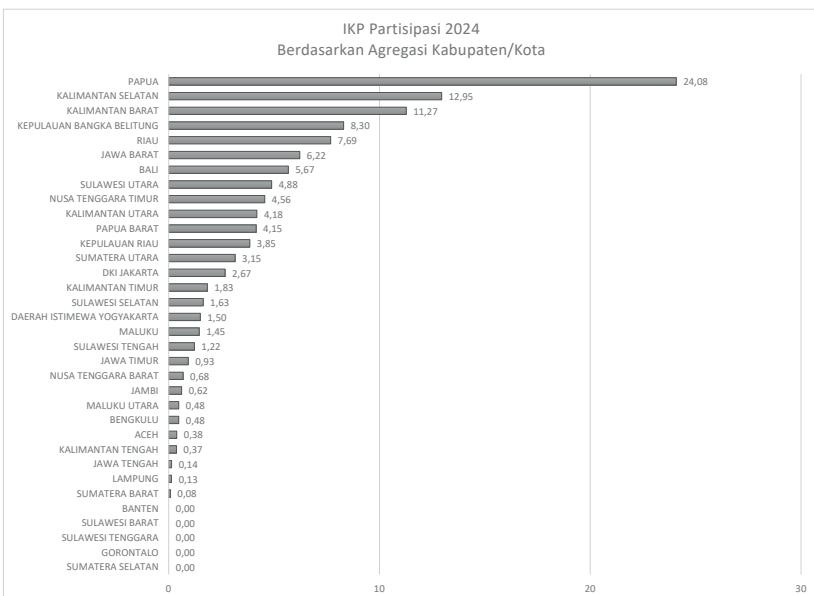
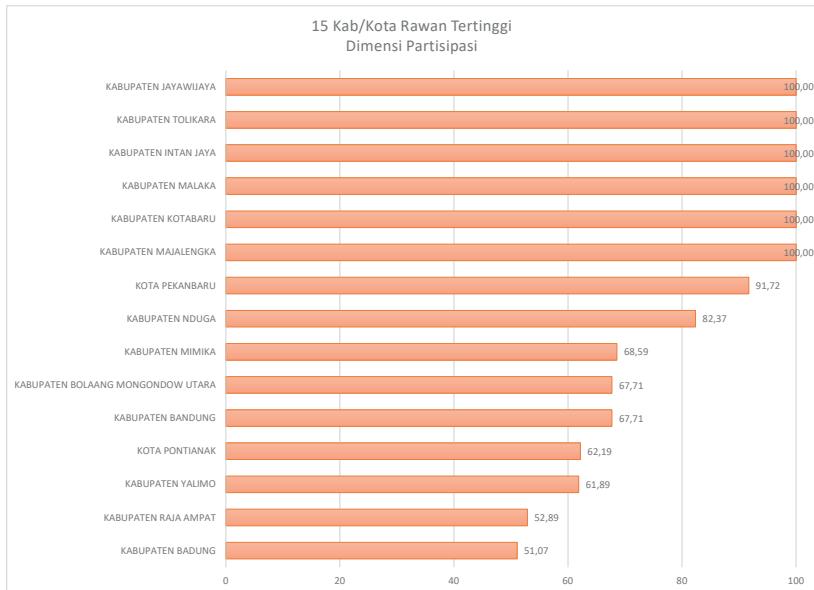


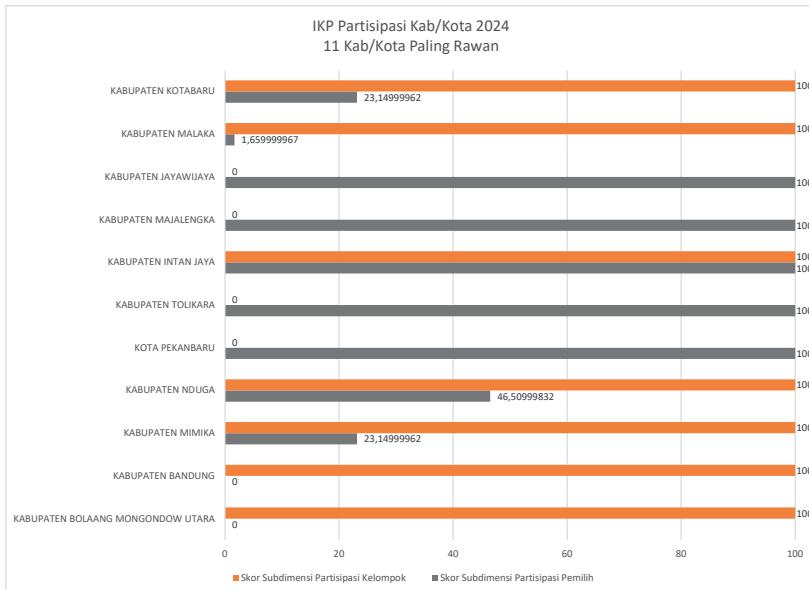
IKP Kontestasi 2024
Berdasarkan Aggregasi Kabupaten/Kota



IKP Kontestasi Kab/Kota 2024
10 Kab/Kota Paling Rawan







C. Temuan dalam Dimensi

Seperti yang dijelaskan di awal, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini dibangun dari empat dimensi, yakni dimensi konteks sosial politik yang di dalamnya terdapat 3 subdimensi dan 16 indikator. Kemudian dimensi penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari 5 subdimensi dengan 24 indikator. Selanjutnya dimensi kontestasi yang mencakup 2 subdimensi dengan 15 indikator. Terakhir adalah dimensi partisipasi yang terdiri dari dua subdimensi dengan 6 indikator. Artinya, total dari empat dimensi yang dibangun mencakup 12 subdimensi dan 61 indikator.

Hasil analisis indeks merekam, penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam memberikan konstribusi terbentuknya indeks kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Hal ini terlihat dari data di tingkat provinsi. Pada tingkatan provinsi, skor dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat mencapai 54,27. Skor ini lebih tinggi dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55. Kemudian disusul dimensi kontestasi dengan skor 40,75 dan dimensi partisipasi politik yang tercatat berada di skor 17,23.

Hal yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42,22. Dimensi ini diikuti oleh dimensi konteks sosial politik yang berada di skor 31,13. Selanjutnya dimensi kontestasi dengan skor 26,22 dan terakhir dimensi partisipasi politik dengan skor 3,83.

Jika merujuk data dimensi antara provinsi dan kabupaten/kota di atas memang bobot terbesar dalam menyumbang indeks kerawanan memang tidak lepas dari komposisi besaran subdimensi yang menjadi titik tekan perhatian. Dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi yang paling besar bobotnya dalam menyumbang proses pembentukan indeks kerawanan. Salah satunya bertolak dari jumlah subdimensi dan indikator yang lebih besar dibandingkan tiga dimensi lainnya.

Di bagian ini diurai secara lebih detail bagaimana empat dimensi yang ada dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 ini terbentuk. Empat dimensi diurai berdasarkan subdimensi di dalamnya dengan tidak melepaskan diri dari upaya menggalinya melalui pendekatan wilayah, yakni pada tingkatan provinsi dan kabupaten/kota.

Uraian ini lebih menunjukkan di subdimensi mana sebuah wilayah tersebut masuk kategori kerawanan rendah, sedang, maupun tinggi. Untuk itu, sebagian besar uraian di bawah ini akan lebih banyak dalam bentuk table untuk memudahkan mengkategorikan tiap subdimensi yang disertai daerah-daerah mana saja yang masuk kategori kerawanan sesuai tingkatannya berdasarkan dimensi dan subdimensi.

C.1 Dimensi Konteks Sosial dan Politik

Pada dimensi konteks sosial dan politik, di tingkat provinsi, ada lima wilayah yang masuk kategori potensi kerawanan tinggi. Kelima provinsi itu adalah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Maluku Utara tercatat paling tinggi skornya dibandingkan empat provinsi lainnya.

Di kategori dimensi konteks sosial dan politik yang masuk kategori kerawanan sedang, ada 22 provinsi masuk terdeteksi. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling tinggi skor di kelompok kerawanan sedang ini dengan angka skor mencapai 74,91.

Dengan jumlah pemilih yang relatif besar dan menjadi salah satu lumbung suara terbesar di Indonesia, tentu Jawa Barat akan menjadi isu dan perhatian tersendiri, sehingga provinsi ini masuk dalam posisi skor terbesar di kelompok provinsi dengan potensi tingkat kerawanan sedang di dimensi konteks sosial dan politik. Sementara itu tujuh provinsi lainnya masuk dalam kategori tingkat kerawanan rendah dengan sebagian besar meraih skor di angka 0,00. Meskipun masuk kategori kerawanan rendah di dimensi konteks sosial dan politik, bukan berarti wilayah ini tidak perlu dimitigasi. Wilayah yang masuk kategori kerawanan rendah tetap menyimpan potensi kerawanan yang membutuhkan perhatian tersendiri.

Apalagi di kelompok ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, misalnya, skornya mencapai 16,01 atau selisih dengan kelompok provinsi yang masuk di kategori kerawanan sedang. Artinya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang masuk dalam peringkat paling atas dalam kelompok kerawanan rendah di dimensi konteks sosial dan politik ini.

Salah satu subdimensi dalam dimensi konteks sosial dan politik, yakni dimensi keamanan, terekam cukup menyumbang porsi besar terhadap kerawanan. Subdimensi keamanan jadi aspek yang paling memicu perhatian karena terekam hampir di semua wilayah. Maka, tidak heran jika kemudian tidak ada wilayah provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan rendah di aspek atau subdimensi keamanan ini.

Dari 34 provinsi yang diriset, semuanya masuk kategori kerawanan tinggi dan sedang. Setidaknya ada sembilan provinsi yang masuk dalam tingkat kerawanan tinggi. Sekali lagi, Maluku Utara masuk dalam kategori kerawanan tinggi di subdimensi keamanan ini. Provinsi Maluku Utara juga menjadi wilayah yang skornya paling tinggi di antara provinsi-provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi di subdimensi keamanan ini.

Seperti halnya yang ditemukan pada dimensi konteks sosial dan politik, selain Maluku Utara, provinsi Sulawesi Utara juga masuk dalam kategori kerawanan tinggi pada subdimensi keamanan ini. Angka skornya persis di bawah Maluku Utara, yakni 84,20. Selain kedua provinsi ini, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga masuk dalam kategori kerawanan tinggi pada subdimensi keamanan. Ketiga provinsi ini sebelumnya juga masuk kategori yang sama pada dimensi konteks sosial dan politik.

Sementara itu pada subdimensi keamanan dengan tingkat kerawanan sedang, terdapat 19 provinsi yang masuk kategori ini. Setelah di dimensi konteks sosial politik ada provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meraih skor tertinggi di tingkat kerawanan sedang, di subdimensi keamanan ini, Provinsi Bangka Belitung berada di peringkat ketiga dari kelompok provinsi dengan tingkat kerawanan sedang di subdimensi keamanan.

Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua provinsi yang masuk dan posisi teratas di kelompok kerawanan sedang di subdimensi keamanan ini. Kedua provinsi ini meraih skor dua digit, jauh di atas dari provinsi-provinsi lainnya di kelompok kerawanan sedang ini yang hanya di skor satu digit. Artinya, kedua provinsi, yakni Jambi dan Kalimantan Selatan, meskipun masuk kategori kerawanan sedang, dengan skor paling tinggi, keduanya tetap menyimpan potensi kerawanan yang relatif besar pada subdimensi keamanan.

Selain subdimensi keamanan, di tingkat subdimensi otoritas penyelenggara pemilu, di tingkatan provinsi ada enam provinsi yang masuk

dalam tingkat kerawanan tinggi. Enam provinsi ini berada di rentang skor antara 79 hingga 100. Provinsi Kalimantan Timur tercatat paling tinggi skor indeks di subdimensi otoritas penyelenggara pemilu ini.

Sementara untuk kategori kerawanan sedang terdapat 21 provinsi yang masuk ke dalamnya. Sekali lagi Provinsi Maluku Utara masuk dalam kategori rendah ini dengan skor indeks tercatat paling tinggi di angka 76.59. Angka ini jauh melebihi 20 provinsi lainnya yang sebagian besar di luar Pulau Jawa.

Selanjutnya, di subdimensi penyelenggara pemilu, di tingkat kategori kerawanan rendah ada tujuh provinsi yang masuk di dalamnya. Provinsi Kepulauan Riau masuk sebagai wilayah yang paling tinggi skor indeksnya dibandingkan enam provinsi lainnya. Di luar subdimensi keamanan dan subdimensi otoritas penyelenggaraan pemilu, juga ada subdimensi otoritas penyelenggara negara yang juga menunjukkan sejumlah provinsi cenderung masuk ke dalam kategori tinggi dan sedang.

Hal yang terjadi pada tingkatan provinsi ini juga ditemukan kecenderungan yang sama di tingkat kabupaten/kota. Sebagian besar wilayah di tingkat kabupaten/kota masuk kategori kerawanan tinggi dan sedang. Bahkan di sejumlah subdimensi dalam dimensi konteks sosial dan politik ini, tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kerawanan rendah.

C.2 Dimensi Penyelenggaraan Pemilu

Seperti yang disinggung di atas bahwa dimensi penyelenggaraan pemilu ini menjadi dimensi yang memiliki porsi besar dalam menyumbang indeks kerawanan. Dengan bobot yang lebih tinggi, dimensi ini memang lebih banyak terbangun dari lima subdimensi, yakni subdimensi hak memilih, subdimensi pelaksanaan kampanye, subdimensi pelaksanaan pemungutan suara, subdimensi ajudikasi dan keberatan, serta subdimensi pengawasan pemilu.

Di kategori kerawanan tinggi pada dimensi penyelenggaraan pemilu, ada enam provinsi yang masuk dalam kategori ini, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Banten. Keenam provinsi ini berada dalam rentang skor indeks 89,43 sampai 100. Provinsi Kalimantan Timur tercatat paling tinggi skor indeksnya.

Sementara itu ada 20 provinsi yang masuk ke dalam kategori kerawanan sedang dalam dimensi penyelenggaraan pemilu dan 8 provinsi masuk kategori kerawanan rendah.

Jika masuk ke dalam subdimensinya, peta agak berbeda ditemukan dalam subdimensi hak memilih. Pada kategori subdimensi hak memilih ini tidak ada kategori provinsi yang masuk ke dalam tingkat kerawanan rendah. Ada 9 provinsi yang masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi terdapat dan sisanya semua provinsi masuk kategori kerawanan sedang di subdimensi hak memilih ini.

Kondisi agak berbeda ditemukan pada subdimensi pengawasan pemilu di tingkat provinsi. Tidak ada provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi dan sedang. Semua provinsi (34 provinsi) yang masuk ke dalam kajian indeks kerawanan ini masuk ke dalam kategori kerawanan rendah. Artinya, di subdimensi pengawasan relatif sudah efektif dan hampir jarang ditemukan pelanggaran di subdimensi ini jika mengacu pada data-data yang berhasil dihimpun dalam indeks kerawanan kali ini.

Temuan data di tingkat kabupaten/kota pada dimensi penyelenggaraan pemilu ini juga tidak jauh berbeda dengan temuan data di tingkat provinsi. Ada sejumlah subdimensi juga terbagi ke dalam tiga kategori kerawanan, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Namun, juga ada subdimensi yang terdeteksi ada yang tinggi dan sedang tanpa ada yang masuk kategori kerawanan rendah.

C.3 Dimensi Kontestasi

Pada dimensi kontestasi yang terdiri dari dua subdimensi, yakni subdimensi hak dipilih dan kampanye calon, terekam di tingkat provinsi ada enam provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi. Keenam provinsi tersebut sebagian juga terdeteksi masuk kategori kerawanan tinggi di dimensi konteks sosial dan politik serta dimensi penyelenggaraan pemilu.

Keenam provinsi tersebut adalah Maluku Utara, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Keenam provinsi ini angka skor indeksnya terbentur diantara 73.96 sampai 100. Sementara itu di kategori kerawanan sedang pada dimensi kontestasi ini tercatat ada 19 provinsi dan sembilan provinsi lainnya masuk kategori kerawanan rendah.

Kemudian jika dilihat dari subdimensi hak dipilih, tidak ada kategori kerawanan sedang di tingkat provinsi ini. Sebanyak 7 provinsi masuk kategori kerawanan tinggi pada subdimensi hak dipilih. Sisanya, semuanya masuk kategori kerawanan rendah. Sementara pada subdimensi kampanye calon, tiga kategori kerawanan muncul tersebar di semua provinsi.

Hasil riset merekam, sebanyak 6 provinsi, yakni Maluku Utara, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara masuk dalam kategori kerawanan tinggi pada subdimesn kampanye calon. Selanjutnya ada 19 provinsi yang masuk ke dalam kategori kerawanan sedang dan 9 provinsi masuk ke dalam kategori kerawanan rendah.

Di tingkat kabupaten/kota, dimensi kontestasi juga terbagi ke dalam tiga kategori kerawanan. Sebagian besar kabupaten/kota memang masuk ke dalam kategori kerawanan sedang. Hal yang sama juga ditemukan pada subdimensi hak dipilih dan subdimensi kampanye calon.

C.4 Dimensi Partisipasi

Dimensi partisipasi relatif menjadi dimensi yang tidak begitu tinggi tingkat konstribusinya kepada kerawanan. Meskipun demikian, dimensi ini tetap menjadi sumber kerawanan yang umumnya terjadi di hampir semua daerah, terutama terkait akses terbukanya ruang berpartisipasi bagi publik dalam pemilihan umum.

Pada dimensi ini ada enam provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi, yakni Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Keenamnya berada dalam rentang skor indeks mencapai 64.72 hingga 100. Provinsi Sulawesi Utara tercatat paling tinggi skornya di kelompok kerawanan tinggi ini.

Kemudian di kelompok kerawanan sedang pada dimensi partisipasi hanya ada dua provinsi yang masuk kategori ini. Kedua provinsi itu adalah Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Sementara 26 provinsi lainnya masuk ke dalam kategori kerawanan rendah pada dimensi partisipasi ini.

Pola serupa juga ditemukan pada analisis subdimensi partisipasi pemilih. Sebagian besar provinsi masuk ke dalam kategori kerawanan rendah. Hanya empat provinsi yang masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi, yakni provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan

Jawa Barat. Kemudian hanya ada satu provinsi, yakni Kalimantan Timur yang masuk ke dalam kategori kerawanan sedang. Sisanya, sebanyak 29 provinsi lainnya masuk kategori kerawanan rendah.

Kondisi serupa namun sedikit berbeda ditemukan pada analisis subdimensi partisipasi masyarakat. Di subdimensi ini ada tiga provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi, yakni Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Sisanya, sebanyak 31 provinsi masuk ke dalam kategori kerawanan rendah. Artinya, tidak ada provinsi didalam analisis subdimensi partisipasi masyarakat ini yang masuk ke dalam kategori kerawanan sedang.

Jika di tingkat provinsi pada dimensi partisipasi ada subdimensi yang kategorinya nihil di tingkat kerawanan sedang, analisis dimensi partisipasi di tingkat kabupaten/kota relatif terbagi merata disemua tingkat kerawanan, baik tinggi, sedang, dan rendah. Meskipun gejalanya relatif sama dengan tingkat provinsi, yakni sebagian besar memang masuk ke dalam tingkat kerawanan rendah, baik di subdimensi partisipasi pemilih maupun subdimensi partisipasi masyarakat.



ca Theater XXI

PLANET
SPOKES ASIA





BAB

ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI

A

BAB 4

ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI

Bab ini akan menganalisa dari data dan temuan yang sudah disampaikan bab sebelumnya. Ada dua hal utama yang akan dielaborasi yaitu berdasarkan temuan provinsi dan temuan kabupaten/kota. Analisa ini memfokuskan untuk memberi penjelasan terhadap fenomena provinsi, kabupaten/kota yang memiliki kecenderungan kerawanan tinggi. Selain itu, bab ini nantinya akan melihat beberapa isu strategis yang menjadi langkah antisipasi Bawaslu RI dalam mengawasi dan mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran di Pemilu 2024 mendatang.

A. **Analisa Umum**

Berdasarkan temuan di tingkat provinsi, dimensi yang menyumbang kontribusi yang tinggi terhadap skor IKP adalah penyelenggaraan pemilu yaitu sebesar 54,27. Dimensi berikutnya adalah konteks sosial dan politik dengan skor 46,55, diikuti kontestasi dengan skor 40,75 dan terakhir partisipasi sebesar 17,23.

Hal yang sama juga dapat diperhatikan dari temuan di tingkat kabupaten/kota. Dimensi yang memberikan kontribusi tertinggi juga berasal dari penyelenggaraan pemilu yaitu sebesar 42,22. Dimensi yang selanjutnya memberikan kontribusi adalah konteks sosial dan politik dengan skor sebesar 31,13, lalu diikuti dimensi kontestasi dengan skor 26,22 dan terakhir dimensi partisipasi dengan skor sebesar 3,83.

Dari hasil temuan tersebut, maka data dan informasi yang tersebar dan berhasil dikumpulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota ini menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang belum optimal memiliki potensi kerawanan yang mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti. Tentu hal ini bisa dipahami bahwa sepanjang tahun 2017-2020 yang lalu, masih ada begitu banyak masalah penting yang dihadapi oleh para penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, semisal persoalan hak pilih, hal yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara, dan lainnya.

Dimensi konteks sosial dan politik memiliki kerawanan yang relatif sedang atau tidak tinggi ini menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang menjadi penunjang pelaksanaan pemilu dan pemilihan di setiap wilayah di Indonesia masih dapat mendukung dengan baik. Meskipun ada banyak peristiwa dan kejadian yang memiliki dinamika sosial politik yang tinggi dan mengkhawatirkan sepanjang tahun 2017-2020 dalam banyak Pemilu dan Pemilihan, namun hal tersebut relatif masih dapat diatasi oleh para stakeholder kunci.

Dimensi kontestasi juga dapat dilihat dalam kontribusinya yang sedang dalam IKP ini. Dimensi ini menunjukkan bahwa ruang kontestasi yang ada masih dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, dimensi ini sebenarnya menyimpan ruang yang perlu diantisipasi secara serius manakala kompetisi para calon dalam Pemilu ataupun Pemilihan berlangsung secara keras dan berakibat kepada adanya penyebarluasan informasi yang tidak seimbang, tidak adil dan berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sehingga, kampanye yang menjadi bagian dari dimensi kontestasi ini perlu mendapat perhatian banyak pihak agar dapat mengantisipasi penyebarluasan informasi yang cepat di era digital saat ini.

Dan terakhir, dimensi partisipasi yang berkontribusi rendah dalam skor IKP ini menunjukkan bahwa publik masih memiliki perhatian yang baik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan tidak memiliki kekhawatiran

yang serius saat ini. Namun demikian, catatan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendorong berbagai bentuk pengawasan yang berasal dari komunitas dan kelompok masyarakat semakin intens dan dapat menjaga ruang partisipasi yang tetap adil bagi semua pihak.

B. Analisa Provinsi

Secara umum, ada lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan pengalaman pemilu/pilkada terakhir, yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur (lihat tabel). Jawa Barat dan Kalimantan Timur memiliki skor kerawanan yang sama, dan kedua wilayah ini memiliki selisih skor kerawanan yang relative cukup besar dengan tiga provinsi paling rawan di atasnya. Kedua provinsi ini sama-sama memiliki skor kerawanan sosial politik yang juga lebih rendah dibandingkan tiga provinsi tertinggi di atasnya. Namun, Kalimantan Timur memiliki variasi kerawanan antar dimensi yang lebih besar dibandingkan Jawa Barat.

Tabel 3 : Lima Provinsi yang memiliki Kerawanan Tinggi berdasarkan Isian Bawaslu Provinsi

No	Provinsi	Skor
1	DKI Jakarta	88,95
2	Sulawesi Utara	87,48
3	Maluku Utara	84,86
4	Jawa Barat	77,04
5	Kalimantan Timur	77,04

Jika kita amati lebih jauh variasi jumlah provinsi berdasarkan kerawanan antar dimensi, tabel 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki skor dimensi kerawanan sedang. terletak pada tingkat kerawanan sedang. Pada dimensi sosial-politik, Sekitar 64,71% provinsi memiliki skor kerawanan sosial politik sedang. Sementara 20.59% memiliki skor kerawanan sosial politik rendah. Dan 14.71% yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Pada dimensi penyelenggaraan pemilu, Sebagian besar provinsi juga memiliki tingkat kerawanan dimensi yang sedang (58.82%). Sekitar 23.53% memiliki tingkat kerawanan rendah. Dan sekitar 17.65% memiliki skor kerawanan tinggi untuk dimensi penyelenggaraan pemilu. Pada dimensi kontestasi, lebih dari 50% provinsi di Indonesia juga masuk kategori sedang, 26.47% memiliki kerawanan rendah dan lebih dari 17% memiliki skor kerawanan tinggi. Terakhir, untuk dimensi partisipasi, lebih dari 80% wilayah memiliki skor kerawanan sedang, dan lebih dari 17% persen memiliki skor kerawanan tinggi. Tidak ada provinsi yang memiliki tingkat kerawanan rendah.

Tabel 4: Prosentase Kerawanan Provinsi Per Dimensi IKP 2024

No	Kategori	Dimensi Sosial dan Politik	Penyelenggaraan Pemilu	Kon-testasi	Partisi-pasi
1	Tinggi	14,71	17,65	17,65	17,65
2	Sedang	64,71	58,82	55,88	82,35
3	Rendah	20,59	23,53	26,47	0

Tabel 5 memperlihatkan sebaran wilayah (provinsi) yang memiliki skor IKP peringkat 10 tertinggi yang di-breakdown ke dalam empat dimensi. Pada dimensi sosial politik, Sumatera Utara merupakan satu-satunya wilayah Pulau Sumatera yang masuk dalam 10 provinsi dengan IKP sosial politik tertinggi. Sementara ada tiga provinsi yang terletak di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dua provinsi mewakili Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sisanya tersebar di Pulau Sulawesi (Sulawesi Utara), Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan demikian, untuk dimensi sosial politik, sepuluh provinsi paling rawan tersebar di semua pulau-pulau besar Indonesia.

Untuk dimensi penyelenggaraan pemilu, peringkat paling rawan ditempati oleh Kalimantan Timur yang mendapatkan nilai maksimum kerawanan. Sumatera Utara menempati tempat kedua sebagai provinsi paling rawan dimensi penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya berturut-turut ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten, Maluku Utara, Jawa Barat, Lampung dan Sulawesi Tenggara. Jika dilihat dari sebaran wilayah, kerawanan pada dimensi

ini banyak terjadi di Pulau Jawa, di mana ada empat dari sepuluh provinsi paling rawan dimensi penyelenggaraan pemilu terletak di sini. Papua dan Papua Barat relative tidak rawan dalam dimensi ini.

Sementara untuk dimensi kontestasi, variasi baru wilayah paling rawan juga ditemukan dalam IKP kali ini. Tiga dari sepuluh provinsi paling rawan kontestasi terletak di Pulau Sumatera, yakni Lampung, Bangka Belitung, dan Riau. Tiga provinsi lainnya yang juga masuk dalam sepuluh provinsi paling rawan dimensi penyelenggaraan pemilu adalah Bali, NTT dan Gorontalo.

Terakhir, hanya ada delapan provinsi yang masuk dalam provinsi paling rawan dalam dimensi partisipasi. Delapan provinsi ini adalah provinsi-provinsi dengan skor kerawanan yang tidak nol. Ini berarti di provinsi ini paling tidak ditemukan satu persoalan yang berkaitan dengan partisipasi, apakah itu partisipasi pemilih maupun partisipasi kelompok. Seperti terlihat pada table berikut, Sulawesi Utara mendominasi kerawanan dimensi ini dengan skor maksimum. Dilanjutkan dengan DKI Jakarta, Yogyakarta, Kep. Riau, Sulawesi Tengah, Papua, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.

Tabel 5: 10 Provinsi Memiliki Kerawanan Tertinggi berdasarkan Dimensi IKP

No	Dimensi Sosial dan Politik	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Dimensi Kontestasi	Dimensi Partisipasi
1	Maluku Utara (100)	Kalimantan Timur (100)	Maluku Utara (100)	Sulawesi Utara (100)
2	Sulawesi Utara (89,58)	Sumatera Utara (94,29)	DKI Jakarta (96,09)	DKI Jakarta (87,01)
3	Papua (80,53)	DKI Jakarta (92,36)	Lampung (89,30)	Yogyakarta (87,01)
4	DKI Jakarta (78,27)	Jawa Tengah (91,67)	Jawa Barat (83,71)	Kepulauan Riau (87,01)
5	Yogyakarta (75,87)	Sulawesi Utara (91,60)	Bangka Belitung (79,10)	Sulawesi Tengah (87,01)
6	Jawa Barat (74,91)	Banten (89,43)	Sulawesi Utara (73,96)	Papua (64,72)

7	Kalimantan Timur (72.70)	Maluku Utara (86.48)	Bali (71.32)	Jawa Barat (42.07)
8	Sumatera Utara (72.61)	Jawa Barat (83.38)	Nusa Tenggara Timur (68.96)	Kalimantan Timur (30.92)
9	Papua Barat (72.33)	Lampung (81.13)	Gorontalo (65.65)	
10	Kalimantan Selatan (66.96)	Sulawesi Tenggara (80.48)	Riau (62.96)	

Sementara itu, apabila data agregat dari kabupaten/kota ditarik per provinsi, maka kerawanan tinggi akan berbeda hasilnya. Tabel 4 di bawah menggambarkan posisi kerawanan tinggi yang diperoleh berbeda dengan hasil pengisian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi (lihat tabel 1). Namun demikian, keempat provinsi seperti Maluku Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Jawa Barat tetap berada dalam posisi 10 besar kategori kerawanan tinggi berdasarkan data agregat kabupaten/kota yang dimaksud.

Tabel 6: 10 Provinsi dengan Kerawanan Tinggi berdasarkan data agregat kabupaten/kota

No	Provinsi	Skor
1	Banten	45,18
2	Papua	45,09
3	Maluku Utara	42,35
4	Sulawesi Tengah	41,70
5	DI Yogyakarta	41,37
6	Jawa Barat	39,72
7	Nusa Tenggara Barat	38,48
8	Sulawesi Utara	37,02
9	DKI Jakarta	35,95
10	Jawa Tengah	35,90

Sementara itu, bila diperhatikan tabel 5, hal yang relatif tidak jauh berbeda dengan data kompilasi yang berdasarkan isian Bawaslu Provinsi bahwa komposisi dan pergeseran provinsi yang memiliki kerawanan tertinggi per dimensi tidak jauh berbeda. Sebagai contoh dalam dimensi sosial dan politik yang dapat dibandingkan antara tabel 3 dan tabel 5 maka Sulawesi Utara dan Maluku Utara adalah dua provinsi yang memang memiliki kerawanan tinggi. Sementara dalam dimensi penyelenggaraan pemilu, provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan dua provinsi yang juga memiliki kerawanan yang tinggi berdasarkan tabel 3 dan tabel 5 seperti yang dimaksud.

Tabel 7: 10 Provinsi dengan data agregat kabupaten/kota yang Memiliki Kerawanan Tertinggi berdasarkan Dimensi IKP 2024

No	Dimensi Sosial dan Politik	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Dimensi Kontestasi	Dimensi Partisipasi
1	Sulawesi Utara (55,67)	Banten (70,28)	DKI Jakarta (69,92)	Papua (24,08)
2	Maluku Utara (48,56)	Papua (56,09)	DI Yogyakarta (63,67)	Kalimantan Selatan (12,95)
3	Papua (46,60)	Sulawesi Tengah (54,96)	Maluku Utara (42,74)	Kalimantan Barat (11,27)
4	Jambi (43,98)	Jawa Tengah (54,58)	Jawa Barat (38,70)	Bangka Belitung (8,03)
5	Sulawesi Tengah (43,45)	Jawa Barat (51,56)	Kalimantan Barat (37,91)	Riau (7,69)
6	Nusa Tenggara Barat (43,17)	Aceh (50,04)	Banten (36,50)	Jawa Barat (6,22)
7	Sulawesi Barat (42,16)	DI Yogyakarta (49,94)	Sulawesi Tengah (35,82)	Bali (5,67)

8	Bali (38,95)	Sulawesi Utara (49,17)	Papua (35,16)	Sulawesi Utara (4,88)
9	Sulawesi Tenggara (38,02)	Maluku Utara (48,69)	Nusa Tenggara Barat (34,27)	Nusa Tenggara Timur (4,56)
10	Jawa Barat (36,79)	Nusa Tenggara Barat (47,86)	Kepulauan Riau (33,95)	Kalimantan Utara (4,18)

Sehingga, temuan IKP 2024 ini memberikan perhatian tentang bagaimana persebaran kerawanan tinggi di setiap pulau besar di Indonesia menjadi penting berdasarkan dimensi-dimensi yang sudah dielaborasi lebih lanjut. Sebaran provinsi yang cukup merata ini membuktikan bahwa Bawaslu RI dan para pihak yang terkait di setiap provinsi perlu memberikan perhatian yang intensif dalam menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Artinya Bawaslu Provinsi dapat proaktif untuk mendorong terbukanya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders untuk bersama-sama menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

C. Analisa Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari per dimensi, terutama untuk melihat kabupaten/kota mana saja yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi di masing-masing dimensi, tampak kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua tercatat masih mendominasi. Pada dimensi konteks sosial dan politik, dari sepuluh besar kabupaten/kota yang masuk kategori ini, empat diantaranya berasal dari Papua, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mappi.

Meskipun yang paling tinggi skor di kelompok kerawanan tinggi pada dimensi konteks sosial dan politik ini adalah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, namun empat daerah dari Papua yang masuk kategori kerawanan ini tentu menjadi perhatian tersendiri.

Kemudian pada dimensi penyelenggaraan pemilu, lagi-lagi kabupaten/kota dari Papua mendominasi masuk kategori kerawanan tinggi. Dari sepuluh kabupaten/kota yang skornya paling tinggi di dimensi penyelenggaraan

pemilu, lima diantaranya atau separuhnya berasal dari Papua. Kelima kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Yalimo. Meskipun lima diantaranya dari Papua, namun skor tertinggi di dimensi penyelenggaraan pemilu ini ada pada Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Hal yang tidak jauh berbeda juga ditemukan pada dimensi kontestasi. Meskipun tidak sebanyak pada dimensi konteks sosial dan politik serta dimensi penyelenggaraan pemilu, di dimensi kontestasi ini, dari sepuluh kabupaten/kota tertinggi skor indeksnya, di urutan pertama adalah Kabupaten Intan Jaya.

Selain Intan Jaya, dari Papua juga tercatat Kabupaten Yalimo di urutan ketiga, dan Kabupaten Jayawijaya. Selain tiga kabupaten/kota dari Papua, satu kabupaten/kota dari Papua Barat, yakni Kabupaten Fakfak masuk ke dalam sepuluh kabupaten/kota tertinggi di kelompok kerawanan tinggi pada dimensi kontestasi ini.

Kemudian pada dimensi partisipasi, lagi-lagi kabupaten/kota dari Provinsi Papua juga menempati porsi paling banyak yang masuk kategori tingkat kerawanan tinggi. Dari sepuluh kabupaten/kota yang paling tinggi angka skornya, lima diantaranya atau 50 persen nya berasal dari Provinsi Papua. Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Tolikara yang berada di urutan pertama, kemudian Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Nduga.

Berpijak dari dominannya wilayah kabupaten/kota dari Provinsi Papua yang masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi di empat dimensi yang ada ini, tidak bisa dipungkiri bahwa Papua memang menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun harus diakui kondisi ini memang bukan sesuatu yang baru. Hal ini mengingat pada indeks kerawanan pemilu sebelumnya, Papua memang menjadi wilayah yang paling banyak ditemui masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi di pemilu.

Dalam konteks ini, indeks kerawanan yang menemukan banyak wilayah dari Papua masuk kategori kerawanan tinggi ini (lihat tabel 6), pada akhirnya membutuhkan pendekatan mitigasi khusus, terutama dengan melibatkan pendekatan budaya dengan tokoh-tokoh adat Papua sebagai bagian dari strategi merumuskan upaya pencegahan dan mitigasi.

Tabel 8: 10 Kabupaten/Kota Memiliki Kerawanan Tertinggi Berdasarkan Dimensi IKP 2024

No	Dimensi Sosial dan Politik	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Dimensi Kontestasi	Dimensi Partisipasi
1	Kabupaten Bandung, Jabar (100)	Kota Banjarbaru, Kalsel (100)	Kabupaten Intan Jaya, Papua (100)	Kabupaten Tolikara, Papua (100)
2	Kota Banjarbaru, Kalsel (100)	Kabupaten Jayawijaya, Papua (100)	Kota Semarang, Jateng (100)	Kabupaten Intan Jaya, Papua (100)
3	Kabupaten Puncak, Papua (100)	Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT (100)	Kabupaten Yalimo, Papua (100)	Kabupaten Majalengka, Jabar (100)
4	Kabupaten Kerinci, Jambi (100)	Kabupaten Bojonegoro, Jatim (100)	Kabupaten Fakfak, Papua Barat (100)	Kabupaten Jayawijaya, Papua (100)
5	Kabupaten Jayawijaya, Papua (100)	Kabupaten Nabire, Papua (100)	Kabupaten Sleman, DIY (100)	Kabupaten Malaka, NTT (100)
6	Kabupaten Intan Jaya, Papua (100)	Kabupaten Intan Jaya, Papua (100)	Kabupaten Jayawijaya, Papua (100)	Kota Banjarbaru, Kalsel (100)
7	Kabupaten Sukoharjo, Jateng (99,69)	Kabupaten Purworejo, Jateng (98,14)	Kota Salatiga, Jateng (99,30)	Kota Pekanbaru, Riau (91,72)
8	Kabupaten Malaka, NTT (98,57)	Kabupaten Sarmi, Papua (97,33)	Kabupaten Pandeglang, Banten (98,52)	Kabupaten Nduga, Papua (82,37)
9	Kabupaten Batang Hari, Jambi (97,50)	Kabupaten Yalimo, Papua (97,22)	Kabupaten Malaka, NTT (97,44)	Kabupaten Mimika, Papua (68,59)
10	Kabupaten Mappi, Papua (96,92)	Kabupaten Pidie, Aceh (94,92)	Kabupaten Tuban, Jatim (96,95)	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulut (67,71)

D. Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi hendaknya didasarkan pada hasil pemetaan kerawanan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan yang berbeda berdasarkan dimensi atau subdimensi. Variasi tingkat kerawanan bukan berarti menunjukkan realitas yang akan terjadi pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Perlu diingat, penyusunan IKP yang mendasarkan pada data-data pemilu sebelumnya (**post-factum**) harus dibaca sebagai sinyalemen yang memerlukan rencana tindak lanjut.

Dalam semesta IKP Pemilu dan Pemilihan 2024, potensi kerawanan rendah pada suatu dimensi atau subdimensi tertentu di satu daerah tidak serta merta meniadakan potensi persoalan pada penyelenggaraan pemilu. Demikian sebaliknya, potensi kerawanan tinggi pada suatu dimensi atau subdimensi tertentu di suatu daerah bukan berarti persoalan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah melakukan diseminasi yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk menyusun rencana kerja pengembangan baseline IKP untuk masing-masing daerah sebagai langkah antisipasi potensi kerawanan yang muncul.

*Setidaknya
ada 6 (enam) isu utama
kerawanan
yang memerlukan
kebijakan antisipasi
berdasarkan
pemataan IKP Pemilu
dan Pemilihan 2024*

1. Jumlah partai politik peserta pemilu.

KPU telah menetapkan 18 partai politik. Dalam sudut pandang IKP semakin banyak jumlah peserta pemilu akan semakin tinggi potensi kerawanan pada dimensi penyelenggaraan dan kontestasi. Pada dimensi penyelenggaraan, pelaksanaan kampanye potensi kerawanan muncul seperti kasus pelanggaran jadwal kampanye, adanya kampanye hoax di media sosial, ujaran kebencian di tempat umum dan di media sosial, dan pelanggaran politik uang.

Selain itu, bertambahnya jumlah partai politik peserta pemilu juga meningkatkan kerawanan pada dimensi penyelenggaraan pemilu seperti meningkatnya potensi laporan pelanggaran administrasi dan pengajuan sengketa proses pemilu terutama pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan tahapan kampanye.

2. Pelaksanaan tahapan pemilu di provinsi baru

Pelaksanaan tahapan pemilu di Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme dari tahapan pemilu yang sudah berjalan. Tanggung jawab KPU dan Bawaslu untuk segera mempersiapkan personil dan sarana prasarana secara cepat akan mengurangi kerawanan saat melaksanakan tahapan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu. Langkah berikutnya adalah berkoordinasi dengan semua pihak yang berkaitan dengan urusan pemerintahan DOB tersebut termasuk dengan peserta pemilu agar juga mempersiapkan kepesertaan untuk mengikuti pemilu.

3. Netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilu berikutnya

Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu hendaknya menjadi prioritas kerja utama baik bagi KPU maupun Bawaslu beserta seluruh jajarannya. Kontrovesi atas pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik tidak boleh terulang untuk tahapan pemilu selanjutnya. Berdasarkan data **post-factum** yang dikumpulkan oleh IKP, pada tingkat kabupaten/kota sebanyak 271 daerah memiliki masalah terkait dengan aduan dugaan pelanggaran kode etik baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu. Semantara pada tingkat Provinsi, 9 daerah menyatakan ada persolan persoalan yang sama.

4. Polarisasi masyarakat dan dukungan politik.

Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan. Politisasi SARA potensial digunakan untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas peserta pemilu. Politisasi SARA dibungkus dengan pemberian informasi yang tidak benar dan disebarluaskan tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan.

5. Penggunaan media sosial untuk kontestasi.

Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

6. Pemenuhan hak memilih dan dipilih untuk perempuan dan kelompok rentan

Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.







BAB
PENUTUP

BAB 5

PENUTUP

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 ini masih memetakan kondisi yang terjadi dalam peristiwa antara rentang tahun 2017-2020 dalam setiap Pemilu dan Pemilihan. Artinya, IKP saat ini masih memberikan pemetaan dan arah potensi yang berdasarkan kondisi yang pernah terjadi. Sehingga, dalam tahun 2023 mendatang, Bawaslu RI tentu memiliki kebutuhan untuk lebih mendalami kondisi IKP ini berdasarkan tahapan-tahapan yang sedang berlangsung untuk dapat melakukan antisipasi dan langkah mitigasi dari masalah yang dihadapi.

Bab penutup ini akan menjelaskan dua hal yaitu kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan IKP 2024 dan tawaran rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dan pihak-pihak terkait.

A. Kesimpulan

IKP 2024 ini menunjukkan adanya dua temuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara terpisah. Dengan instrumen yang terdiri dari 4 dimensi, 12 sub dimensi dan 61 indikator, IKP ini melihat bahwa adanya kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi perhatian penting untuk diperhatikan menjelang tahun 2024 nanti. Selain itu, IKP juga mengidentifikasi ada sebanyak lima provinsi yang memiliki kerawanan tinggi dan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, yaitu: DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Di samping itu, apabila diperhatikan sebaran provinsi dalam setiap dimensi (konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi), maka provinsi di seluruh pulau besar di Indonesia memiliki potensi kerawanan tinggi. Sehingga, Bawaslu RI dapat memberikan rekomendasi serta pandangan kebijakan kepada pihak pemerintah pusat dan daerah dalam mengkaji secara lebih intensif berbagai langkah antisipasi untuk mengatasi potensi kerawanan sebagaimana yang terekam dalam IKP ini.

Sedangkan temuan di tingkat kabupaten/kota menunjukkan adanya 16,5 persen wilayah yang mendapat kategori kerawanan tinggi, 67,9 persen masuk dalam kategori sedang dan sisanya 15,5 persen adalah kategori rendah. Di antaranya, terdapat lima kabupaten/kota tertinggi yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Mappi. Dominasi kabupaten yang berasal dari Pulau Papua sebagai empat kabupaten ini menunjukkan bahwa perlu ada perhatian serius dan antisipasi yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan stakeholders lainnya di tingkat pusat dan daerah.

Adapun isu strategis yang menjadi perhatian dalam IKP ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagai berikut: (1) adanya penetapan jumlah partai politik yang baru disahkan oleh KPU RI; (2) pelaksanaan pemilu di daerah otonomi baru terutama di Pulau Papua; (3) netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan berikutnya; (4) polarisasi masyarakat dan dukungan politik; (5) penggunaan media sosial untuk kontestasi; (6) pemenuhan hak memilih dan dipilih untuk kelompok perempuan dan kelompok rentan. Keenam isu ini akan menjadi fokus dan arah pengawasan dan pencegahan dari Bawaslu berdasarkan temuan IKP ini.

B. Rekomendasi

Adapun IKP ini merekomendasikan beberapa kebijakan antisipasi ataupun langkah mitigasi untuk dapat dilakukan oleh berbagai pihak yaitu:

- 1) Bawaslu dapat mempersiapkan jajarannya atas kemungkinan meningkatnya potensi gugatan baik itu laporan pelanggaran administrasi dan pengajuan sengketa proses pemilu, termasuk yang paling dekat adalah terkait dengan hasil penetapan partai politik. Peningkatan kapasitas bagi komisioner Bawaslu daerah yang terkait dengan penanganan pelaporan administrasi dan sengketa proses penting dilakukan untuk meminimalisir potensi meningkatkan kerawanan pada dimensi penyelenggaraan.
- 2) Bawaslu dapat memperkuat kurikulum atau modul program pengawasan partisipatif (P2P) yang memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para kader pengawasan agar mampu memberikan **counter** terhadap isu ujaran kebencian. Hal ini penting dalam mengantisipasi kerawanan pada dimensi kontestasi.
- 3) KPU dan Pemerintah melalui Kementerian terkait perlu memperkuat kerangka kerja sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih yang mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilih akan profil dan platform kerja partai politik, rekam jejak kandidat serta tidak mudah terpengaruh oleh isu fitnah dan ujaran kebencian.
- 4) Transparansi dari KPU dan Bawaslu menjadi poin penting dalam memberikan keyakinan kepada publik terhadap netralitas KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, aspek ketebukaan data dan informasi publik yang dikelola oleh penyelenggara pemilu penting untuk dapat diperhatikan.
- 5) Penguatan desain peningkatan kapasitas atau orientasi tugas bagi anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, terutama bagi yang baru terpilih.

- 6) Membangun kerjasama dengan stakeholders kepemiluan terutama kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat terutama yang berbasis keagamaan dan kemasyarakatan. Kerjasama ini terutama dalam menyusun materi-materi terkait dengan pemilu dalam konteks membangun persatuan, toleransi dan penghormatan pilihan.
- 7) Mendorong komitmen dan pernyataan bersama dari peserta pemilu untuk tidak melakukan politisasi SARA dalam melakukan pendekatan dan meraih simpati pemilih.
- 8) Mendorong peserta pemilu dan calon untuk menggunakan media sosial resmi dalam melakukan kampanye dan berkomunikasi dengan netizen. Penyusunan peraturan KPU dan Perbawaslu perlu lebih banyak memberikan penguatan terhadap media sosial sekaligus memberikan sanksi yang cepat dan efektif jika terdapat pelanggaran.
- 9) Bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan media sosial dalam momentum politik diantaranya Kominfo dan POLRI.
- 10) Membangun kerjasama dengan semua pihak yang memiliki informasi dan data terkait dengan kelompok rentan dalam pemilu.
- 11) Mengembangkan materi sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan akses bagi setiap kelompok rentan. Materi tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Birch, S. (2011). *Electoral Malpractice*. New York: Oxford University Press.
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014). *Electoral Management Design*. International IDEA.
- Dahl, R. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale: Yale University.
- Dahl, R. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale: Yale University.
- Foundation, K. A. (2012). *Deepening Democracy: A Strategy for Improving The Integrity of Elections Worldwide*. Kofi Annan Foundation.
- James, T., Garnett, H., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. *International Political Science Review*, 40(3), 295-312.
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction. *International Political Science Review*, 23(1), 5-27.
- Norris, P. (2013). The New Research Agenda Studying Electoral Integrity. *Electoral Studies*, 32(4), 563-575.
- Norris, P. (2019). Do perceptions of electoral malpractice undermine democratic satisfaction? The US in comparative perspective. *International Political Science Review*, 40(1), 5-22.
- Norris, P., & Groemping, M. (2019). *Electoral Integrity Worldwide*. Sydney: University of Sydney.
- Schmitter, P., & Karl, T. (1991). What Democracy is ... and is Not. *Journal of Democracy*.
- Simpser, A. (2013). *Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sukmajati, Mada; Perdana, Aditya. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU RI.

Lampiran

A. DATA IKP PROVINSI

NO	PROVINSI	Skor IKP 2024	Kategori IKP Politik	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaran Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
1	ACEH	38,05879974	Sedang	51,56000137	Sedang	63,52000046	Sedang	0	Rendah	0	Sedang
2	BALI	52,74620056	Sedang	51,56000137	Sedang	55,25	Sedang	71,31999969	Sedang	0	Sedang
3	BANTEN	66,53350067	Sedang	66,87999725	Sedang	69,43000031	Tinggi	57,97000122	Sedang	0	Sedang
4	BENGKULU	3,78500086	Rendah	8,220000267	Rendah	4,11999986	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	43,0184021	Sedang	75,87000275	Tinggi	0	Rendah	55,33000183	Sedang	87,01000214	Tinggi
6	DKI JAKARTA	88,95320129	Tinggi	78,26999664	Tinggi	92,36000061	Tinggi	96,08999634	Tinggi	87,01000214	Tinggi
7	GORONTALO	45,4396019	Sedang	65,37000275	Sedang	29,94000053	Sedang	65,65000153	Sedang	0	Sedang
8	JAMBI	12,03299999	Rendah	22,39999962	Sedang	0	Rendah	23,94000053	Sedang	0	Sedang
9	JAWA BARAT	77,04460144	Tinggi	74,91000366	Sedang	83,37999725	Sedang	83,70999908	Tinggi	42,06999969	Sedang
10	JAWA TENGAH	34,83459854	Sedang	0	Rendah	91,66999817	Tinggi	0	Rendah	0	Sedang
11	JAWA TIMUR	14,7409991	Rendah	0	Rendah	38,77000046	Sedang	0,02999999	Rendah	0	Sedang
12	KALIMANTAN BARAT	12,69220066	Rendah	39,38000107	Sedang	5,420000076	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
13	KALIMANTAN SELATAN	53,34790039	Sedang	66,95999908	Sedang	63,74000163	Sedang	44,18999863	Sedang	0	Sedang
14	KALIMANTAN TENGAH	18,77200127	Rendah	0	Rendah	49,40000153	Sedang	0	Rendah	0	Sedang
15	KALIMANTAN TIMUR	74,03849792	Tinggi	72,69999695	Sedang	100	Tinggi	53,27000046	Sedang	30,92000008	Sedang
16	KALIMANTAN UTARA	20,35700035	Rendah	14,53999996	Rendah	17,23999977	Rendah	39,52000046	Sedang	0	Sedang
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	29,88509941	Sedang	16,01000023	Rendah	15,22999954	Rendah	79,09999847	Tinggi	0	Sedang

A. DATA IKP PROVINSI

NO	PROVINSI	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori DI	Skor Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Kontestasi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
18	KEPULAUAN RIAU	40,33319855	Sedang	0	Rendah	60,93999863	Sedang	33,90000153	Sedang	87,01000214	Tinggi
19	LAMPUNG	64,60779572	Sedang	42,41999817	Sedang	81,12999725	Sedang	89,30000305	Tinggi	0	Sedang
20	MAULUKU	53,66930054	Sedang	60,29000092	Sedang	72,44999695	Sedang	39,52000046	Sedang	0	Sedang
21	MALUKU UTARA	84,86240387	Tinggi	100	Tinggi	86,48000336	Sedang	100	Tinggi	0	Sedang
22	NUSA TENGGARA BARAT	11,09049988	Rendah	22,39999962	Sedang	0	Rendah	20,1700008	Sedang	0	Sedang
23	NUSA TENGGARA TIMUR	56,74570084	Sedang	37,75	Sedang	77,13999939	Sedang	68,95999908	Sedang	0	Sedang
24	PAPUA	57,27469853	Sedang	80,52999878	Tinggi	63,20999908	Sedang	20,15999985	Sedang	64,72000122	Tinggi
25	PAPUA BARAT	53,48049927	Sedang	72,35000183	Sedang	55,77999878	Sedang	51,02000046	Sedang	0	Sedang
26	RIAU	62,58580017	Sedang	64,63999939	Sedang	77,34999847	Sedang	62,95999908	Sedang	0	Sedang
27	SULAWESI BARAT	43,43799973	Sedang	22,29000092	Sedang	62,93999863	Sedang	54,00999832	Sedang	0	Sedang
28	SULAWESI SELATAN	10,20039967	Rendah	37,77999878	Sedang	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
29	SULAWESI TENGAH	52,90010071	Sedang	55,40999985	Sedang	63,68000031	Sedang	20,15999985	Sedang	87,01000214	Tinggi
30	SULAWESI TENGGARA	38,31520081	Sedang	28,63999939	Sedang	80,48000336	Sedang	0	Rendah	0	Sedang
31	SULAWESI UTARA	87,48459625	Tinggi	89,58000183	Tinggi	91,59999847	Tinggi	73,95999908	Tinggi	100	Tinggi
32	SUMATERA BARAT	39,68309784	Sedang	34,04000092	Sedang	56,20999908	Sedang	36,52999878	Sedang	0	Sedang
33	SUMATERA SELATAN	35,07450104	Sedang	57,47000122	Sedang	22,02000046	Sedang	44,75999832	Sedang	0	Sedang
34	SUMATERA UTARA	55,43490219	Sedang	72,61000061	Sedang	94,29000092	Tinggi	0	Rendah	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
1. ACEH BARAT	KABUPATEN ACEH	15,6460046	Sedang	0	Rendah	32,72000122	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
1. ACEH MERIAH	KABUPATEN BENER MERIAH	14,35479927	Sedang	0	Rendah	37,07999908	Sedang	0,10000001	Sedang	0	Sedang
1. ACEH BARAT DAYA	KABUPATEN ACEH	19,45670128	Sedang	22,69000053	Sedang	35,08000183	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
1. ACEH LUHS	KABUPATEN GAYO LUHS	26,04700089	Sedang	20,22999954	Sedang	41,08000183	Sedang	17,1700008	Sedang	6,820000172	Sedang
1. ACEH JAYA	KABUPATEN PIDIE JAYA	24,90810013	Sedang	24,3199969	Sedang	41,84000015	Sedang	9,770000458	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	26,86250114	Sedang	26,45000076	Sedang	23,70000076	Sedang	42,86000061	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	30,25779915	Sedang	31,28000069	Sedang	37,18999863	Sedang	30,71999931	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KOTA LANGSA	25,28079987	Sedang	28,15999985	Sedang	46,52000046	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
1. ACEH UTARA	KABUPATEN ACEH	26,68729973	Sedang	7,34999905	Sedang	56,56000137	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN BIREUEN	32,27799988	Sedang	10,65999985	Sedang	49,9999908	Sedang	41,65999985	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	30,4430998	Sedang	31,77000046	Sedang	57,54000092	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN ACEH TAMBIANG	23,68160057	Sedang	0	Rendah	62,31999969	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	33,21569851	Sedang	51,93999863	Sedang	42,06000137	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KOTA SABANG	37,36310196	Sedang	16,97999954	Sedang	45,20000076	Sedang	62,40999985	Tinggi	0	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	37,52000046	Sedang	48,77999878	Sedang	55,63000107	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	36,71070099	Sedang	47,13000107	Sedang	63,11999893	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	37,22719955	Sedang	21,88999939	Sedang	32,63000107	Sedang	75,66999817	Tinggi	0	Sedang
1. ACEH	KOTA BANDA ACEH	36,27799988	Sedang	0	Rendah	51,59999847	Sedang	74,68000031	Tinggi	0	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	53,0257988	Tinggi	45,95000076	Sedang	76,61000061	Tinggi	46,02999878	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
1. ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	57,74620056	Tinggi	32,56999669	Sedang	90,26000214	Tinggi	58,50999832	Tinggi	0,25999999	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	26,06140001	Sedang	96,51999664	Tinggi	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	67,06690216	Tinggi	58,15999985	Tinggi	76,58999634	Tinggi	88,83000183	Tinggi	0,51999981	Sedang
1. ACEH	KABUPATEN PIDIE	61,79879761	Tinggi	25,99999098	Sedang	94,91999817	Tinggi	74,41999817	Tinggi	1,14999976	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	3,761100054	Rendah	13,9300031	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	13,97259988	Sedang	0	Rendah	36,77000046	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KOTA METRO	16,42270088	Sedang	0	Rendah	36,79000092	Sedang	9,770000458	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	14,82820034	Sedang	29,23999977	Sedang	18,1800031	Sedang	0,10000001	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	18,41480064	Sedang	30,02000046	Sedang	27,12999916	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	14,37260056	Sedang	35,88000107	Sedang	0	Rendah	18,73999977	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	12,74940014	Rendah	47,22000122	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	32,93579865	Sedang	28,62000084	Sedang	44,68000031	Sedang	32,91999817	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	32,9029007	Sedang	39,75999832	Sedang	49,29000092	Sedang	13,75	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN PEKALONGAN	35,44849777	Sedang	41,84999847	Sedang	63,54999924	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	38,21290207	Sedang	11,01000023	Sedang	84,29000092	Tinggi	12,84000015	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEwu	43,22219849	Sedang	46,79999924	Sedang	80,48999786	Tinggi	0	Sedang	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	54,65039825	Tinggi	53,93000031	Sedang	50,36000061	Sedang	83,80999756	Tinggi	0	Sedang
10. LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	41,707901	Sedang	95,62999725	Tinggi	6,55999943	Rendah	53,58000183	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori Penyeleksian Pemilu	Skor Dimensi Kontestasi D1	Kategori Kontestasi D2	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
10. LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	62,89630127	Tinggi	38,52999878	Sedang	92,88999939	Tinggi	2	Sedang	
11. BANTEN	KABUPATEN SERANG	33,24559784	Sedang	15,71000004	Sedang	48,02999878	Sedang	43,00999832	Sedang	0
11. BANTEN	KOTA CILEGON	34,49729919	Sedang	42,7399954	Sedang	45,54000092	Sedang	14,6199989	Sedang	0
11. BANTEN	KOTA TANGERANG	29,37389946	Sedang	31,61000061	Sedang	54,84000015	Sedang	0	Sedang	0
11. BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	42,3083992	Sedang	45,45999908	Sedang	70,58999634	Tinggi	12,84000015	Sedang	0
11. BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	34,15930176	Sedang	11,01000023	Sedang	82,06999669	Tinggi	0	Sedang	0
11. BANTEN	KOTA SERANG	53,32019806	Tinggi	20,84000015	Sedang	84,43000031	Tinggi	62,43999863	Tinggi	0
11. BANTEN	KABUPATEN LEBAK	58,77680206	Tinggi	29,5	Sedang	93,86000061	Tinggi	60,58000183	Tinggi	0
11. BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	77,73999785	Tinggi	80,09999847	Tinggi	82,84999847	Tinggi	98,51999664	Tinggi	0
12. JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	11,95990019	Rendah	11,01000023	Sedang	23,63999939	Sedang	0	Sedang	0
12. JAWA BARAT	KOTA DEPOK	13,21520042	Rendah	9,96000038	Sedang	27,70000076	Sedang	0	Sedang	0
12. JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	14,55439949	Sedang	6,55999943	Rendah	33,63999939	Sedang	0	Sedang	0
12. JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	18,65180016	Sedang	19,48999977	Sedang	34,15000053	Sedang	1,64999976	Sedang	0
12. JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	21,40909958	Sedang	15,71000004	Sedang	36,72999954	Sedang	12,84000015	Sedang	0
12. JAWA BARAT	KOTA BOGOR	21,54820061	Sedang	5,53000021	Rendah	24,02000046	Sedang	43,70999908	Sedang	0
12. JAWA BARAT	KOTA BANJAR	19,833180046	Sedang	24,84000015	Sedang	0	Rendah	52,5	Sedang	0
12. JAWA BARAT	KOTA CIMahi	26,17309952	Sedang	9,77999973	Sedang	55,5	Sedang	9,77000058	Sedang	0
12. JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	30,73010063	Sedang	46,04000092	Sedang	36,86000061	Sedang	17,1700008	Sedang	0
12. JAWA BARAT	KOTA CIREBON	28,45170021	Sedang	31,53000069	Sedang	52,47000122	Sedang	0	Sedang	0
12. JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	32,63869858	Sedang	44,31000137	Sedang	32,75	Sedang	32,91999817	Sedang	0

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

Provinsi	Kabupaten_Kota	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
12. JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	30,74839973	Sedang	45,84999847	Sedang	39,77999878	Sedang	13,01000023	Sedang	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	36,22599792	Sedang	35,66999817	Sedang	52,5200046	Sedang	26,54999924	Sedang	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	31,65629959	Sedang	54,84999847	Sedang	12,10999966	Rendah	48,97999954	Sedang	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	38,94720078	Sedang	45,95000076	Sedang	23,63999939	Sedang	70,23000036	Tinggi	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	46,2959017	Sedang	41,34000015	Sedang	47,02000046	Sedang	69,06999969	Tinggi	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	46,09249878	Sedang	31,45000076	Sedang	64,94999695	Sedang	51,68000031	Sedang	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	45,83360291	Sedang	43,63999939	Sedang	68,66000366	Tinggi	31,84000015	Sedang	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	51,09869766	Tinggi	38,08000183	Sedang	70,66999817	Tinggi	55,84999847	Tinggi	0	Sedang
12. JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	59,93470001	Tinggi	71,76000214	Tinggi	62,90000153	Sedang	66,62999725	Tinggi	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	51,28010178	Tinggi	20,22999954	Sedang	88,65000153	Tinggi	48,41999817	Sedang	0,25999999	Sedang
12. JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	50,6529007	Tinggi	23,35000038	Sedang	85,18000031	Tinggi	47,91999817	Sedang	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KOTA BEKASI	55,48420334	Tinggi	13,93000031	Sedang	92,12000275	Tinggi	66,87000275	Tinggi	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	64,79419708	Tinggi	49,09000015	Sedang	83,48000336	Tinggi	79,26999664	Tinggi	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	65,42389679	Tinggi	88,66999817	Tinggi	76,05999847	Tinggi	50,25999832	Sedang	0	Sedang
12. JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	67,13950348	Tinggi	54,06999969	Sedang	74,62000275	Tinggi	56,74000168	Tinggi	100	Tinggi
12. JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	91,58865934	Tinggi	100	Tinggi	92,29000092	Tinggi	90,99999786	Tinggi	67,70999908	Tinggi
13. DKI JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	9,402500153	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	37,61000061	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
13. DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	26,888339912	Sedang	50,656399817	Sedang	0	Rendah	52,83000183	Sedang	0	Sedang
13. DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	38,060959863	Sedang	32,159399817	Sedang	34,563999669	Sedang	64,97000122	Tinggi	0	Sedang
13. DKI JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	32,93170166	Sedang	6,96000038	Sedang	21,75	Sedang	91,15000153	Tinggi	0	Sedang
13. DKI JAKARTA	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	43,25220108	Sedang	81,36000061	Tinggi	0	Rendah	85,13999939	Tinggi	0	Sedang
13. DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	65,14489746	Tinggi	31,3700084	Sedang	87,15000153	Tinggi	87,81999969	Tinggi	16,03000069	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	2,419493874	Rendah	7,349999905	Sedang	0	Rendah	1,7400001	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	12,551659964	Rendah	6,36000038	Sedang	27	Sedang	1,64999976	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	19,14570045	Sedang	8,119999886	Sedang	34,40999985	Sedang	15,51000023	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	22,01440048	Sedang	0	Rendah	45,63000107	Sedang	18,70000076	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBogan	22,89299965	Sedang	13,93000031	Sedang	43,88000107	Sedang	9,82999924	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	22,8586998	Sedang	33,63999939	Sedang	16,68000031	Sedang	29,77000046	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	20,80249977	Sedang	10,48399977	Sedang	47,25000092	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN CIACAP	24,4817009	Sedang	0	Rendah	44,84000015	Sedang	29,77000046	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	25,68770027	Sedang	34,09000015	Sedang	34,93000031	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	28,38419914	Sedang	15,71000004	Sedang	40,25	Sedang	35,38999939	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	16,04400063	Sedang	7,15000095	Sedang	0,20000003	Rendah	56,15000153	Tinggi	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	25,48200035	Sedang	34,38000107	Sedang	42,63000107	Sedang	0	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

Provinsi	Kabupaten_Kota	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyalenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	25,84620094	Sedang	23,02000046	Rendah	51,65999985	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	27,40460014	Sedang	0	Rendah	52,41999817	Sedang	29,94000053	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	30,30360949	Sedang	28,70999908	Sedang	50,90000153	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	31,19200134	Sedang	38,08000183	Sedang	46,58000183	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	30,81459999	Sedang	2,90000095	Rendah	39,31999969	Sedang	60,36000061	Tinggi	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	33,98579788	Sedang	8,11999986	Sedang	44,68000031	Sedang	59,25999983	Tinggi	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	34,16189957	Sedang	3,80999994	Rendah	57,88999939	Sedang	44,54000092	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	36,000419998	Sedang	39,75999982	Sedang	58,04999924	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	36,55509949	Sedang	53,27000046	Sedang	57,09000015	Sedang	0	Sedang	4,78000021	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	34,02000046	Sedang	33,34000015	Sedang	65,63999939	Sedang	0,300000012	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	53,25299835	Tinggi	63,91999817	Tinggi	61,91999817	Sedang	49,86000061	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	42,86000061	Sedang	13,30000019	Sedang	75,050000305	Tinggi	43	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	38,83580017	Sedang	15,71000004	Sedang	78,81999969	Tinggi	18,56999969	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	45,20660019	Sedang	46,99000168	Sedang	79,11000061	Tinggi	9,829999924	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	35,12919998	Sedang	6,96000038	Sedang	87,5	Tinggi	0	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	54,24869919	Tinggi	26,84000015	Sedang	66,62999725	Sedang	86,73000336	Tinggi	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	46,5810997	Sedang	16,85000038	Sedang	46,06999969	Sedang	99,30000305	Tinggi	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	49,08209991	Sedang	38,52999878	Sedang	93,30000305	Tinggi	12,85999962	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi Pemilu	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	58,34930038	Tinggi	96,75	Tinggi	76,35000061	Tinggi	12,84000015	Sedang	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	59,0522995	Tinggi	15,4200008	Sedang	94,52999878	Tinggi	75,87000275	Tinggi	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	70,19750214	Tinggi	99,69000244	Tinggi	64,48999786	Sedang	75,0999847	Tinggi	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	67,1110006	Tinggi	50,13999939	Sedang	98,13999939	Tinggi	65,12000275	Tinggi	0	Sedang
14. JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	73,25720215	Tinggi	57,05000137	Tinggi	86,44999995	Tinggi	100	Tinggi	0	Sedang
15. DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	30,54360008	Sedang	28,43000031	Sedang	36	Sedang	36,75	Sedang	0	Sedang
15. DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	29,96769905	Sedang	38,27000046	Sedang	31,45999808	Sedang	30,71999931	Sedang	0	Sedang
15. DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	41,41899877	Sedang	16,85000038	Sedang	54,1500053	Sedang	65,16099817	Tinggi	0	Sedang
15. DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	40,55340118	Sedang	21,54999924	Sedang	33,97999954	Sedang	85,69000244	Tinggi	2	Sedang
15. DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	64,55550385	Tinggi	12,01000023	Sedang	94,11000061	Tinggi	100	Tinggi	5,510000229	Sedang
16. JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	6,17300036	Rendah	0	Rendah	14,10000038	Rendah	3,25999999	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	10,4177995	Rendah	10,14000034	Sedang	0	Rendah	30,71999931	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	10,51720047	Rendah	15,85999966	Sedang	0	Rendah	24,94000053	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	11,7659006	Rendah	10,31000042	Sedang	23,63999939	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	13,17080021	Rendah	0	Rendah	34,65999985	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	13,73680019	Sedang	6,960000038	Sedang	27,02000046	Sedang	0	Sedang	15,89999962	Sedang
16. JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	14,78930026	Sedang	8,31000042	Sedang	12,78999996	Rendah	30,71999931	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	16,20779991	Sedang	15,42000008	Sedang	31,62999916	Sedang	0,100000001	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

Provinsi	Kabupaten_Kota	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
16. JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	16,52050018	Sedang	8,119999886	Sedang	36,61999893	Sedang	1,649999076	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	19,81570053	Sedang	6,560000038	Sedang	28,54999524	Sedang	28,35000038	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KOTA MALANG	22,12389946	Sedang	16,5699969	Sedang	38	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	22,62389862	Sedang	12,6700008	Sedang	42,09999847	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	22,89419937	Sedang	5,739999771	Rendah	24,93000031	Sedang	47,38000107	Sedang	0,25999999	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	25,80380165	Sedang	13,30000019	Sedang	42,06000137	Sedang	24,94000053	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	21,38229942	Sedang	13,14999962	Sedang	46,86000061	Sedang	0,10000001	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	21,04059982	Sedang	39,52000046	Sedang	1,78999962	Rendah	38,75999832	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	23,82309914	Sedang	15,71000004	Sedang	51,52999878	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	21,43449974	Sedang	5,110000134	Rendah	52,70999908	Sedang	0,10000001	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	33,87749863	Sedang	25,04999924	Sedang	40,54999524	Sedang	46,81999969	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	27,68079948	Sedang	12,5	Sedang	23,90999985	Sedang	60,38000107	Tinggi	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN MADUIN	33,34220123	Sedang	31,61000061	Sedang	27	Sedang	58,18999863	Tinggi	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNG AEGUNG	32,92180099	Sedang	23,02000046	Sedang	27,33999992	Sedang	61,58000183	Tinggi	0,25999999	Sedang
16. JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	32,95410156	Sedang	15,71000004	Sedang	34,97999954	Sedang	61,68000031	Tinggi	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN LEMBER	35,83099747	Sedang	44,09999847	Sedang	49,29999924	Sedang	20,76000023	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	41,11000979	Sedang	46,84999847	Sedang	40,41999817	Sedang	52,9999924	Sedang	0,25999999	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	43,29439926	Sedang	46,24000168	Sedang	60,41999817	Sedang	31,39999862	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	40,054199322	Sedang	19,610000611	Sedang	68,65000153	Tinggi	34,68999863	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KOTA BATU	44,45159912	Sedang	8,31000042	Sedang	74,83000183	Tinggi	55,09000015	Tinggi	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	51,16529846	Tinggi	29,42000008	Sedang	56,2799878	Sedang	80,01000214	Tinggi	18,32999992	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	46,44469833	Sedang	10,6599985	Sedang	60,04999924	Sedang	82,98999785	Tinggi	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	40,16379929	Sedang	28,52000046	Sedang	85,43000031	Tinggi	0	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	40,11949844	Sedang	25,04999924	Sedang	88,5	Tinggi	0	Sedang	0,25999999	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	48,0902977	Sedang	20,22999954	Sedang	87,63999939	Tinggi	37,29999924	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMBANG	52,19499969	Tinggi	72,44999695	Tinggi	79,44999695	Tinggi	9,770000458	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	64,100789542	Tinggi	77,69999695	Tinggi	75,2799878	Tinggi	57,68999863	Tinggi	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	56,207798	Tinggi	15,71000004	Sedang	72,97000122	Tinggi	96,164999695	Tinggi	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	63,4019989	Tinggi	96,81999669	Tinggi	66,76000214	Sedang	47,56000137	Sedang	0	Sedang
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	55,75600052	Tinggi	25,04999924	Sedang	100	Tinggi	43,97000122	Sedang	0	Sedang
17. KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	11,53040028	Rendah	8,31000042	Sedang	11,59000015	Rendah	19,53000069	Sedang	0	Sedang
17. KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	24,01819992	Sedang	31,85000038	Sedang	31,4899977	Sedang	13,81000042	Sedang	0	Sedang
17. KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	32,42240143	Sedang	42,40000153	Sedang	41,13000107	Sedang	21,37999916	Sedang	0	Sedang
17. KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	32,92609787	Sedang	37,5	Sedang	29,7199931	Sedang	46,02999878	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
17. KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	49,31840134	Sedang	46,13999939	Sedang	64,9199817	Sedang	40,40000153	Sedang	20,90999985	Tinggi
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	12,54959965	Rendah	6,96000038	Sedang	28,07999992	Sedang	0	Rendah	0	Sedang
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	14,33060074	Sedang	31,53000069	Sedang	0	Rendah	23,27000046	Sedang	0	Sedang
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYANG	20,06529999	Sedang	19,61000061	Sedang	38,86999893	Sedang	0	Rendah	0	Sedang
18. KALIMANTAN HULU	KABUPATEN KAPUAS	28,8553009	Sedang	2,90000095	Rendah	41,95999908	Sedang	42,15000153	Sedang	15,89999962	Sedang
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	24,89500046	Sedang	38,97000122	Sedang	36,61999893	Sedang	1,83000043	Sedang	0	Sedang
18. KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	25,43639946	Sedang	9,96000038	Sedang	24,44000053	Sedang	53,84000015	Sedang	0	Sedang
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	31,30470085	Sedang	20,95999908	Sedang	37,15000153	Sedang	40,68999863	Sedang	13,15600042	Sedang
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPBAWAH	29,43329811	Sedang	7,349999905	Sedang	38,50999832	Sedang	51,25999832	Sedang	0	Sedang
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	34,38899994	Sedang	31,69000053	Sedang	32,04000092	Sedang	54,63000107	Tinggi	0	Sedang
18. KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	30,29140091	Sedang	19,86000061	Sedang	31,79000092	Sedang	26,52000046	Sedang	62,18999863	Tinggi
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	38,31650162	Sedang	5,110000134	Rendah	69,41000366	Tinggi	30,71999931	Sedang	28,80999947	Tinggi

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	52,27170181	Tinggi	51,31999969	Sedang	57,81000137	Sedang	52,79000092	Sedang	32,5	Tinggi
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	47,19750214	Sedang	22,45999908	Sedang	69,41000366	Tinggi	59,02999878	Tinggi	0	Sedang
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	52,78300095	Tinggi	15,7100004	Sedang	64,66000366	Sedang	93,97000122	Tinggi	4,78000021	Sedang
19. KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BARITO TIMUR	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PIASAU	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	5,429700375	Rendah	20,11000061	Sedang	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKARAYA	5,848199844	Rendah	21,65999985	Sedang	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	9,579400063	Rendah	12,5	Sedang	7,880000114	Rendah	12,84000015	Sedang	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	10,82999992	Rendah	0	Rendah	28,5	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	12,19050026	Rendah	7,15000095	Sedang	27	Sedang	0	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaran Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	22,18239975	Sedang	39,40000153	Sedang	30,37999916	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	21,07959938	Sedang	0	Rendah	55,36999893	Sedang	0	Sedang	0,389999986	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	31,51959991	Sedang	43,15999985	Sedang	52,27999878	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	36,03720093	Sedang	64,86000061	Tinggi	48,75	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
19. KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	41,94060135	Sedang	42,13000107	Sedang	27	Sedang	79,30999756	Tinggi	4,78000021	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4,914000034	Rendah	18,20000076	Sedang	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	5,463100029	Rendah	20,22999954	Sedang	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	8,124000549	Rendah	18,20000076	Sedang	0	Rendah	12,84000015	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	8,145500183	Rendah	1,25	Rendah	12,10000038	Rendah	12,84000015	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	10,86639977	Rendah	18,20000076	Sedang	11,47999854	Rendah	0	Rendah	15,89999962	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNG SITOLI	11,09559986	Rendah	16	Sedang	17,82999992	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	11,09600067	Rendah	0	Rendah	29,20000076	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	11,63969994	Rendah	5,110000134	Rendah	27	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	12,31200027	Rendah	0	Rendah	32,40000153	Sedang	0	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	14,57999992	Sedang	16	Sedang	27	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	16,27739906	Sedang	6,96000038	Sedang	37,8899939	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	8,16469954	Rendah	15,7100004	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	39,2299954	Tinggi
2. SUMATERA UTARA	KOTA PADANG SIDEMPUAN	16,58810043	Sedang	11,01000023	Sedang	35,83000183	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	15,58550072	Sedang	0	Rendah	12,10000038	Rendah	43,95000076	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	16,3817997	Sedang	0	Rendah	43,11000061	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNGPALAI	20,11779976	Sedang	27,3199969	Sedang	33,52999878	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKKAK BHARAT	15,2299941	Sedang	39,20999908	Sedang	0	Rendah	18,5699959	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	22,79840088	Sedang	19,36000061	Sedang	46,24000168	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	23,46279907	Sedang	25,86000061	Sedang	43,36999893	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	24,94260025	Sedang	28,15999985	Sedang	45,63000107	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSIANTAR	29,53509903	Sedang	45,05999969	Sedang	32,13999939	Sedang	18,70000076	Sedang	4,78000021	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	23,9382	Sedang	9,239999771	Sedang	56,43000031	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	26,29799843	Sedang	25,95999908	Sedang	50,75999832	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	33,44340134	Sedang	44,86999893	Sedang	38,70000076	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	29,77260017	Sedang	42,84000015	Sedang	47,90999985	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	36,59220123	Sedang	38,02000046	Sedang	50,50999832	Sedang	12,84000015	Sedang	39,2299954	Tinggi

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	38,84860229	Sedang	30,02000046	Rendah	43,79000092	Sedang	54,5	Tinggi	4,78000021	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	32,51560211	Sedang	0	Rendah	67,62000275	Sedang	27,28000059	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	34,49189758	Sedang	19,48999977	Sedang	76,91999817	Tinggi	0	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	34,09930042	Sedang	5,11000034	Rendah	86,01999664	Tinggi	0,10000001	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	59,6487999	Tinggi	85,19000244	Tinggi	67,5	Sedang	43,99000168	Sedang	0	Sedang
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76,28700256	Tinggi	69,777999878	Tinggi	91,52999878	Tinggi	90,66000366	Tinggi	0	Sedang
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	6,215400219	Rendah	23,02000046	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALUNGAN	6,943200111	Rendah	12,18000031	Sedang	1,16999957	Rendah	12,84000015	Sedang	0	Sedang
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	8,366500037	Rendah	0	Rendah	13,5699969	Rendah	12,84000015	Sedang	0	Sedang
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BARITO KUALA	15,66549988	Sedang	20,46999931	Sedang	27,16999931	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	24,7056992	Sedang	20,11000061	Sedang	37,09999847	Sedang	12,84000015	Sedang	19,68000031	Tinggi
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	25,24160004	Sedang	16,43000031	Sedang	27	Sedang	26,4899977	Sedang	39,23999954	Tinggi
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	25,45510046	Sedang	11,01000023	Sedang	50,68000031	Sedang	12,69999962	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	27,3510901	Sedang	28,9699931	Sedang	51,1899863	Sedang	0	Sedang	0,769999981	Sedang
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	27,51140022	Sedang	26,26000023	Sedang	53,7400168	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	35,02070236	Sedang	60,65000153	Tinggi	35,2400168	Sedang	17,54000092	Sedang	8,68999958	Sedang
20. KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	42,99150085	Sedang	37,70000076	Sedang	69	Tinggi	26,37000084	Sedang	0	Sedang
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	65,51720428	Tinggi	36,5	Sedang	91,1900244	Tinggi	44,04000092	Sedang	100	Tinggi
20. KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	80,14250183	Tinggi	100	Tinggi	100	Tinggi	60,56999969	Tinggi	0	Sedang
21. KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	20,55340004	Sedang	37,16999817	Sedang	0	Rendah	42,06999969	Sedang	0	Sedang
21. KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	24,47489929	Sedang	32,40999985	Sedang	13,09000015	Rendah	43	Sedang	0	Sedang
21. KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	30,5318985	Sedang	32,00999832	Sedang	32,84000015	Sedang	37,63999939	Sedang	0	Sedang
21. KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	32,78930014	Sedang	19,73999977	Sedang	54,09999847	Sedang	27,56999969	Sedang	0	Sedang
21. KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	33,14369965	Sedang	31,53000069	Sedang	56,36999893	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
21. KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	38,20090103	Sedang	24,84000015	Sedang	53,31999669	Sedang	44,93000031	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
21. KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	39,48910141	Sedang	47,13000107	Sedang	46,04959924	Sedang	37,06000137	Sedang	0	Sedang
21. KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHKAMAH ULU	35,18640137	Sedang	13,9300031	Sedang	62,31000137	Sedang	30,98999977	Sedang	0	Sedang
21. KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	51,48579788	Tinggi	56,79999924	Tinggi	73,4599908	Tinggi	32,93999863	Sedang	0	Sedang
21. KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	50,32889938	Tinggi	51,59000015	Sedang	82,51999664	Tinggi	12,84000015	Sedang	18,3199969	Sedang
22. BALI	KABUPATEN BANGLI	11,76840019	Rendah	22,9099985	Sedang	12,2899996	Rendah	1,64999976	Sedang	0	Sedang
22. BALI	KABUPATEN KLUENGKUNG	19,73209953	Sedang	0	Rendah	22,9200008	Sedang	44,09000015	Sedang	0	Sedang
22. BALI	KOTA DENPASAR	20,83227005	Sedang	26,75	Sedang	35,79000092	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
22. BALI	KABUPATEN KARANGASEM	23,53969955	Sedang	38,52999878	Sedang	34,56999969	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
22. BALI	KABUPATEN GIANYAR	29,09309959	Sedang	8,119999886	Sedang	35,13999939	Sedang	54,18999863	Tinggi	0	Sedang
22. BALI	KABUPATEN TABANAN	34,00870132	Sedang	40,24000168	Sedang	21,53000069	Sedang	59,84999847	Tinggi	0	Sedang
22. BALI	KABUPATEN BUULENG	42,76490021	Sedang	15,71000004	Sedang	60,13999939	Sedang	62,68000031	Tinggi	0	Sedang
22. BALI	KABUPATEN BADUNG	45,93859863	Sedang	95,019999664	Tinggi	39,74000168	Sedang	0,300000012	Sedang	51,06999969	Tinggi
22. BALI	KABUPATEN JEMBRANA	49,08860179	Sedang	94,93000031	Tinggi	28,1299977	Sedang	50,90999985	Sedang	0	Sedang
23. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK UTARA	23,93169975	Sedang	30,02000046	Sedang	21,26000023	Sedang	30,98999977	Sedang	0	Sedang
23. NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	28,14070129	Sedang	32,49000168	Sedang	34,18000031	Sedang	25,52000046	Sedang	0	Sedang
23. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	19,02909851	Sedang	56,009999832	Tinggi	10,27999973	Rendah	0	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
23. NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	35,22809982	Sedang	33,02999878	Sedang	30,25	Sedang	59,25999832	Tinggi	0	Sedang
23. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	38,72829819	Sedang	49,43000031	Sedang	39,43999863	Sedang	41,58000183	Sedang	0	Sedang
23. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	25,70699883	Sedang	61,93999863	Tinggi	23,63999939	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
23. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	43,92189789	Sedang	53,41999817	Sedang	48,45000076	Sedang	44,34999847	Sedang	0	Sedang
23. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	41,29399872	Sedang	19,86000061	Sedang	86,11000061	Tinggi	12,84000015	Sedang	0	Sedang
23. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	61,22629929	Tinggi	58,81000137	Tinggi	92,26999664	Tinggi	41,13999939	Sedang	0	Sedang
23. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	67,5746994	Tinggi	36,63999939	Sedang	92,73000336	Tinggi	87,05000305	Tinggi	6,820000172	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN FLORES	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NGADA	1,379700065	Rendah	5,110000134	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	6,933099747	Rendah	9,779999733	Sedang	0	Rendah	17,1700008	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	8,480695939	Rendah	0	Rendah	4,88999866	Rendah	26,48999977	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	16,90520096	Sedang	0	Rendah	36,04000092	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyalenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SABU RAJUUA	16,20549965	Sedang	12,5	Sedang	4,84999905	Rendah	43,95000076	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	20,20359933	Sedang	0	Rendah	44,72000122	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN BELU	22,72830099	Sedang	22,5799992	Sedang	37,34000015	Sedang	9,770000458	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	22,86630058	Sedang	0	Rendah	31,26000023	Sedang	43,95000076	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBA BARAT	21,56710052	Sedang	33,11000061	Sedang	33,2299954	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TENGAH	KABUPATEN SUMBA TENGAH	22,26490021	Sedang	34,09000015	Sedang	34,36999893	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	27,96140099	Sedang	32,49000168	Sedang	33,06999969	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TENGAH UTARA	KABUPATEN TIMOR	20,2007994	Sedang	0	Rendah	53,15999985	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA BARAT DAYA	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	29,81649971	Sedang	28,06999969	Sedang	58,52000046	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	39,79079819	Sedang	51,75	Sedang	38,40999985	Sedang	44,88999939	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN LEMBATA	37,85350037	Sedang	5,110000134	Rendah	71,26000214	Tinggi	37,58000183	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	47,19530106	Sedang	28,52000046	Sedang	62,4799954	Sedang	63,00999832	Tinggi	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	51,82960129	Tinggi	66,70999908	Tinggi	38,63000107	Sedang	76,44999695	Tinggi	0,25999999	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NIUAU	28,98250008	Sedang	96,20999908	Tinggi	7,909999847	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	57,51609802	Tinggi	95,87000275	Tinggi	83,23999786	Tinggi	0	Sedang	0	Sedang
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	76,02570343	Tinggi	98,56999969	Tinggi	39,61000061	Sedang	97,44000244	Tinggi	100	Tinggi
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	63,0340004	Tinggi	32,95000076	Sedang	100	Tinggi	64,55000305	Tinggi	0	Sedang
25. BOLANGKO	KABUPATEN BONE	20,5059991	Sedang	12,5	Sedang	36,61999993	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
25. GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	19,3680003	Sedang	16	Sedang	39,59999847	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
25. GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	15,02869987	Sedang	11,01000023	Sedang	0,20000003	Rendah	47,91999817	Sedang	0	Sedang
25. GORONTALO	KABUPATEN POKHARUWATO	23,61610031	Sedang	22,35000038	Sedang	37,81999969	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
25. GORONTALO	KABUPATEN DALEMO	18,05610085	Sedang	13,93000031	Sedang	0	Rendah	57,18000031	Tinggi	0	Sedang
25. GORONTALO	KOTA GORONTALO	32,4756012	Sedang	10,65999985	Sedang	56,22999954	Sedang	32,91999817	Sedang	0	Sedang
26. SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	18,83329964	Sedang	44,61999893	Sedang	0,43000007	Rendah	26,48999977	Sedang	0	Sedang
26. SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	25,58780098	Sedang	40,11999893	Sedang	38,83000183	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
26. SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	26,53540039	Sedang	30,02000046	Sedang	48,5	Sedang	0	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
26-SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	31,59210014	Sedang	68,84999847	Tinggi	25,7700046	Sedang	12,8400015	Sedang	0	Sedang
26-SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	32,62360001	Sedang	50,8800107	Sedang	49,7000076	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
26-SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	33,695994	Sedang	45,0699969	Sedang	56,6599985	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
26-SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	45,1958996	Sedang	36,5	Sedang	53,33000183	Sedang	58,3899939	Tinggi	4,7800021	Sedang
26-SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	26,17280006	Sedang	77,87999725	Tinggi	13,5399996	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
26-SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	37,78160095	Sedang	45,3600061	Sedang	67,12999725	Sedang	0,10000001	Sedang	0	Sedang
26-SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	41,39260101	Sedang	77,31999969	Tinggi	53,99000168	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
26-SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	42,51139832	Sedang	37,5	Sedang	76,77999878	Tinggi	12,8400015	Sedang	0	Sedang
26-SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	50,54889908	Tinggi	75,5	Tinggi	41,2799978	Sedang	58,31000137	Tinggi	0	Sedang
26-SULAWESI UTARA	KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO	36,93005921	Sedang	94,22000122	Tinggi	30,23999977	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
26-SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	51,74849701	Tinggi	39,02999878	Sedang	90,62999725	Tinggi	0	Sedang	67,70999908	Tinggi
26-SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	54,0387001	Tinggi	72,15000153	Tinggi	90,73999786	Tinggi	0	Sedang	0,76999981	Sedang
27-SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	3,948200226	Rendah	0	Rendah	10,39000034	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
27-SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	23,05879974	Sedang	26,45999308	Sedang	24,45999308	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaran Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
27. SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	11,44799595	Rendah	42,40000153	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
27. SULAWESI BARAT	KABUPATEN MANUJU TENGAH	31,28159904	Sedang	33,63999939	Sedang	36,75999832	Sedang	32,91999817	Sedang	0	Sedang
27. SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	54,21070099	Tinggi	63,91999817	Tinggi	49,20999908	Sedang	73,01000214	Tinggi	0	Sedang
27. SULAWESI BARAT	KABUPATEN MANUJU	54,89910126	Tinggi	86,52999878	Tinggi	51,7000076	Sedang	47,56000137	Sedang	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BUOL	24,10980034	Sedang	34,75	Sedang	29,70999908	Sedang	13,75	Sedang	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	21,30529976	Sedang	41,5699969	Sedang	26,53000069	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	34,65209961	Sedang	24	Sedang	44,41999817	Sedang	45,16999817	Sedang	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	UNA-UNA	28,54400063	Sedang	18,2000076	Sedang	58	Sedang	0	Sedang	15,89999962	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN DONGGALA	36,26919937	Sedang	39,7000076	Sedang	58,79000092	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	42,75460052	Sedang	47,90000153	Sedang	56,81999969	Sedang	32,91999817	Sedang	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	41,65280151	Sedang	37,29999924	Sedang	75,11000061	Tinggi	12,15999985	Sedang	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	43,14609909	Sedang	72,11000061	Tinggi	59,27999978	Sedang	4,59999905	Sedang	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLITO LI	46,21699905	Sedang	71,33999934	Tinggi	61,79000092	Sedang	13,89999962	Sedang	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	56,37940216	Tinggi	58,34999847	Tinggi	75,98000336	Tinggi	47,00999832	Sedang	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	52,66270065	Tinggi	43,27000046	Sedang	48,45999908	Sedang	90,26000214	Tinggi	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI LAUT	46,64609909	Sedang	33,72000122	Sedang	35,09000015	Sedang	96,83000183	Tinggi	0	Sedang
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	67,77213974	Tinggi	42,68000031	Sedang	84,55999756	Tinggi	96,26000214	Tinggi	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PINrang	13,22450025	Rendah	15,71000004	Sedang	23,63959939	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	13,24250031	Rendah	20,11000061	Sedang	20,55999947	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	13,80889983	Sedang	27,3199969	Sedang	10,5	Rendah	9,770000458	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	15,34609985	Sedang	27,79000092	Sedang	5,55999943	Rendah	22,92000008	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJUH	20,42899895	Sedang	16,70999908	Sedang	24,45999908	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAIANG	20,60449982	Sedang	15,71000004	Sedang	43,06000137	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG	24,80439949	Sedang	0	Rendah	41,63000107	Sedang	35,93999863	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	27,92060089	Sedang	25,86000061	Sedang	33,43000031	Sedang	32,93999863	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	28,27129936	Sedang	42,7299954	Sedang	35,59000015	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	29,84000015	Sedang	42,40000153	Sedang	48,40000153	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	36,85910034	Sedang	42,95000076	Sedang	46,27000046	Sedang	30,71999931	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	30,48649979	Sedang	0	Rendah	62,7999924	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	36,51269913	Sedang	48,29999934	Sedang	44,34000015	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	32,3321991	Sedang	20,84000015	Sedang	61,83000183	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	30,25180054	Sedang	21,65999985	Sedang	64,22000122	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	42,70619965	Sedang	40,88000107	Sedang	51,11999893	Sedang	33,27999878	Sedang	39,22999954	Tinggi
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PANGAIENDE DAN KEPULAUAN	34,99769974	Sedang	60,31000137	Tinggi	40,79999924	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyalenggaran Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	38,47399902	Sedang	65,58000183	Tinggi	31,97999954	Sedang	34,45999908	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	39,55210114	Sedang	42,95000076	Sedang	65,12000275	Sedang	12,94000015	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	40,42169952	Sedang	69,77999878	Tinggi	37,22000122	Sedang	29,75	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	41,5880127	Sedang	48,08000183	Sedang	74,94000244	Tinggi	0	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KOTA PARAPARE	54,59419861	Tinggi	82,02999878	Tinggi	56,47000122	Sedang	44,34999847	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	49,37609863	Tinggi	82,47000122	Tinggi	71,33999634	Tinggi	0	Sedang	0	Sedang
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	63,19260025	Tinggi	74,63999939	Tinggi	51,45999908	Sedang	93,94000244	Tinggi	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	3,98239994	Rendah	0	Rendah	10,47999954	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	13,23270035	Rendah	11,01000023	Sedang	27	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	15,07000037	Sedang	12,5	Sedang	24,35000038	Sedang	9,770000458	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	17,8932991	Sedang	13,93000031	Sedang	37,18999863	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	16,39999962	Sedang	29,23999977	Sedang	2,53999962	Rendah	30,15999985	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	22,27729988	Sedang	33,02999878	Sedang	35,09000015	Sedang	0,10000001	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN	24,03190041	Sedang	35,52999878	Sedang	29,51000023	Sedang	12,89999962	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHUNTO	19,12189865	Sedang	42,72999954	Sedang	19,95999908	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	35,96310043	Sedang	21,54999924	Sedang	57,66999817	Sedang	32,91999817	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	40,02869797	Sedang	29,23999977	Sedang	54,27999878	Sedang	46,02999878	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	37,99100113	Sedang	33,63999939	Sedang	37,88999939	Sedang	58,04000092	Tinggi	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	40,13159943	Sedang	37,04000092	Sedang	48,15999985	Sedang	47,31999959	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	38,8042984	Sedang	44,77000046	Sedang	52,52999878	Sedang	27,02000046	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	31,72589874	Sedang	24,53000069	Sedang	66,05999756	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	41,80410004	Sedang	24,95000076	Sedang	67,51999664	Sedang	37,63999939	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	40,1957016	Sedang	49,13000107	Sedang	70,87000275	Tinggi	0	Sedang	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	44,16530238	Sedang	31,20000076	Sedang	42,25999832	Sedang	78,73000336	Tinggi	0	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	52,65990067	Tinggi	38,20999908	Sedang	82,73999786	Tinggi	43	Sedang	1,519999981	Sedang
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	63,96049881	Tinggi	63,91999817	Tinggi	83,16999817	Tinggi	60,38999939	Tinggi	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE	2,14109993	Rendah	7,929999828	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON UTARA	6,27479924	Rendah	23,23999977	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON TENGAH	8,60459935	Rendah	19,97999524	Sedang	0	Rendah	12,84000015	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	8,836500168	Rendah	31,20000076	Sedang	0	Rendah	1,649999976	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	17,21509933	Sedang	20,84000015	Sedang	29,4099985	Sedang	1,649999976	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	23,63280106	Sedang	16,56999969	Sedang	27,78000069	Sedang	34,40999985	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	22,45970154	Sedang	36,09000015	Sedang	33,33000183	Sedang	0,200000003	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	19,47210121	Sedang	0,50999999	Rendah	50,88000107	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	23,83889961	Sedang	48,34999847	Sedang	28,37999916	Sedang	0	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	25,27610016	Sedang	48,61000061	Sedang	23,53000069	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	25,85740089	Sedang	19,73999977	Sedang	54,02000046	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA	41,16429901	Sedang	20,71999931	Sedang	53,97999954	Sedang	60,22999954	Tinggi	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KOTA BAUBAU	46,26740265	Sedang	53,31000137	Sedang	60,99000168	Sedang	34,79000092	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	49,91279984	Tinggi	53,65999817	Sedang	65,12999725	Sedang	42,68999863	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE UTARA	41,15599823	Sedang	66,19000244	Tinggi	60,18999863	Sedang	1,64999976	Sedang	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE SELATAN	50,67649841	Tinggi	64,95999908	Tinggi	50,95999908	Sedang	55,09000015	Tinggi	0	Sedang
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATobi	52,73270035	Tinggi	93,54000092	Tinggi	54,88000107	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang
31. MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	26,2367924	Sedang	25,86000051	Sedang	50,66999817	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
31. MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	22,17630086	Sedang	33,72000122	Sedang	0	Rendah	52,29000092	Sedang	0	Sedang
31. MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	30,28619957	Sedang	11,01000023	Sedang	54,45000076	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang
31. MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	32,615014	Sedang	23,23999977	Sedang	51,88999939	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang
31. MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	35,31430054	Sedang	39,02999878	Sedang	44,99000168	Sedang	30,71999931	Sedang	0	Sedang
31. MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU TALIBAU	43,68170166	Sedang	47,84000015	Sedang	47,47999954	Sedang	56,29000092	Tinggi	0	Sedang
31. MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SUSA	46,24469757	Sedang	68,69999695	Tinggi	33,63999939	Sedang	59,65000153	Tinggi	0	Sedang
31. MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	47,417202	Sedang	71,31999969	Tinggi	65,66000366	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
31. MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	64,19229389	Tinggi	76,06999969	Tinggi	65,68000031	Sedang	74,77999878	Tinggi	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
31. MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	75,30089569	Tinggi	93,84999847	Tinggi	72,43000031	Tinggi	87,83999634	Tinggi	4,78000021	Sedang
32. MALUKU BARAT DAYA	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	1,879199982	Rendah	6,36000038	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
32. MALUKU	KABUPATEN BURU	2,640599966	Rendah	9,779999733	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
32. MALUKU	KOTA AMBON	2,878200054	Rendah	10,65999985	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
32. MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	10,39099979	Rendah	20,84000015	Sedang	4,090000153	Rendah	12,84000015	Sedang	0	Sedang
32. MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	10,81099987	Rendah	0	Rendah	28,45000076	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
32. MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	14,21740055	Sedang	17,12000084	Sedang	25,25	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
32. MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	15,6868	Sedang	18,71999931	Sedang	27,91999954	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
32. MALUKU	KOTA TUAL	29,02759933	Sedang	23,89999962	Sedang	23,67000008	Sedang	54,31999969	Tinggi	0	Sedang
32. MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	22,52200017	Sedang	0	Rendah	59,27000046	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
32. MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	34,96789932	Sedang	29,77000046	Sedang	31,25	Sedang	60,22000122	Tinggi	0	Sedang
32. MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	39,22710037	Sedang	13,93000031	Sedang	80,69999695	Tinggi	12,84000015	Sedang	15,89999962	Sedang
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK BINTUNI	12,14680004	Rendah	6,96000038	Sedang	27,02000046	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN SORONG	12,36439991	Rendah	2,90000095	Rendah	22,03000069	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN SORONG SELATAN	13,2371006	Rendah	7,929999828	Sedang	29,20000076	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	13,49870014	Sedang	11,01000023	Sedang	27,70000076	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI	10,54380008	Rendah	23,45999908	Sedang	2,63000014	Rendah	12,84000015	Sedang	0	Sedang
33. PAPUA BARAT	KOTA SORONG	19,34110069	Sedang	0	Rendah	33,47000122	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyalenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK WONDAMA	18,69129944	Sedang	7,15000095	Sedang	35,65999885	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN KAIMANA	19,64422009	Sedang	19,73999977	Sedang	37,68000031	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN MAYBIRAT	22,76250076	Sedang	32,33000183	Sedang	36,93000031	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN TAMBRAUW	27,28440094	Sedang	34,68000031	Sedang	47,15999885	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	26,95400047	Sedang	18,20000076	Sedang	58	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN RAJA AMPAT	40,27080154	Sedang	59,58000183	Tinggi	27,04000092	Sedang	34,47999954	Sedang	52,88999939	Tinggi
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN FAFAK	61,03900146	Tinggi	65,08000183	Tinggi	48,33000183	Sedang	100	Tinggi	1,01999981	Sedang
34. PAPUA KABUPATEN DOGAI AI	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang	0
34. PAPUA KABUPATEN SUPIORI	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang	0
34. PAPUA JAYA	KABUPATEN LANNY	1,879199982	Rendah	6,96000038	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
34. PAPUA YAHUKIMO	KABUPATEN 3.84470098	Rendah	13,93000031	Sedang	0,21999999	Rendah	0	Rendah	0	Sedang	0
34. PAPUA KABUPATEN BIAK NUMFOR	16,07590103	Sedang	10,82999992	Sedang	34,61000061	Sedang	0	Sedang	0	Sedang	0
34. PAPUA KABUPATEN KEEROM	16,53030014	Sedang	12,01000023	Sedang	29,56999969	Sedang	0	Sedang	20,51000023	Tinggi	0
34. PAPUA KABUPATEN DEIYAI	17,06780052	Sedang	6,96000038	Sedang	39,9700122	Sedang	0	Sedang	0	Sedang	0
34. PAPUA DIGOEL	KABUPATEN BOVEN 20,4538002	Sedang	19,36000061	Sedang	40,06999969	Sedang	0	Sedang	0	Sedang	0
34. PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	22,8550145	Sedang	46,24000168	Sedang	27,29000092	Sedang	0	Sedang	0	Sedang	0
34. PAPUA MERAuke	KABUPATEN 30,18480011	Sedang	37,183000183	Sedang	23,63999939	Sedang	43,95000076	Sedang	0	Sedang	0
34. PAPUA WAROPEN	29,89079857	Sedang	41,79999924	Sedang	48,95999908	Sedang	0	Sedang	0	Sedang	0

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
34. PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	34,22023877	Sedang	27,0300069	Sedang	57,18999663	Sedang	20,7600023	Sedang	0	Sedang
34. PAPUA	KABUPATEN PANIAI	30,18239975	Sedang	57,7000076	Tinggi	38,4300031	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
34. PAPUA	KABUPATEN PUNCAK JAYA	39,8970126	Sedang	18,2000076	Sedang	58,95000168	Sedang	50,27000046	Sedang	0	Sedang
34. PAPUA	KABUPATEN ASMAT	49,46929932	Tinggi	38,20999908	Sedang	71,91999817	Tinggi	37,29999924	Sedang	24,9799954	Tinggi
34. PAPUA	KABUPATEN MINIMAKA	61,17639923	Tinggi	61,8400015	Tinggi	58,86999693	Sedang	61	Tinggi	68,58999634	Tinggi
34. PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	59,67963894	Tinggi	62,04999924	Tinggi	67,73999786	Sedang	68,73999786	Tinggi	0	Sedang
34. PAPUA	KABUPATEN NDUGA	59,55330005	Tinggi	62,95000076	Tinggi	48,31000137	Sedang	63,84000015	Tinggi	82,37000275	Tinggi
34. PAPUA	KOTA JAYAPURA	56,64049911	Tinggi	61,72999554	Tinggi	89,1800031	Tinggi	12,84000015	Sedang	28,75	Tinggi
34. PAPUA	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	64,93380029	Tinggi	47,90000153	Sedang	74,7600014	Tinggi	85,94000244	Tinggi	21,05999947	Tinggi
34. PAPUA	KABUPATEN SARMI	54,33650208	Tinggi	47,13000107	Sedang	97,33000183	Tinggi	12,84000015	Sedang	14,15999985	Sedang
34. PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	78,04640198	Tinggi	94,83000183	Tinggi	89,2099908	Tinggi	74,16999817	Tinggi	0	Sedang
34. PAPUA	KABUPATEN MAPPÍ	87,13059998	Tinggi	96,91999817	Tinggi	92,54000092	Tinggi	66,22000122	Tinggi	42,41999817	Tinggi
34. PAPUA	KABUPATEN PUNCAK TOLIKARA	63,23040009	Tinggi	100	Tinggi	50,08000183	Sedang	68,80000305	Tinggi	0	Sedang
34. PAPUA	KABUPATEN NABIRE	72,50669751	Tinggi	60,22000122	Tinggi	90,61000061	Tinggi	47,27000046	Sedang	100	Tinggi
34. PAPUA	KABUPATEN YALIMO	85,56000366	Tinggi	68,62000275	Sedang	100	Tinggi	5,690000057	Sedang	33,5	Tinggi
34. PAPUA	KABUPATEN INTAN JAYA	100	Tinggi	100	Tinggi	100	Tinggi	100	Tinggi	61,86999939	Tinggi
34. PAPUA	KABUPATEN JAYAWIAYA	100	Tinggi	100	Tinggi	100	Tinggi	100	Tinggi	100	Tinggi
4. RIAU	KABUPATEN KAMPAR	13,50669981	Sedang	7,34999905	Sedang	31,4899977	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
4. RIAU	KABUPATEN SIAK	23,67059975	Sedang	30,02000046	Sedang	33,04000092	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
4. RIAU	KABUPATEN INDRAGRI HULU	24,72729984	Sedang	38,59000015	Sedang	29,20000076	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
4. RIAU	KOTA DUMAI	17,56110001	Sedang	47,65000107	Sedang	0	Rendah	18,70000076	Sedang	0,25999999	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegeraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
4. RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	32,46590042	Sedang	23,45999908	Sedang	51,34000015	Sedang	26,48999977	Sedang	0	Sedang
4. RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	37,06639862	Sedang	33,86599983	Sedang	44,29999924	Sedang	44,34999847	Sedang	0	Sedang
4. RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	39,50659943	Sedang	29,68000031	Sedang	49,150000153	Sedang	51,15999985	Sedang	0,25999999	Sedang
4. RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	32,11899948	Sedang	18,45999908	Sedang	62,95999908	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
4. RIAU	KABUPATEN INDRAJALI	40,21530151	Sedang	42,56999969	Sedang	63,27999978	Sedang	18,70000076	Sedang	0	Sedang
4. RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	41,08660126	Sedang	66,95999908	Tinggi	31,2299954	Sedang	44,56000137	Sedang	0	Sedang
4. RIAU	KABUPATEN PELAWAAN	40,17679977	Sedang	34,68000031	Sedang	72,63999939	Tinggi	12,84000015	Sedang	0	Sedang
4. RIAU	KOTA PEKANBARU	33,61100006	Sedang	24,73999977	Sedang	28,34000015	Sedang	27,95999908	Sedang	91,72000122	Tinggi
5. KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	8,355199814	Rendah	0	Rendah	13,53999996	Rendah	12,84000015	Sedang	0	Sedang
5. KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	22,04829979	Sedang	15,85999966	Sedang	16,17000008	Rendah	43,00999832	Sedang	8,58999958	Sedang
5. KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	29,35079956	Sedang	26,54999924	Sedang	38,55999985	Sedang	26,48999977	Sedang	8,58999958	Sedang
5. KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	26,56539917	Sedang	0	Rendah	54,72999954	Sedang	21,15999985	Sedang	4,78000021	Sedang
5. KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	37,73329926	Sedang	42,18000031	Sedang	50,59000015	Sedang	26,56999969	Sedang	4,78000021	Sedang
5. KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	38,19829941	Sedang	36,02000046	Sedang	33,33000183	Sedang	63,22999954	Tinggi	0	Sedang
5. KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	39,98049927	Sedang	14,84000015	Sedang	65,48999786	Sedang	44,34999847	Sedang	0	Sedang
6. JAMBI	KABUPATEN TEBO	4,374100208	Rendah	5,110000134	Rendah	7,880000114	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
6. JAMBI	KABUPATEN BUNGGO	4,963400364	Rendah	18,20000076	Sedang	0,12999995	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
6. JAMBI	KABUPATEN MEHANGIN	19,89480019	Sedang	16,97999954	Sedang	40,29000092	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
6. JAMBI	KOTA JAMBI	22,94840005	Sedang	26,84000015	Sedang	41,31999969	Sedang	0	Sedang	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
6. JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	34,11949921	Sedang	33,79000092	Sedang	54,24000168	Sedang	17,54000092	Sedang	0	Sedang
6. JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	36,60129929	Sedang	45,50999832	Sedang	46,22000122	Sedang	27	Sedang	0	Sedang
6. JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	32,167099	Sedang	31,85000038	Sedang	62,02000046	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
6. JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	36,51169968	Sedang	37,63000107	Sedang	68,81999969	Tinggi	0	Sedang	2	Sedang
6. JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	58,666680145	Tinggi	70,33999634	Tinggi	61,15000153	Sedang	63,84000015	Tinggi	4,78000021	Sedang
6. JAMBI	KABUPATEN BATANG HARI	61,17980112	Tinggi	97,5	Tinggi	53,97999954	Sedang	57,36999893	Tinggi	0	Sedang
6. JAMBI	KABUPATEN KERINCI	57,42200089	Tinggi	100	Tinggi	66,40000153	Sedang	20,7600023	Sedang	0	Sedang
7. BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
7. BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU UTARA	8,57966034	Rendah	25,26000023	Sedang	4,63000014	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
7. BENGKULU	KABUPATEN SELUMA	14,53789997	Sedang	7,15000095	Sedang	24,72999954	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
7. BENGKULU	KABUPATEN KEPAHIANG	15,98680019	Sedang	8,31000042	Sedang	24,87000084	Sedang	17,17000008	Sedang	0	Sedang
7. BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	17,02130127	Sedang	11,01000023	Sedang	36,97000122	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
7. BENGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	20,6814003	Sedang	15,71000004	Sedang	23,69000053	Sedang	29,75	Sedang	0	Sedang
7. BENGKULU	KOTA BENGKULU	18,82079887	Sedang	29,5	Sedang	27,20999947	Sedang	0	Sedang	4,78000021	Sedang
7. BENGKULU	KABUPATEN MUKOMUKO	24,18050003	Sedang	30,45000076	Sedang	33,50999924	Sedang	12,84000015	Sedang	0	Sedang
7. BENGKULU	KABUPATEN LEBONG	31,14680099	Sedang	53,08000183	Sedang	24,04000092	Sedang	30,71999931	Sedang	0	Sedang
7. BENGKULU	KABUPATEN KAUR	39,40869904	Sedang	42,13000107	Sedang	61,47000122	Sedang	18,70000076	Sedang	0	Sedang
8. SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
8. SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	5,227200031	Rendah	19,36000061	Sedang	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
8-SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	5,227200031	Rendah	19,3600061	Sedang	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	9,774600029	Rendah	16,9799954	Sedang	0	Rendah	20,7600023	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	10,2600023	Rendah	0	Rendah	27	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN SELATAN	10,61070061	Rendah	11,0100023	Sedang	20,1000038	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	17,95950127	Sedang	0	Rendah	33,15000153	Sedang	21,45000076	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	11,38960004	Rendah	24,84000015	Sedang	0	Rendah	20,7600023	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KOTA LUBUKLINGGAU	9,204299927	Rendah	34,09000015	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN EMPAT LAWANG	14,91489983	Sedang	10,65999985	Sedang	3,589999814	Rendah	42,68999863	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	18,2057991	Sedang	0	Rendah	47,9099985	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENKUAL ABAB LEMATANG ILIR	25,62099938	Sedang	19,36000061	Sedang	32,00999832	Sedang	32,91999817	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	29,96640015	Sedang	19,9799954	Sedang	52,36000061	Sedang	18,70000076	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	29,80130005	Sedang	28,05999969	Sedang	58,47999954	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	24,20770073	Sedang	62,61000061	Tinggi	12,10000038	Rendah	10,81999969	Sedang	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TIMUR	18,36750031	Sedang	0	Rendah	0	Rendah	73,47000122	Tinggi	0	Sedang
8-SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	53,18809891	Tinggi	71,08999634	Tinggi	81,01000214	Tinggi	12,84000015	Sedang	0	Sedang
9-KEPULAUAN BANGKA PINANG	KOTA PANGKAL PINANG	13,35179996	Rendah	0	Rendah	31,4099985	Sedang	0	Sedang	14,15999985	Sedang
	BELITUNG										

B. DATA IKP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024	Kategori IKP	Skor Dimensi Sosial Politik	Kategori D1	Skor Dimensi Penyelegaraan Pemilu	Kategori D2	Skor Dimensi Kontestasi	Kategori D3	Skor Dimensi Partisipasi	Kategori D4
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	15,04100037	Sedang	25,86000061	Sedang	13,76000023	Rendah	1,779999971	Sedang	23,85000038	Tinggi
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BELITUNG	13,15999985	Rendah	0	Rendah	0	Rendah	52,63999939	Sedang	0	Sedang
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	19,2077991	Sedang	0	Rendah	48,2599832	Sedang	0	Sedang	8,68999958	Sedang
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	26,97669983	Sedang	22,12000084	Sedang	26,86000061	Sedang	42,11000061	Sedang	2,70000048	Sedang
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	19,92939949	Sedang	63,06000137	Tinggi	7,63999866	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	34,2000995	Sedang	17,7999924	Sedang	32,02000046	Sedang	65,43000031	Tinggi	8,68999958	Sedang

Dokumentasi Kegiatan Penyusunan IKP































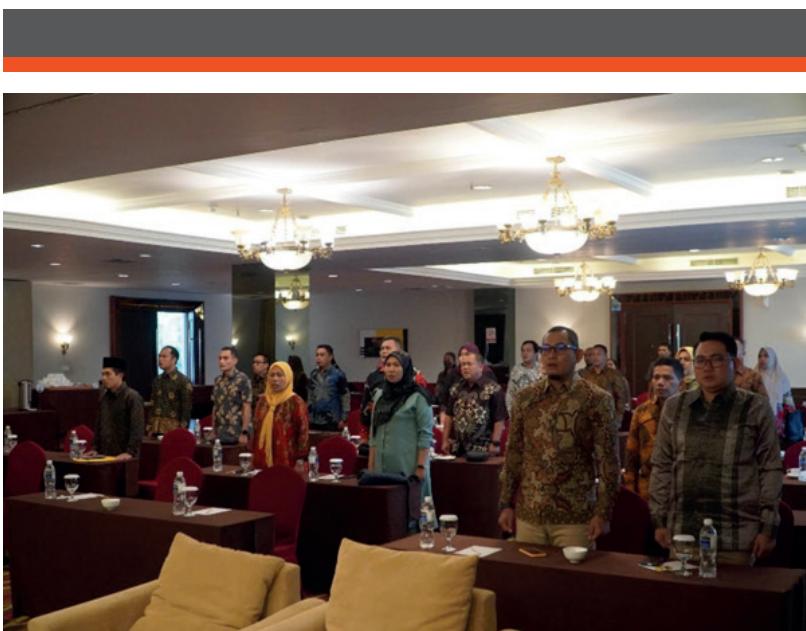










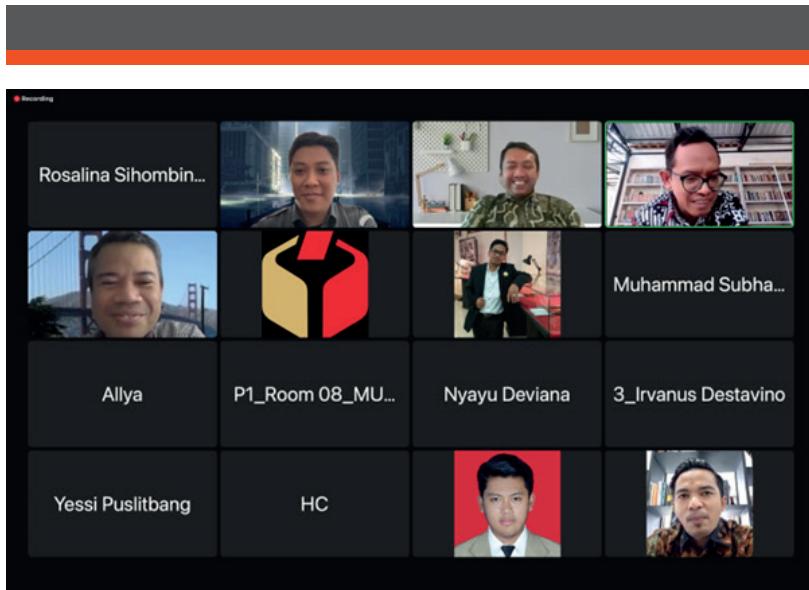








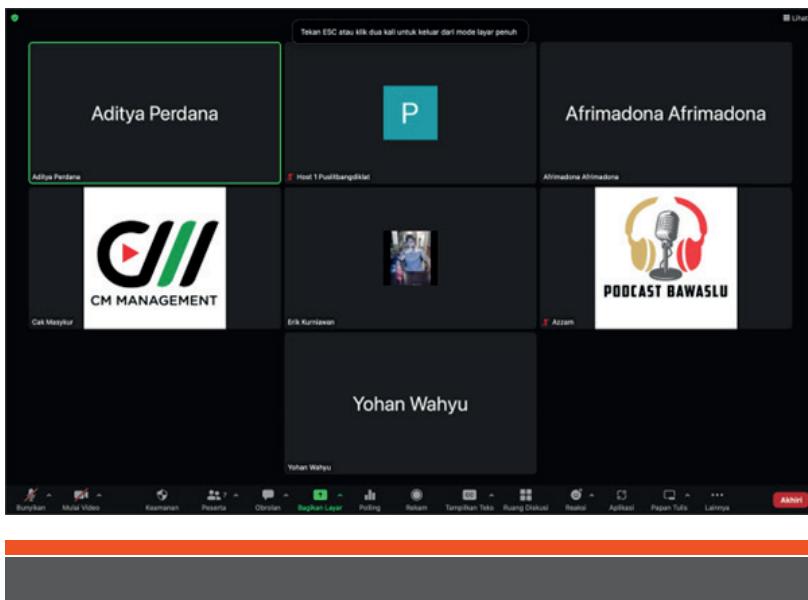
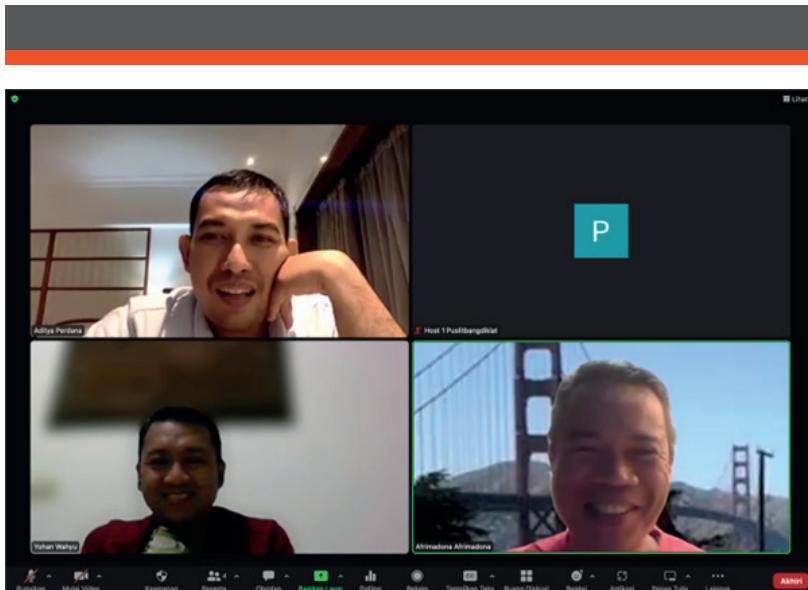




A screenshot of a Microsoft PowerPoint presentation slide titled "ISU_1". The slide contains a bulleted list of four items: 1. MENYESUAIKAN TUJUAN IKP DENGAN KONDISI BAWASLU SEKARANG. 2. PENGAWASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SEMUA DIVISI (KERAWANAN SEMUA DIVISI) 3. MEMBANGUN KONSOLIDASI, MENINGKATKAN KAPASITAS. 4. MASUK KE RUANG YANG LEBIH KUAT DI KONTESTASI (POLITIK, PENCALONAN, ANALISIS AKTOR). To the right of the slide, there is a vertical video conference sidebar showing four participant video feeds. The interface includes a dark theme with orange highlights, and the top bar shows the Microsoft Office ribbon and the "Recording" status.

B. (SHARING) KONSTRUKSI IKP (UPDATE-CM DIEDIT)	
File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Baru... Terakhir diulang beberapa detik lalu	
D42	Adanya kekerasan dan sanggah administrasi Pemilu/Pilkada
	<p>Ada keterlambatan perlengkapan dan pemungutan suara</p> <p>23 Adanya informasi tidak terdapat alat bantu pilih dalam pemungutan suara</p> <p>24 Adanya informasi tidak terdapat TPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara</p> <p>25 Adanya informasi tidak ada LAMPU</p> <p>26 Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara</p> <p>27 Adanya pemungutan suara ulang</p> <p>28 Adanya saran perbaikan dari pengawas saat pemungutan suara</p> <p>29 Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara</p> <p>30 Adanya gagalnya atas hasil Pemilu/Pilkada</p> <p>Adanya informasi mengenai hasil Pemilu/Pilkada</p> <p>31 Adanya TPS yang tidak dihadiri oleh Pengawas TPS</p> <p>32 Adanya Pemilu/Pilkada yang tidak memenuhi syarat</p> <p>33 Adanya Pemilu/Pilkada tanpa calon pemungutan</p> <p>34 Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan</p> <p>35 Adanya sanggah pencalonan</p> <p>36 Adanya informasi mafah politik dalam proses pencalonan</p> <p>37 Adanya pasangan calon tergusak dalam Pilkada</p> <p>38 Adanya informasi kerusuhan di luar jajadan</p> <p>39 Adanya informasi kerusuhan di luar jajadan</p> <p>40 Adanya slogan kampanye di luar jajadan</p> <p>41 Adanya materi kampanye yang bermisuse SARAKA</p> <p>42 Adanya materi kampanye yang bermisuse SARAKA di media sosial</p> <p>43 Adanya materi kampanye palsu</p> <p>44 Adanya praktik politik yang</p> <p>45 Adanya penegakan fasilitas negara dalam kampanye</p> <p>46 Adanya konflik antar pendukung peserta pemilu/ysangancalon</p> <p>47 Adanya partai/politik/pasangan calon yang tidak melaporkan dana kampanye</p> <p>48 Adanya partisipasi pemilih dibawah 50 persen</p>
	KONTESTASI HAK DIPILIH
	KAMPANYE
	PARTISIPASI PARTISIPASI PEMILIH

B. (SHARING) KONSTRUKSI IKP (UPDATE-CM DIEDIT)																																																																																						
File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Baru... Terakhir diulang beberapa detik lalu																																																																																						
D22	Adanya statement Tokoh Politik untuk mendekradasi																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr><th>DIMENSI</th><th>VARIABEL</th><th>NO</th><th>INDIKATOR</th><th>SUMBER SARAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>KONTEN SOSIAL POLITIK</td><td>KEAMANAN</td><td>1</td><td>Adanya kekerasan/kerusakan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepentingan</td><td>MAS ADIT</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>2</td><td>Adanya kekerasan/kerusakan berbasis SARA yang membuktikan bahwa Pemilu/Pilkada</td><td>MAS YOHAN</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>3</td><td>Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada</td><td>MAS ADIT</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>4</td><td>Adanya ketidaknyamanan dan pandemi covid 19 yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada</td><td>MAS YOHAN</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5</td><td>Adanya intimidasi dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada</td><td>MAS ADIT</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>6</td><td>Adanya perubahan KSP yang dilakukan kepada KPU</td><td>MAS ADIT</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>7</td><td>Adanya rekomendasi Rawaslu yang tidak dihadiri/diujungi oleh KPU</td><td>MAS ADIT</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>8</td><td>Adanya rekomendasi terkait dengan perbaikan spada pemungutan suara</td><td>MAS ADIT</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>9</td><td>Adanya rekomendasi bawaslu terkait netralitas ASN/TNI/POLRI</td><td>MAS YOHAN</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>10</td><td>Adanya penyelenggaraan yang buruk pada Pemilu/Pilkada</td><td>MAS YOHAN</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>11</td><td>Adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu</td><td>MAS ADIT</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>12</td><td>Adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara</td><td>MAS ADIT</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>13</td><td>Adanya intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara</td><td>MAS ADIT</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>14</td><td>Adanya rekomendasi bawaslu terkait netralitas ASN/TNI/POLRI</td><td>MAS YOHAN</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>15</td><td>Adanya hubungan ketidaksetujuan pasangan calon dengan pasangan calon lainnya, pemerintah dan/atau tokoh dalam proses pemilu/pilkada</td><td>MAS YOHAN</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>16</td><td>Adanya intimidasi dan/atau fitnah untuk memiliki calon terbaik dari pemerintah dan/atau pengusaha besar</td><td>MAS YOHAN</td></tr> </tbody> </table>	DIMENSI	VARIABEL	NO	INDIKATOR	SUMBER SARAN	KONTEN SOSIAL POLITIK	KEAMANAN	1	Adanya kekerasan/kerusakan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepentingan	MAS ADIT			2	Adanya kekerasan/kerusakan berbasis SARA yang membuktikan bahwa Pemilu/Pilkada	MAS YOHAN			3	Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada	MAS ADIT			4	Adanya ketidaknyamanan dan pandemi covid 19 yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada	MAS YOHAN			5	Adanya intimidasi dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada	MAS ADIT			6	Adanya perubahan KSP yang dilakukan kepada KPU	MAS ADIT			7	Adanya rekomendasi Rawaslu yang tidak dihadiri/diujungi oleh KPU	MAS ADIT			8	Adanya rekomendasi terkait dengan perbaikan spada pemungutan suara	MAS ADIT			9	Adanya rekomendasi bawaslu terkait netralitas ASN/TNI/POLRI	MAS YOHAN			10	Adanya penyelenggaraan yang buruk pada Pemilu/Pilkada	MAS YOHAN			11	Adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu	MAS ADIT			12	Adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara	MAS ADIT			13	Adanya intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara	MAS ADIT			14	Adanya rekomendasi bawaslu terkait netralitas ASN/TNI/POLRI	MAS YOHAN			15	Adanya hubungan ketidaksetujuan pasangan calon dengan pasangan calon lainnya, pemerintah dan/atau tokoh dalam proses pemilu/pilkada	MAS YOHAN			16	Adanya intimidasi dan/atau fitnah untuk memiliki calon terbaik dari pemerintah dan/atau pengusaha besar	MAS YOHAN
DIMENSI	VARIABEL	NO	INDIKATOR	SUMBER SARAN																																																																																		
KONTEN SOSIAL POLITIK	KEAMANAN	1	Adanya kekerasan/kerusakan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepentingan	MAS ADIT																																																																																		
		2	Adanya kekerasan/kerusakan berbasis SARA yang membuktikan bahwa Pemilu/Pilkada	MAS YOHAN																																																																																		
		3	Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada	MAS ADIT																																																																																		
		4	Adanya ketidaknyamanan dan pandemi covid 19 yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada	MAS YOHAN																																																																																		
		5	Adanya intimidasi dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada	MAS ADIT																																																																																		
		6	Adanya perubahan KSP yang dilakukan kepada KPU	MAS ADIT																																																																																		
		7	Adanya rekomendasi Rawaslu yang tidak dihadiri/diujungi oleh KPU	MAS ADIT																																																																																		
		8	Adanya rekomendasi terkait dengan perbaikan spada pemungutan suara	MAS ADIT																																																																																		
		9	Adanya rekomendasi bawaslu terkait netralitas ASN/TNI/POLRI	MAS YOHAN																																																																																		
		10	Adanya penyelenggaraan yang buruk pada Pemilu/Pilkada	MAS YOHAN																																																																																		
		11	Adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu	MAS ADIT																																																																																		
		12	Adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara	MAS ADIT																																																																																		
		13	Adanya intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara	MAS ADIT																																																																																		
		14	Adanya rekomendasi bawaslu terkait netralitas ASN/TNI/POLRI	MAS YOHAN																																																																																		
		15	Adanya hubungan ketidaksetujuan pasangan calon dengan pasangan calon lainnya, pemerintah dan/atau tokoh dalam proses pemilu/pilkada	MAS YOHAN																																																																																		
		16	Adanya intimidasi dan/atau fitnah untuk memiliki calon terbaik dari pemerintah dan/atau pengusaha besar	MAS YOHAN																																																																																		
	KONSTRUKSI IKP																																																																																					







ISBN 978-623-6188-09-5 (PDF)

A standard linear barcode representing the ISBN number 978-623-6188-09-5.

9 786236 188095